

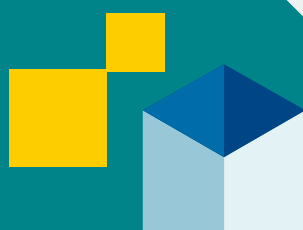


PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LAKIP 2024

Jl. Tengah Desa Toto Selatan
Kec. Kabila Kab. Bone Bolango
Telp. (0473) 831606



**PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
LKIP DAN DOKUMEN AKIP
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami Tim Kerja Peningkatan Nilai SAKIP (TKPNS) Provinsi Gorontalo selaku fasilitator telah mereviu Laporan Kinerja dan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja dan dalam dokumen akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Gorontalo, 11 Maret 2025

Fasilitator



MASRUL, ST

NIP. 19840318 201101 1 001

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atas pencapaian kinerja tahun 2024 terhadap Perjanjian Kinerja di awal tahun.

Penyusunan LAKIP Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dalam rangka memenuhi kewajiban yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kumperindag dalam satu periode.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi dinas Kumperindag dalam pengambilan kebijakan, serta dapat bermanfaat dalam penyusunan arah strategi yang lebih baik di masa yang akan datang, dan dapat menjadi landasan untuk penyusunan LAKIP ditahun selanjutnya.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta kerjasamanya dalam penyusunan LAKIP Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024 ini.

Gorontalo, Februari 2025
Kepala Dinas Kumperindag
Provinsi Gorontalo



RISTON SUNGE

Pembina Utama Madya
NIP. 196909241989021001

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2024 ini menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai, analisis capaian, tujuan dan sasaran strategis, serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Secara singkat capaian kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Sasaran yaitu :

a. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan indicator kinerja Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi provinsi Gorontalo tahun 2024 tumbuh 3,98% namun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 6,42%. Ditahun 2024 capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 21,90% dibanding tahun 2023. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 mengalami kenaikan sebesar 11,56% dan sebesar 86,22% terhadap tahun 2021.

Capaian realisasi indikator kinerja "Pertumbuhan Ekonomi" ditahun 2024 **tidak mencapai target RPD 2024** sebesar 6,42%. Capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 61,31%. Adapun persentase capaian terhadap target RPD adalah sebesar 61,99%.

Capaian dari indicator kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo jika dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2024 sebesar 79,13% dengan kriteria tinggi.

Ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2024 mampu tumbuh sebesar 4,95% (yoy), 1,5% (qtq), atau sebesar 5,03% (ctc) ditengah masih tingginya ketidakpastian dan berbagai tantangan global yang masih membayangi, seperti fragmentasi geoekonomi, ketegangan geopolitik, hingga proyeksi ekonomi global yang tumbuh 3,2% pada 2024 dan 2025, dimana masih di bawah rata-rata historis.

Solusi yang dilakukan pemerintah daerah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi agar dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu antara lain hilirisasi di sektor pertanian untuk menciptakan nilai tambah di sektor pertanian agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Gorontalo. Solusi lainnya meningkatkan nilai investasi yaitu mendukung dan mempercepat setiap investasi yang akan masuk, mendorong kewirausahaan melalui KUR

b. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan indikator kinerja Laju Inflasi

Inflasi Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan 2,87% dari target yang ditetapkan 1,93%. capaian inflasi tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu mengalami penurunan yaitu dibandingkan tahun 2022 sebesar 89,61%, tahun 2021 sebesar 78,76%. Capaian realisasi indikator kinerja "laju inflasi" ditahun 2024 **meningkat** sebesar 32,75% dibandingkan dengan target RPD 2024. Capaian dari indikator kinerja laju inflasi Provinsi Gorontalo ini jika dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2024 ini capaian kinerjanya sebesar 182,81% dengan kriteria sangat baik.

Adapun beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menekan inflasi yaitu antara lain terus memantau pelaksanaan program pada tiap OPD dan instansi terkait lainnya. Sebagai contoh, Pemprov bekerjasama dengan Bulog Gorontalo gencar menyalurkan beras SPHP. Pelaksanaan operasi pasar oleh Dinas Kumperindag dengan mengintervensi harga beras kepada pedagang beras di pasar tradisional Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Adanya komitmen dari pemerintah daerah yang terlihat dari intensitas kehadiran pejabat Gubernur dalam setiap High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai respon terhadap situasi inflasi yang meningkat serta upaya pelaksanaan operasi pasar murah khususnya untuk komoditi cabai, bawang merah, minyak goreng, beras serta komoditi lainnya (sesuai juknis) yang menjadi penyumbang utama inflasi. TPID Provinsi Gorontalo juga intens mengkampanyekan belanja bijak kepada masyarakat. Yang bertujuan agar masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan dan imbauan agar pedagang tidak menaikkan harga barang terlebih menjelang natal dan tahun baru. Upaya ini diharapkan dapat meredakan

tekanan inflasi dan memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga bahan pokok di Gorontalo

c. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator kinerja Nilai SAKIP

Capaian realisasi indikator kinerja “Nilai Sakip” Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebesar 79,46. Capaian ini jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 74,68 telah melebihi target atau capaian nilai realisasi tahun 2024 adalah sebesar 106,40%. capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja tahun sebelumnya 78,4 **meningkat sebesar 1,36%**.

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026) sehingga hanya dapat dibandingkan dengan tahun awal Renstra 2023.

Capaian indicator sasaran strategis di tahun 2024 jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2023-2026 telah **melampaui target** yang ditetapkan sebesar 6,4%. Dari target 79,68% dan realisasi 79,46%.

Capaian Nilai Sakip Dinas Koperasi Provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah sebesar 79,46 capaian ini jika dibandingkan dengan standar nasional termasuk pada Predikat nilai BB dengan nilai Sangat Baik.

Efisiensi pada sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan adalah 0,40%.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan kickoff perbaikan SAKIP dengan menghadirkan seluruh pimpinan OPD, melakukan identifikasi OPD yang mendukung enam program unggulan provinsi, menyempurnakan rumusan indikator kinerja utama pada level OPD, menyusun pedoman akuntabilitas kinerja, memperbaiki laporan kinerja, meningkatkan kapasitas evaluator internal SAKIP serta mendorong komitmen pimpinan yang akan menjadi penentu keberhasilan SAKIP.

d. Meningkatnya Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah) dengan indikator kinerja Jumlah Koperasi Berkualitas

Capaian realisasi indikator kinerja "Jumlah koperasi Berkualitas" Dinas Kumperindag 20 koperasi dan telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 20 koperasi. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi koperasi berkualitas di tahun 2023 yaitu turun sebesar 9,1%.

Capaian indikator kinerja jumlah koperasi berkualitas jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2023-2026 telah mencapai target 100 yaitu target 20 koperasi dan realisasi 20 koperasi.

Jumlah koperasi berkualitas tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional. Adapun indikator kinerja Kementerian KUKM adalah jumlah koperasi model baru dan modern dengan target 2024 sebanyak 400 unit koperasi.

Target ini diharapkan dapat terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan perkoperasian yang diberikan secara berkala kepada setiap koperasi yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo. Pembinaan Koperasi lebih menitik beratkan kepada koperasi yang telah memperoleh Penguatan Modal di tahun sebelumnya, sehingga pemanfaatan sesuai peruntukannya dan pencatatannya sesuai sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong bertambahnya koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Ke depan semakin banyak Koperasi yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) serta mengurus Ijin Usaha Koperasi sesuai usaha atau KBLI (klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia) yang ada di anggaran dasar koperasi sebagai salah satu legalitas usaha, serta Mendorong transformasi koperasi modern di Gorontalo.

Efisiensi pada sarana Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah adalah 3,15%.

e. Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah) dengan indikator kinerja Jumlah UKM yang berdaya saing

capaian realisasi indikator kinerja "jumlah UKM yang Berdaya saing" 43 UKM. Capaian ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebanyak 70 UKM.

Capaian indikator kinerja “Jumlah UKM yang Berdaya Saing” tahun 2024 sebesar 43 UKM. Mengalami penurunan 14% dibandingkan dengan tahun 2023 dengan capaian 50 UKM.

Ketidakcapaian atas target ini disebabkan kurang optimalnya anggaran untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan fasilitasi terhadap UKM yang potensial. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026) sehingga hanya dapat dibandingkan dengan tahun awal Renstra.

Capaian indikator kinerja Jumlah UKM yang Berdaya Saing jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2023-2026 **tidak mencapai target** yang ditetapkan. Dimana capaian hanya sebesar 61,43% dari target 70 UKM dan realisasi 43 UKM.

Realisasi jumlah UKM yang berdaya saing sebanyak 43 UKM. Tahun 2023 ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena sasaran strategis Kemenkop 2020-2024 adalah persentase UKM naik kelas dengan target 0,5% di 2024.

Adapun upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan jumlah UKM yang berdaya saing antara lain :

- mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada UKM melalui coaching clinic dan mentoring bagi UMKM;
- stimulan bagi UMKM sesuai juknis yang berlaku
- Peningkatan SDM bagi pelaku UMKM melalui E-commerce, marketplace.
- Peningkatan kualitas dan kontinuitas UMKM melalui kegiatan advokasi/Bimtek/Workshop.
- Perluasan akses kemitraan dengan berbagai lembaga yg membina UMKM

Efisiensi pada sarana Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah adalah 3,15%.

f. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase) dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah

Capaian realisasi indikator kinerja "Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah" tidak mencapai target yang ditetapkan sebanyak 0,84%, yaitu realisasi 0,38%. Indikator ini mengalami kenaikan sebesar 101,05% dibandingkan dengan capaian 2023.

Capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah jika dibandingkan dengan target Renstra 2023-2026 **tidak mencapai target** yang ditetapkan. Dimana capaiannya hanya sebesar 45,24% dari target yang ditetapkan 0,84% dan realisasi 0,38%.

Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam Meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil Menengah yaitu :

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku IKM melalui program peningkatan sumber daya manusia IKM, pelatihan dan pendampingan agar para pelaku IKM dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produk, bimtek peningkatan mutu produk, sertifikasi halal, PIRT serta stimulan bantuan bagi IKM
- memperluas jaringan pemasaran (peningkatan akses promosi) antara lain melalui pengembangan kemitraan IKM dengan industri besar lainnya ;
- Kemudahan mengakses pembiayaan untuk menambah modal usaha para pelaku IKM
- Pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas melalui pemanfaatan potensi bahan baku lokal

Efisiensi pada sasaran strategis Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah adalah 0,12%.

g. Meningkatnya Nilai Ekspor (USD) dengan indikator kinerja Jumlah Nilai Ekspor.

Di tahun 2024 capaian realisasi indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar \$52.967.332,45 dari target yang ditetapkan sebesar \$14.807.701. Indikator kinerja ini mengalami kenaikan 39,54% dibanding tahun 2023 dengan jumlah nilai export sebesar \$ 37.959.205.

Jumlah Nilai Eksport Tahun 2024 berjumlah \$52.967.332,45 data ini diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Asal dan BPS Provinsi Gorontalo.

Capaian indikator kinerja Jumlah Nilai Ekspor jika dibandingkan dengan dokumen renstra 2023-2026 telah **melampaui target** yang ditetapkan dengan capaian sebesar 357,70%. Dari target yang ditetapkan sebesar \$ 14.807.701 dan realisasi \$52967332,45.

Capaian indikator kinerja Jumlah Nilai Ekspor sebanyak \$ 52.967.332,45.

Ekspor Indonesia pada November 2024 tercatat sebesar USD24,01 miliar, meningkat sebesar 9,14% (yoy) yang didorong oleh kenaikan ekspor nonmigas maupun ekspor migas.

Upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan jumlah ekspor yaitu:

- meningkatkan promosi produk-produk lokal agar tingkat permintaan terhadap produk lokal unggulan semakin banyak,
- Pelatihan dan Pengembangan SDM Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal keterampilan dan pengetahuan yang berkaitan dengan perdagangan internasional
- Peningkatan Kualitas Produk guna Memastikan bahwa produk yang diekspor memenuhi standar internasional dan memiliki kualitas yang konsisten
- Dukungan anggaran untuk meningkatkan promosi produk lokal seperti mengikuti pameran dagang (TEI), dan fasilitas produksi berupa pelatihan inovasi produk. Dengan kemudahan tersebut pengusaha bisa menekan harga jualnya sehingga barang yang diproduksi mampu bersaing di pasar internasional
- Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memasarkan produk di luar negeri.
- Kemudahan perizinan dagang sesuai aturan yang berlaku

Efisiensi pada sasaran strategis Meningkatnya nilai ekspor adalah 0,23%

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo ke depan.



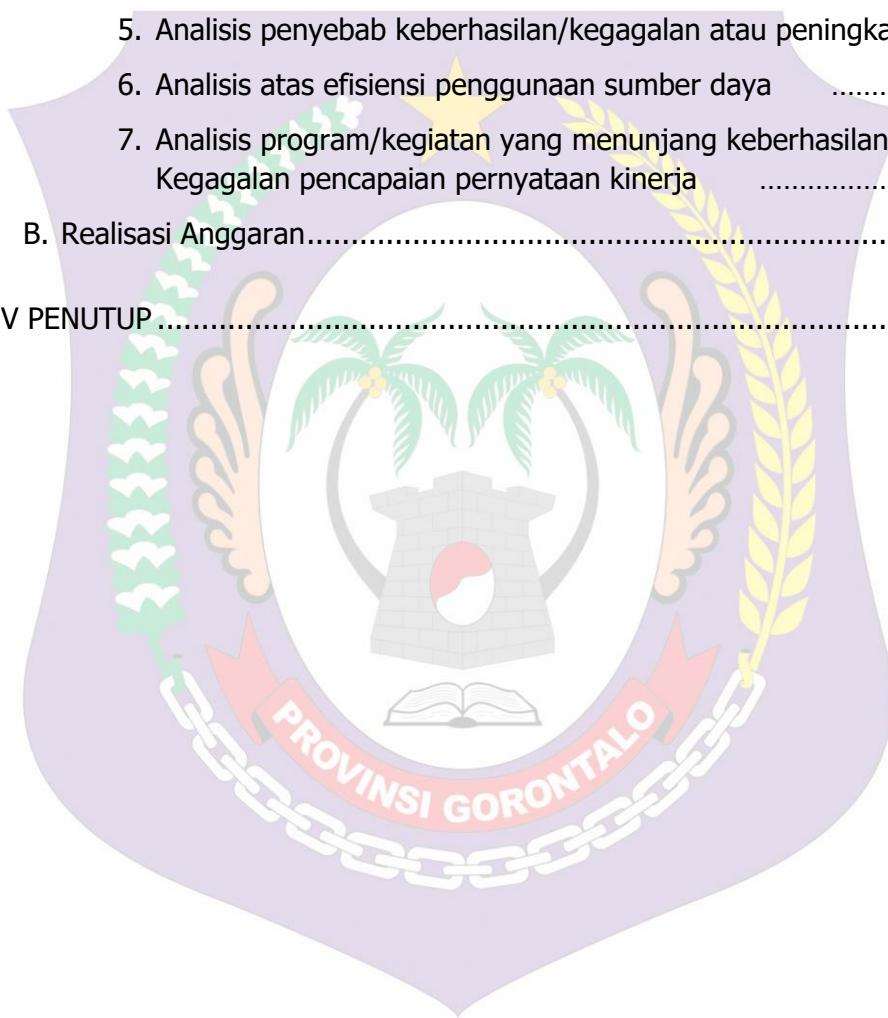
Berdasarkan Uraian diatas dapat dilihat bahwa semua indikator kinerja sasaran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan Provinsi Gorontalo terdapat beberapa indikator yang tidak dapat dicapai pada tahun 2024, sehingga tetap perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan dalam perbaikan kinerja ditahun yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.



	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Gambaran Umum OPD.....	4
E. Isu-Isu Strategis Organisasi	14
F. Keadaan Pegawai	18
G. Sarana Prasarana Kantor	23
H. Sistematika Penyusunan LAKIP.....	30
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	32
A. Rencana Strategis	32
1. Visi dan Misi Kepala Daerah	33
2. Tujuan Perangkat Daerah	36
3. Sasaran Strategis	37
4. Strategi dan Arah Kebijakan.....	38
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	46
C. Rencana Anggaran Tahun 2024.....	48
D. Instrumen Pendukung	54
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	62
A. Capaian Kinerja Diskumperindag Prov. Gorontalo	62
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024... ..	63
2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun yang lalu	66



3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 Jangka. menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	72
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Nasional	75
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan ...	78
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	84
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	87
B. Realisasi Anggaran.....	136
BAB IV PENUTUP	145



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin <i>Per 31 Desember 2024</i>	18
Tabel 1.2. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan <i>Per 31 Desember 2024</i>	20
Tabel 1.3. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Golongan <i>Per 31 Desember 2024</i>	21
Tabel 1.4. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon <i>Per 31 Desember 2024</i>	22
Tabel 1.5. Asset Tanah dan Gedung	24
Tabel 1.6. Kendaraan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024	30
Tabel 2.1. Ringkasan Visi Misi RPJPD Provinsi Gorontalo 2017-2024	35
Tabel 2.2. Tujuan Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 ...	36
Tabel 2.3. Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026	37
Tabel 2.4. Strategi dan Kebijakan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026	38
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024	47
Tabel 2.6. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo	50
Tabel 3.1. Skala Penilaian Capaian Kinerja	63
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024	63
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tujuan Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024	64
Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Lalu	67
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Lalu.....	68
Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen RPD	72

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra.....	73
Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional	75
Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional.....	77
Tabel 3.10. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	84
Tabel 3.11. Jumlah Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang di Nilai Kesehatannya <i>per 31 Desember 2024</i>	93
Tabel 3.12. Daftar pengawasan & pemeriksaan/Monev koeprasi di Provinsi <i>Gorontalo</i>	96
Tabel 3.13. Rekap Realiasi Export Berdasarkan Komoditi selang Bulan Desember Tahun 2024.....	114
Tabel 3.14. Penerbitan SKA yang Dokumennya Telah dengan Lengkap dan benar Tahun 2024.....	115
Tabel 3.15. Data Pengawasan Perlindungan Konsumen di Provinsi Gorontalo Tahun 2024.....	135
Tabel 3.16. Realisasi Anggaran setiap Sasaran Strategis Tahun 2024.....	137
Tabel 3.17. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2024.....	142
Tabel 3.17. Analisis Efisiensi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Tahun 2024.....	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Dinas Kumperindag	6
Gambar 1.2.	Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin.....	19
Gambar 1.3.	Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan.....	20
Gambar 1.4.	Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Golongan.....	22
Gambar 1.5.	Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon	23
Gambar 2.1.	Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Pemda Provinsi Gorontalo.....	55
Gambar 2.2.	Aplikasi SIKP	56
Gambar 2.3.	Aplikasi Online Data System	57
Gambar 2.4.	Aplikasi SIIInas	57
Gambar 2.5.	Aplikasi Sp2KP.....	59
Gambar 2.6.	Elektronik Surat Keterangan Asal (E-SKA)	59
Gambar 2.7.	Aplikasi New Siransija	60
Gambar 2.8.	Aplikasi SIPD.....	60
Gambar 2.9.	Aplikasi siDalev	61

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang wajib dibuat oleh setiap OPD yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja adalah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan menteri untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; yang antara lain mewajibkan seluruh pejabat pemerintah yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara untuk membuat penetapan kinerja disamping itu juga dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem pelaporan ini mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan manajemen pemerintahan, termasuk sistem perencanaan kinerja, pengukuran, dan pelaporannya.

LAKIP Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Dokumen ini mengungkapkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi Dinas yang mengindikasikan

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Tujuan penyusunan LAKIP OPD antara lain untuk, mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan terpercaya. Disisi lain Laporan ini dimaksudkan pula sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelola sumberdaya yang telah ditetapkan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo memiliki peran yang sangat strategis, karena memberikan informasi penting antara lain:

1. Menjelaskan hasil evaluasi kinerja Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo selama setahun
2. Menjadi tolak ukur untuk penyusunan rencana kerja di tahun selanjutnya.
3. Sebagai bahan pelaporan bagi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo
4. Sebagai dasar pengambilan keputusan Rencana Strategi di tahun selanjutnya.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LAKIP Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 ini, antara lain

1. Undang-Undang nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (lembaran Negara nomor 4060);
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tertulis: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara RI nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

7. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
9. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara RI nomor 4437);
10. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
11. Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
6. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Gubernur Gorontalo No, 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

C. Tujuan

LAKIP Diskumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024 ini mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik yang diwakili oleh lembaga legislatif, dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kumperindag dalam melakukan visi dan misinya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang
2. LAKIP sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan, yaitu Gubernur Gorontalo sebagai Kepala Daerah Provinsi Gorontalo.

D. Gambaran Umum OPD

Mengacu pada Peraturan Gubernur Gorontalo No. 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah, tugas fungsi serta struktur organisasi Diskumperindag adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Berdasarkan Bab XVI bagian kesatu kedudukan tugas dan fungsi pada Peraturan Gubernur Gorontalo No. 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah, maka Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
 - b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Kepala Dinas
- Dinas Koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

2. Fungsi

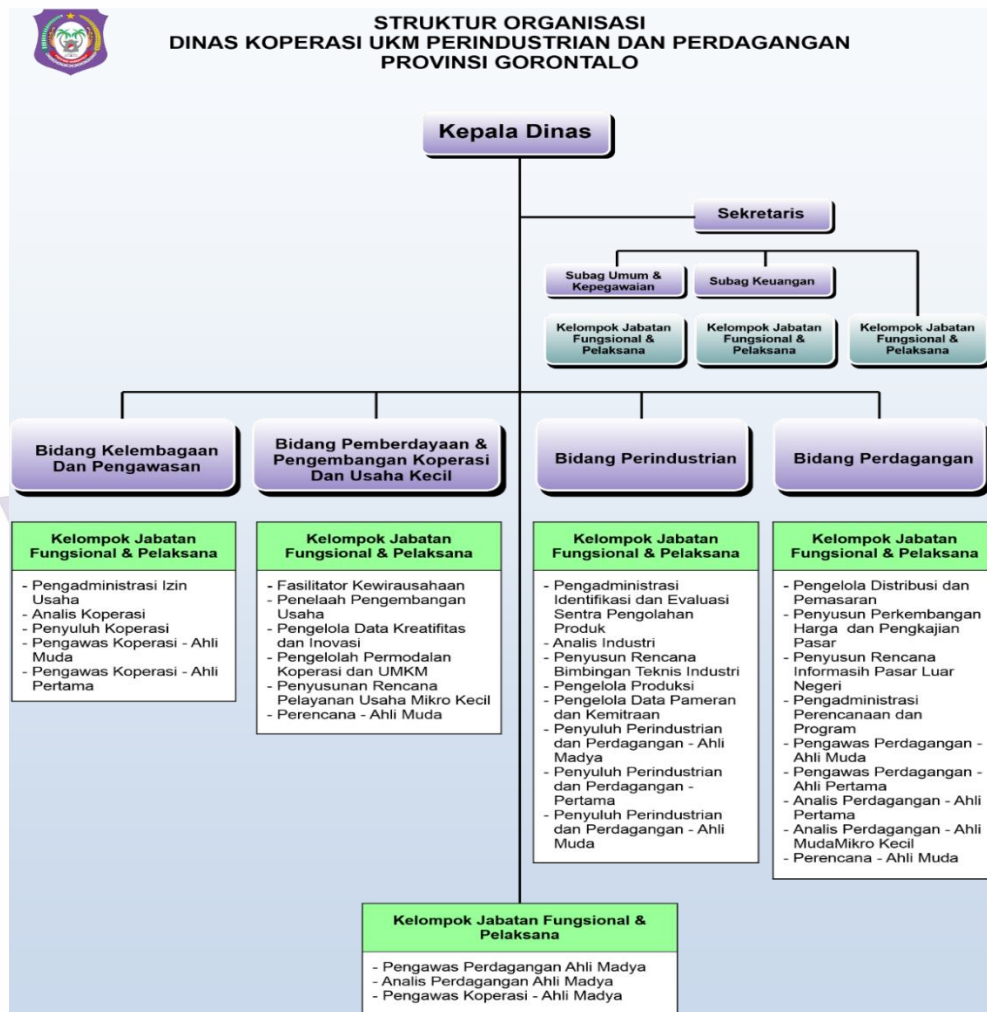
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
- f. pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo; dan
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

3. Struktur Organisasi, SDM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Struktur organisasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo No. 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang kelembagaan dan Pengawasan;
- d. Bidang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil;
- e. Bidang perindustrian;
- f. Bidang Perdagangan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1 Struktur organisasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

❖ Fungsi OPD

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan,
- penggordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan:

- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan,
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan,
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo,
- f. pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, dan
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

■ **Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas :**

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Perindustrian dan Bidang Perdagangan yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur.

Dalam melaksanakan Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan sasaran dan kebijakan pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada sasaran dan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan,
- b. penetapan Program dan Kegiatan Dinas:
- c. pembinaan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas,
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur tentang kebijakan bidang Koperasi, MKM, Perindustrian dan Perdagangan, dan
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat Pusat maupun tingkat Daerah.

■ Tugas pokok dan fungsi Sekretariat :

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
- b. pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
- c. pengelolaan umum dan Kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan dinas secara berkala; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi dan pengawasan

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. menatausahakan pengelolaan keuangan
- b. menghimpun dan mengolah data keuangan
- c. menyusun laporan keuangan SKPD:
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD,
- e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran,
- f. menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan:
- g. menyiapkan dan menerbitkan SPM,
- h. mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD melalui bendahara pengeluaran,
- i. mengelola pembayaran gaji pegawai,

- j. mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran,
- k. membuat register SPP,SPM, penolakan penerbitan SPM, penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ,
- l. membuat laporan pengesahan SPI, pengesahan pengawasan definitive anggaran /kegiatan, register kontrak /Surat Perintah Kerja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi pembayaran per nomor kontrak,
- m.membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi,
- n. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian,
- o. secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan melaporkan kepada BUD serta PA,
- p. menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan: dan
- q. menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- b. melaksanakan pelayanan ketatausahaan,
- c. menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan:
- d. memelihara, pengendalian dan pemanfaatan barang investaris,

- e. mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah,
- f. mengolah data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai berbasis aplikasi,
- g. pengembangan kapasitas SDM Aparatur:
- h. menyelenggarakan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran,
- i. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan,
- j. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- k. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris:
- l. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- m. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggungjawabnya:
- n. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris:
- o. menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN, dan SPT:
- p. menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimum (SPM),
- q. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural,
- r. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit:
- s. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan:
- t. melaksanakan tugas kehumasan,
- u. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas,

- v. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD/ Konsep Surat berdasarkan telaahan bidang-bidang dan kearsipan dinas, dan
 - w. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

■ **Tugas pokok dan fungsi Bidang Kelembagaan dan Pengawasan**

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, melaksanakan penyuluhan, bimbingan teknis, pengembangan, supervisi dan pengawasan kelembagaan usaha, permodalan koperasi, pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, bidang Kelembagaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dalam pengembangan kelembagaan, usaha dan permodalan koperasi:
- b. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian,
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan standarisasi organisasi, tatalaksana dan pemeringkatan koperasi,
- d. pelaksanaan penyuluhan, pengembangan organisasi, dan tatalaksana koperasi:
- e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengembangan kelembagaan usaha dan permodalan koperasi,
- f. melakukan pemeriksaan kelembagaan koperasi:
- g. melakukan pengawasan pemeriksaan KSP dan USP:
- h. penerapan sanksi, dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

■ Tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan UKM, melaksanakan pembinaan, pengembangan kelembagaan data dan pemberdayaan, promosi dan pemasaran produk usaha mikro kecil menengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan teknis dan pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan manajemen, data dan informasi pembiayaan Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- b. penyusunan pedoman kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, bagi Koperasi, dan UKM,
- c. penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan sistem promosi, dan pemasaran UKM,
- d. mengawasi pelaksanaan pembinaan pengembangan kelembagaan pemberdayaan UKM/ promosi dan pemasaran produk UKM,
- e. melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan data UKM secara periodik: dan
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan UKM.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

■ Tugas pokok dan fungsi Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan, standarisasi industri dan teknologi industri, peningkatan daya saing, penumbuhan wirausaha baru, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas, serta promosi industri dan jasa industri pada Industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur, Industri Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan, Industri

Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika. Dalam melaksanakan tugas, bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha baru, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan industri,
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha baru, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, serta promosi industri,
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha baru, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan serta promosi industri,
- d. penyiapan bahan dan penyusunan program serta melaksanakan pembinaan teknis dibidang industri:
- e. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pedoman kegiatan usaha dan sarana dibidang industri:
- f. merencanakan koordinasi dan pembinaan tehnik pengembangan komoditi industri, dan
- g. pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang industri.

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

■ Tugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pada urusan perdagangan, pembinaan dan pengawasan, perlindungan konsumen, promosi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan,
- b. perumusan pembinaan, pengawasan, standarisasi dan perlindungan konsumen, pendistribusi barang dan jasa lintas kab/kota,
- c. melakukan kerjasama dagang dalam rangka peningkatan produksi dalam negeri,
- d. pelaksanaan kegiatan misi dagang nasional dan internasional,
- e. pelaksanaan kegiatan operasi pasar dan pasar murah di kabupaten/kota:
- f. pelaksanaan bimtek bagi SDM perdagangan, dan
- g. perumusan laporan hasil pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perdagangan.

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

E. Isu-Isu Strategis Organisasi

Isu-isu strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo periode 2023-2026 sebagai berikut:

1. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Isu strategis di bidang Koperasi dan UMKM adalah:

- a. Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi
- b. Peningkatan Akses Pasar, Akses Permodalan,
- c. Peningkatan Kualitas SDM KUKM
- d. Peningkatan daya saing UKM.

Perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah yang besar, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah. Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM adalah:

- a. Masih banyak koperasi yang belum menjalankan aspek manajemen kelembagaan, manajemen usaha permodalan dan pencatatan koperasi sesuai ketentuan, dan banyaknya koperasi yang belum melakukan pencatatan atau laporan keuangan dengan baik sehingga menjadi kendala dalam hal mengakses Kredit ke lembaga pembiayaan serta masih kurangnya koperasi yang dapat mengakselerasi digitalisasi koperasi yang tersedia

- b. Rendahnya produktivitas, akses permodalan dan pemasaran produk KUKM.

Rendahnya kualitas SDM terhadap pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUKM Isu strategis di bidang Koperasi dan UMKM adalah:

- a. Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi
- b. Peningkatan Akses Pasar, Akses Permodalan,
- c. Peningkatan Kualitas SDM KUKM
- d. Peningkatan daya saing UKM.

Perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah. Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM adalah:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi.
- b. Rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola manajemen kelembagaan dan usaha koperasi
- c. Rendahnya produktivitas, akses permodalan dan pemasaran produk KUKM.
- d. Rendahnya kualitas SDM terhadap pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUKM

Tantangan dalam pengembangan Koperasi UKM adalah

- a. Sumber daya manusia (SDM), terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang professional

- b. Kelembagaan, dari sisi kelembagaan koperasi khususnya pembentukan koperasi dan pembuatan akta, anggota maupun pengurus koperasi tidak menemui banyak kesulitan karena mudahnya prosedur namun akan kesulitan saat harus mengurus izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait, sehingga menurunkan motivasi dan kreativitas untuk mengembangkan kelembagaannya. Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- c. Pembiayaan, perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi.
- d. Produksi dan pemasaran, pada umumnya system produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok, dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan system manajemen pembagian tugas yang baik. Namun secara umum, kualitas pendidikan pengelola UMKM masih rendah menjadikan tantangan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha, misalnya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan.

UMKM di Indonesia memiliki karakteristik informal yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya system pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Mayoritas UMKM belum menggunakan komputer dan belum memanfaatkan internet serta belum menjalin kemitraan dengan perusahaan besar atau dengan kata lain masih sedikit UKM yang aik kelas sehingga menjadi salah satu tantangan terbesar saat ini.

2. Bidang Perindustrian

Isu strategis di bidang perindustrian adalah:

- a. Peningkatan kualitas SDM industri kecil menengah dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan,
- b. Peningkatan produktivitas dan pemasaran produk IKM baik pasar lokal, regional, nasional dan internasional,
- c. Pengembangan sentra dan kluster industri di daerah,
- d. Penetapan Rencana Kawasan Industri Terpadu

3. Bidang Perdagangan

Isu strategis di bidang perdagangan adalah:

- a. Pelaksanaan operasi pasar
- b. Peningkatan infrastruktur
- c. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan konsumen,
- d. Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Pengawas Perdagangan,
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku usaha ekspor
- f. Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Standar
- g. Belum baiknya system distribusi barang dan jasa
- h. Masih rendahnya akses pasar luar negeri.

Hal ini ditandai dengan masih panjangnya rantai distribusi barang, tingginya disparitas harga antar wilayah dan fluktuasi harga di tingkat konsumen dalam kondisi tertentu seperti pada saat hari besar keagamaan. Rendahnya akses pasar luar negeri merupakan dampak dari belum berkembangnya sistem informasi pasar termasuk rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam mengakses pasar luar negeri, baik dari sisi kuantitas dan kualitas produk, promosi dan pemasaran (termasuk *market intelegent*), kapasitas usaha, dan permodalan sehingga belum mampu mengakselerasi peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah.

- i. Belum membaiknya system distribusi barang ini merupakan dampak dari jaringan distribusi yang belum tertata dengan baik (sarana pasar dan infrastruktur transportasi),
- j. Belum transparannya ketersediaan pasokan di tingkat distributor dan agen,

- k. Terbatasnya sarana penyimpanan (pergudangan, silo, pendingin) di tingkat produksi.
- l. Kebijakan perdagangan antar pulau untuk mendukung peningkatan transaksi antar pulau yang belum sinergi baik antar provinsi maupun antar kawasan strategis di Sulawesi.
- m. Masih lemahnya pengamanan pasar dalam negeri, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.

4. Bidang Pelayanan OPD

Isu strategis di bidang pelayanan SKPD adalah:

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik SKPD yang ditandai dengan keterbatasan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi,
- c. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, evaluasi dan monev program baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja kelembagaan SKPD

F. KEADAAN PEGAWAI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo harus didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai. Secara umum Sumber daya manusia/aparatur pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

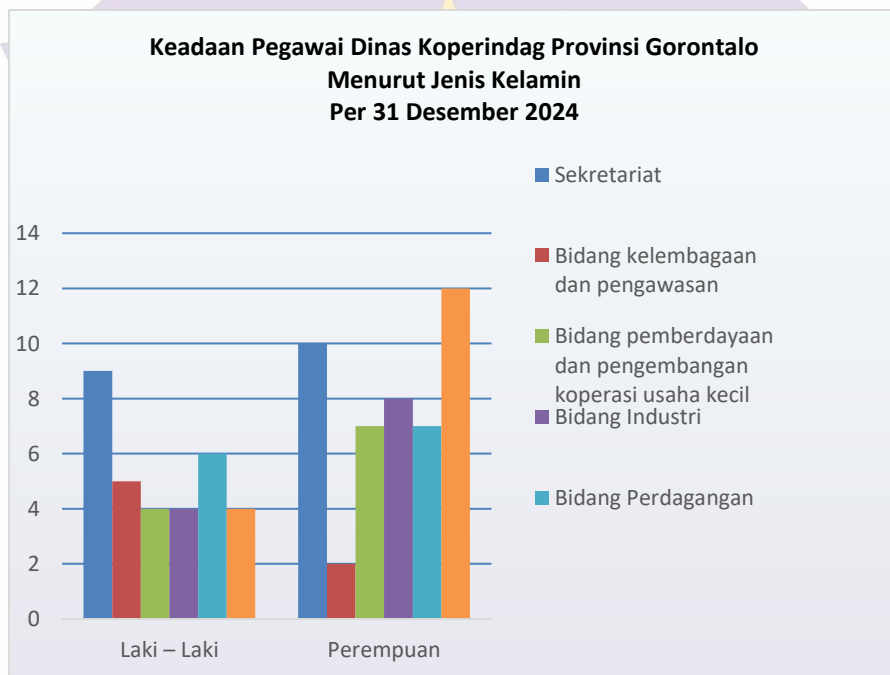
a. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin Per 31 Desember 2024

No.	Unit Organisasi	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat	9	10	19
2	Bidang kelembagaan dan pengawasan	5	2	7

No.	Unit Organisasi	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
3	Bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha kecil	4	7	11
4	Bidang Industri	4	8	12
5	Bidang Perdagangan	6	7	13
6	UPTD BPSMB	4	12	16
JUMLAH		32	46	78

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2024



Gambar 1.2. Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin

Data diatas menunjukkan proporsi pegawai di lingkup Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo lebih didominasi oleh pegawai perempuan dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Dimana Jumlah pegawai perempuan mencapai 58,97% sedangkan pegawai laki-laki 41,03 %. Konsentrasi pegawai terbanyak di UPTD BPSMB sebanyak 12 orang, kemudian diikuti oleh sekretariat 19 orang dan Bidang perdagangan 13 orang.

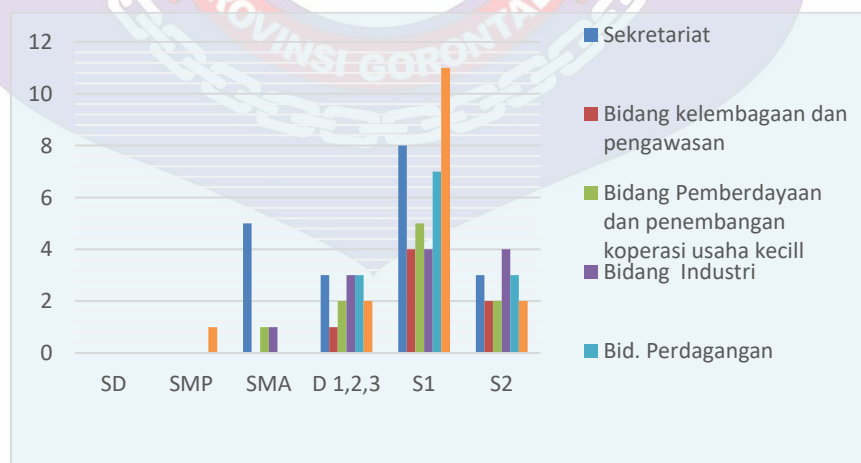
Berdasarkan proporsi tersebut diatas, maka penyebaran dan jumlah pegawai di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo telah memenuhi unsur kesetaraan gender dalam MDG's.

Adapun keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.2. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2024

No	Unit Organisasi	SD	SMP	SMA	D 1,2,3	S1	S2	Jumlah
1	Sekretariat	-	-	5	3	8	3	19
2	Bidang kelembagaan dan pengawasan	-	-	-	1	4	2	7
3	Bidang Pemberdayaan dan penembangan koperasi usaha kecil	-	-	1	2	5	2	11
4	Bidang Industri	-	-	1	3	4	4	12
5	Bid. Perdagangan	-	-	-	3	7	3	13
6	UPTD BPSMB	-	1	-	2	11	2	16
JUMLAH		-	1	7	14	39	16	78

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2024



Gambar 1.3. Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo adalah jenjang S1 dan tidak ada pegawai yang berpendidikan SD. Adapun keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menunjukkan 50% berpendidikan S1. Kemudian untuk ASN yang memiliki jenjang pendidikan S2 sebesar 20,5%. Begitupun halnya dengan ASN yang memiliki pendidikan D1,D2,D3 sebesar 18,5%. Untuk jenjang pendidikan SMA ditahun 2023 sebesar 9,7% dan jenjang SMP sebesar 1,3%.

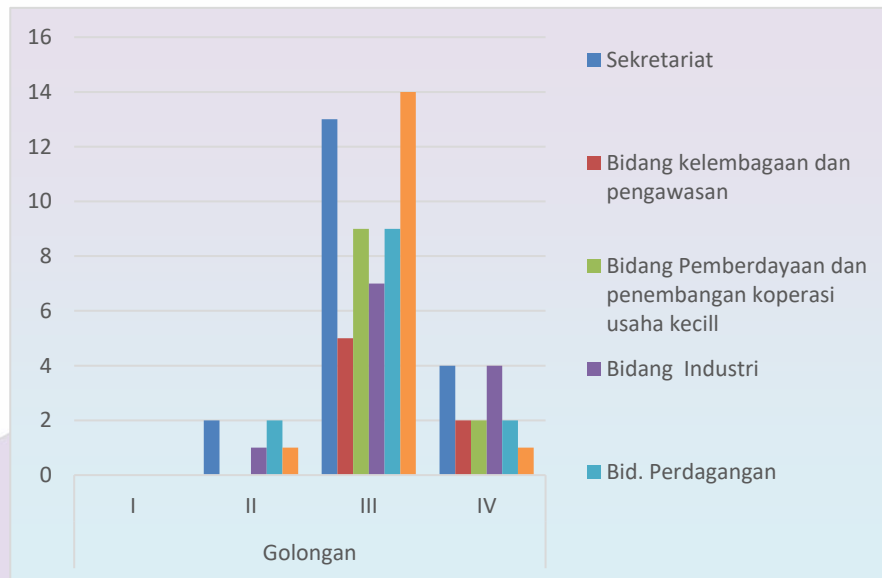
Berdasarkan data tersebut diatas maka pengembangan SDM Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo masih diperlukan dalam rangka penyiapan SDM yang handal dan professional, serta mendorong pegawai yang berpendidikan setara SMA dan Diploma untuk mengikuti pendidikan S1 sesuai keahlian. Meskipun telah terlihat adanya peningkatan dari pendidikan jenjang SMA ke S1.

Upaya meningkatkan jumlah PNS dengan kualifikasi jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus diikuti pula dengan upaya yang sistimatis terhadap kesesuaian disiplin ilmu dengan tupoksi OPD. Dengan begitu, pencapaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat ditingkatkan.

Tabel 1.3. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menurut Golongan Per 31 Desember 2024

No	Unit Organisasi	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	0	2	13	4	19
2	Bidang kelembagaan dan pengawasan	0	0	5	2	7
3	Bidang Pemberdayaan dan penembangan koperasi usaha kecil	0	0	9	2	11
4	Bidang Industri	0	1	7	4	12
5	Bid. Perdagangan	0	2	9	2	13
6	UPTD BPSMB	0	1	14	1	16
TOTAL		0	6	57	15	78

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2024



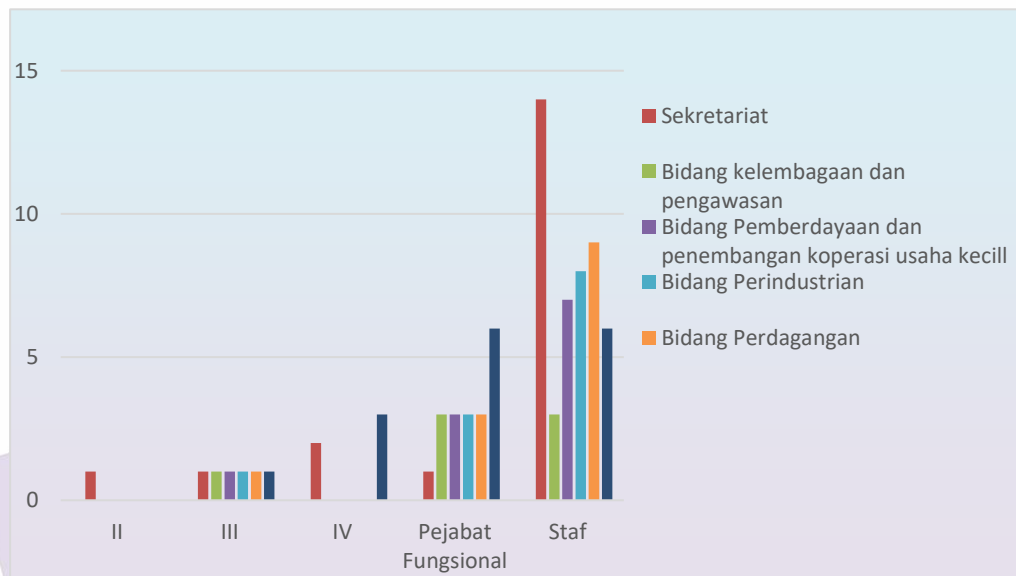
Gambar 1.4. Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Golongan

Berdasarkan tabel diatas maka keadaan pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berdasarkan Golongan terdiri dari 7,6% golongan II, 73,2% golongan III dan 19,2 % golongan IV.

Tabel 1.4. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon Per 31 Desember 2024

No	Unit Organisasi	Eselon			Pejabat Fungsional	Staf	Jumlah
		II	III	IV			
1	Sekretariat	1	1	2	1	14	18
2	Bidang kelembagaan dan pengawasan	-	1	0	3	3	7
3	Bidang Pemberdayaan dan penembangan koperasi usaha kecil	-	1	0	3	7	11
4	Bidang Perindustrian	-	1	0	3	8	12
5	Bidang Perdagangan	-	1	0	3	9	13
6	UPTD BPSMB	-	1	3	6	6	16
TOTAL		1	6	5	19	47	78

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2024



Gambar 1.5. Grafik Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon

Keadaan pegawai menurut eselon menunjukkan jumlah pejabat struktural yang mengisi struktur organisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo urusan wajib dengan komposisi pejabat eselon II sebanyak 1 orang (1,28%), pejabat eselon III berjumlah 6 orang atau 7,69 % dan pejabat eselon IV berjumlah 4 orang atau 6,41 %. Dari komposisi ini terlihat bahwa tenaga atau pejabat fungsional di lingkup Dinas Kumperindag pada urusan Koperasi & UKM tersedia sebanyak 19 orang untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sejak tahun 2023 terdapat penambahan jumlah pejabat fungsional karena adanya penyetaraan jabatan dari struktur Esselon IV ke pejabat fungsional.

G. SARANA PRASARANA KANTOR

Dalam mewujudkan visi, misi, kebijakan dan sasaran pembangunan bidang koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo didukung oleh sarana dan prasarana antara lain :

1. Tanah dan Bangunan

Tanah dan bangunan gedung merupakan fasilitas vital yang dimiliki oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo. Hingga 31 Desember 2024 tanah dan

gedung yang tercatat sebagai asset Dinas Kumperindag dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5. Asset Tanah dan Gedung

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	15,424.00	2004	Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila	Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo	Belanja Pengadaan Tanah Tahap I Sertifikat Asli ada di Dinas Keuangan dan Aset Daerah Prov. Gorontalo
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0	2004	Jln Tengah Desa Toto Selatan		Belanja Pengadaan Tanah Tahap II
3	Tanah Bangunan Laboratorium	8,769.00	2004	Jln Tinaloga Desa Toto Utara Kec. Kabila	UPTD. Metrologi Balai	Sertifikat Asli ada di Dinas Keuangan dan Aset Daerah Prov. Gorontalo
4	Tanah Lapangan lainnya	23,100.00	2013	Kel. Bullide		Diperoleh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Sertifikat di Dinas Keuangan dan Aset Provinsi Gorontalo
5	Tanah Lapangan Taman lainnya	243	2007	taman wisata iluta		Bukan Taman Wisata Iluta, tetapi Taman Wisata di Area KIAT senilai Rp. 20.000.000,
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	383,66	12/31/2006	Jl.Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango		Gedung Kantor UPTD. Metrologi Tahun 2006

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	15242	12/31/2005	Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab.Bone Bolango		Gedung Pusat Promosi (Gedung Kantor Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo) Tahun 2005
8.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8769	12/31/2006	Jl.Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango		Gedung UPTD. BPSMB (diperoleh awal Rp. 401.466.000,- tambahan rehab 2012 dikapitalisasi sebesar Rp. 218.997.500,-) Tahun 2006 Penyimpanan UPTD. Metrologi Tahun 2006
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	43,37				pekerjaan pembangunan gedung pelayanan tera-tera ulang uptd. metrologi
10	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	565,8		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Pengadaan Backdrop
11	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	386		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Pengadaan Panggung
12	Bangunan Gedung kantor Lain-Lain	129600		Jl.Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango		Belanja Rumah Genset BPSMB

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
13	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	4		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango		Gazebo
14	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	70,5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Hasil Produksi (untuk Kegiatan Fasilitas Pengembangan Teknologi Inkubator Teknologi dan Bisnis) Tahun 2008
15	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	63		Jl. Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango		Gudang Arsip dan Inventaris Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2013
16	Bangunan Gudang Lain-Lain (dst)	148		Jln Tinaloga Desa Toto Utara Kec. Kabila		Gedung Penyimpanan UPTD. Metrologi Tahun 2006
17	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	8769		Jl. Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango		Gedung Laboratorium UPTD. Metrologi Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo
18	Gedung Pos Jaga Permanen	92,4		Jl. Sawah Besar Kec. Kabila		Pos satpam
19	Gedung Garasi/Pool Permanen	34,1	Jl.Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango			Garasi Kendaraan Dinas
20	Bangunan Kolam bak Ikan	230,4	Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango			Fasilitas Umum

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
21	Bangunan Penerangan taman	1421		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango		Penataan Lampu Hias Kolam
22	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	53,48		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Tempat Genset, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007
23	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	75,85		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Gedung Stand Pameran, Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2008
24	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	354				Taman (Panggung dan Paving)
25	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	66,5	12/31/2006	Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Bakso Ikan, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006
26	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	108		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Jagung, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006
27	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	93.5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Pakan Ternak, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
28	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	66.5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Cabe Bubuk, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006
29	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	87,5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Jahe, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006
30	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	87,5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Saos Tomat, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007
31	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	89		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Bangunan Pabrik VCO, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007
32	Bangunan Gedung Pabrik permanen	43,37		Ds. Dulomo Kc. Tilango Kab. Gorontalo		Gedung Pabrik Es di Provinsi Gorontalo pada Kegiatan Pengembangan Industri Terpadu
33	Taman Semi Permanen	796		Jl. toto selatan Kab. Bone Bolango		Paving Kolam
34	Taman Semi Permanen	980		Jl. toto selatan Kab. Bone Bolango		Penataan Kolam
35	Taman lainnya	8769		Jl.Tinaloga Desa Toto Selatan Kab.Bone-Bolango		Bangunan Pagar UPTD. Metrologi dan UPTD. BPSMB Tahun 2005

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
36	Taman lainnya	1.65		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Pembangunan Pagar Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007
37	Taman lainnya	14,4		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Pondasi Pagar Kantor Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2008
38	Taman lainnya	14,4		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Pagar Kantor Keliling
39	Pagar permanen	14,4		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Pagar Kantor Depan
40	Pagar Permanen	14,4		~ Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Lanjutan bangunan pagar kantor
41	Pagar Permanen Semi	54		Ds. Bube. Kec. Suwawa. Kab Bone Bolango		Pembangunan Pagar KIAT

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2024

2. Kendaraan Dinas

Salah satu aspek pendukung operasional tugas pokok dan fungsi Dinas Koperindag Provinsi Gorontalo adalah kendaraan dinas roda dua maupun roda empat. Adapun jumlah kendaraan dinas per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6. Kendaraan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Aset Kendaraan Dinas OPD	Jumlah
Kendaraan Roda Dua / Motor	16 unit
Kendaraan Dinas Plat Merah / Non KDO	9 unit
Total	25 unit

H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Adapun sistematika penyusunan LAKIP Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Tujuan
- D. Gambaran Umum OPD
- E. Isu-Isu Strategis Organisasi
- F. Keadaan Pegawai
- G. Sarana & Prasarana Kantor
- H. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C. Rencana Anggaran Tahun 2024
- D. Instrumen Pendukung

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Diskumperindag Provinsi Gorontalo
 - 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024
 - 2. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun yang lalu
 - 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra)



4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Keuangan

BAB IV PENUTUP



A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo selama kurun waktu satu sampai dengan empat tahun yaitu tahun 2023-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah Menengah Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023- 2026 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk bagi Penjabat Gubernur untuk penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Gorontalo sampai dengan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dilantik.

Dokumen RPD juga sebagai pedoman DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dokumen RPD disusun secara sinergis, terpadu, menyeluruh dan partisipatif, serta searah dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, dan selaras dengan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan dengan memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karenanya, dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka seluruh unsur perangkat daerah, masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan serta mendukung program-program pembangunan dalam

Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Selanjutnya sebagai pedoman perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Daerah (Renstra) tahun 2023- 2026 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dalam penyusunannya, perangkat daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1. Visi dan Misi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah Menengah Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023- 2026 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RPD disusun secara sinergis, terpadu, menyeluruh dan partisipatif, serta searah dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, dan selaras dengan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan dengan memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Maka sebagai pedoman, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Daerah (Renstra) tahun 2023- 2026 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemeirntah (LAKIP) Tahun 2024 ini tidak terlepas dari penjabaran dari dokumen Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan empat tahun pada sektor Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Gorontalo dan dokumen tersebut merupakan penjabaran teknis dari dokumen RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dirumuskan berdasarkan Kebijakan penyusunan rencana pembangunan daerah bagi

kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, dimana penyusunannya dilakukan secara teknokratik. RPD 2023 - 2026 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan yang terakhir dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007 - 2025. Periode akhir dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan **Visi Jangka Panjang Gorontalo 2007 - 2025, yaitu Gorontalo Maju Dan Mandiri.**

Perumusan Rencana Pembangunan Daerah dalam RPD 2023-2026 mengacu pada upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025 dimana terdapat misi yang menjadi penjabaran pencapaian visi RPJPD serta focus-fokus pembangunan utama, yaitu; Misi Pertama, Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal, Misi Kedua, Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal. Misi ketiga, Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah

Tujuan :

1. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 - Rasio Konektivitas Provinsi
2. Meningkatnya kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, pelayanan publik yang lebih berkualitas serta akuntabilitas kinerja dan perencanaan, pengawasan, yang handal, efektif dan berintegritas :
 - Nilai SAKIP (dari B menjadi A)
 - Nilai WTP
 - Indeks Kepuasan Masyarakat
 - Indeks Inovasi Daerah
 - Presentase Hasil Temuan (No Temuan)

Dokumen RPD disusun secara sinergis, terpadu, menyeluruh dan partisipatif, serta searah dengan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, dan selaras dengan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Selanjutnya Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Daerah (Renstra) tahun 2023- 2026 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam penyusunannya, perangkat daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPD dan Renstra Perangkat Daerah melalui proses pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil RPD sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dirumuskan berdasarkan Kebijakan penyusunan rencana pembangunan daerah bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, dimana penyusunannya dilakukan secara teknokratik. RPD 2023 - 2026 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan yang terakhir dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007 - 2025. Periode akhir dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2007 - 2025, yaitu Gorontalo Maju Dan Mandiri. Misi Pertama, Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal, Misi Kedua Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal dan misi ketiga Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alur cascade RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

VISI : "Gorontalo Maju dan Mandiri"				
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal	Peningkatan Eknomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian	Nilai Export (Juta USD)
		Inflasi		

VISI : "Gorontalo Maju dan Mandiri"				
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
	Terwujudnya Good dan Clean Government		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP

*Visi & Misi mengacu pada RPJPD 2007-2025

Lebih lanjut untuk mendukung pencapaian visi dan misi maka yang menjadi tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo di Bidang Kumperindag tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Tujuan Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Base Line 2022	Target Tahunan				Target Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	4,01	5,67	6,42	6,66	7,1	7,1
	Inflasi	2,63	4-5	1,93	1,86	1,82	1,82

Berangkat dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berupaya mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu: "Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB dan Nilai Export (juta USD)".

2. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran strategis merupakan bagian integral dari perencanaan strategis sekaligus menjadi dasar yang kuat dalam mengendalikan, memantau dan mengukur pencapaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, dengan asumsi bahwa jika seluruh sasaran strategis telah dicapai maka dengan sendirinya tujuan strategis pun akan tercapai. Indikator tujuan dapat diukur melalui indikator sasaran.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Perumusan tujuan didasarkan pada isu-isu aktual dan analisa sehingga Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat secara tepat menentukan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan. Dengan mengacu pada visi dan misi RPJPD dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Melalui perumusan tujuan strategis, Dinas Kumperindag dapat mengukur sejauh mana visi dan misi dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

Dengan mengacu pada visi dan misi RPJPD tersebut diatas, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk 4 (empat) tahun sebagaimana jangka waktu Renstra.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, maka Tujuan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo adalah :

- 1). Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
 - 2). Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja Dan Daya Saing Perekonomian
- dengan indikator tujuan sebagai berikut :
- 1). Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan
 - 2). Kontribusi Industri terhadap PDRB
 - 3) Nilai Ekspor

3. Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan strategis yang telah ditetapkan maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu empat tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan				Kondisi Akhir RPD Renstra
			2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kumperindag	Nilai SAKIP	74,5	74,68	74,88	75,05	75,05
2	Meningkatnya Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah	Jumlah Koperasi Berkualitas	20	20	20	20	20
		Jumlah UKM yang berdaya saing	60	70	80	90	300
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	0,78%	0,84%	0,90%	0,95%	0,95%
	Meningkatnya Nilai Export	Jumlah Nilai Ekspor	\$14.102.573	\$14.807.701	\$15.548.086	\$16.325.490	\$16.325.490

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Strategi dan Kebijakan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kumperindag	Nilai SAKIP	Meningkatkan Kualitas Perencanaan,	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan penatausahaan
		Pengelolaan Keuangan dan	2. Transformasi digital dalam penerapan SPBE

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Reformasi Birokrasi	(Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			3. Meningkatkan Sarana, Prasarana, SDM dan Administrasi Perkantoran
			4. Meningkatkan Tata Kelola Data Sektoral dan Keuangan
Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah),	Jumlah Koperasi Berkualitas	Meningkatkan kapasitas usaha dan kelembagaan koperasi UKM	1. Peningkatan kapasitas SDM koperasi dan pendampingan koperasi
	Jumlah UKM yang berdaya saing		2. Peningkatan Kapasitas Usaha, akses pasar, akses pembiayaan dan penataan manajemen usaha
			3. Pengawasan, Pemeriksaan, Pengendalian serta Penilaian Kualitas dan Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
			4. Fasilitasi pembiayaan dan penguatan modal UKM, Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM serta Kelembagaan UKM
			5. Digitalisasi promosi, perluasan pemasaran dan pengembangan UKM (Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia
			6. Peningkatan produktifitas UKM (produksi, pemasaran, kelembagaan,

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
			kerjasama dan kemitraan)
Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase),	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	Menyiapkan desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem informasi industri	1. Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri (RPIP/RPIK) Tahun 2021-2041
			2. Fasilitasi Perolehan Izin dan pengawasan Usaha Industri
			3. Penyediaan Data Informasi Industri Berbasis Digital
Meningkatnya nilai ekspor (USD)	Jumlah Nilai Ekspor	Peningkatan kelancaran arus barang, stabilisasi harga dan pasar	1. Pengawasan dan Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok/Barang penting
			2. Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan/ tertib niaga/ barang beredar dan jasa serta rekomendasi ekspor
		Perluasan kemitraan dan kerjasama internasional, Pameran dan misi dagang untuk mendorong eksport	3. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, pengawasan kegiatan perdagangan/tertib niaga/barang beredar dan jasa serta promosi penggunaan produk dalam negeri
			4. Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor dan Optimalisasi Task Force Ekspor

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Pengembangan usaha dan mutu pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan	5. Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Dalam Pencapaian misi Pemerintah Daerah pada RPJPD ini, maka Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan menjabarkannya menjadi tujuan perangkat daerah yaitu

- 1). Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
- 2). Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja Dan Daya Saing Perekonomian

Indikator Tujuan yaitu :

- 1). Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan
- 2). Kontribusi Industri terhadap PDRB
- 3). Nilai Ekspor

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut, maka dijabarkan kembali menjadi sasaran yaitu

- 1). Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kumperindag
- 2). Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)
- 3). Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase),
- 4). Meningkatnya nilai ekspor (USD)

dengan indikator sasaran yaitu :

- 1). Nilai SAKIP
- 2). Jumlah Koperasi Berkualitas
- 3). Jumlah UKM yang berdaya saing
- 4). Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah
- 5). Jumlah Nilai Ekspor

Pencapaian kinerja pada **indikator tujuan pertama**, dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan.

✚ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

✚ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

✚ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

✚ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

2). Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Outcome dari program ini Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya

Kegiatan adalah:

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

(Termasuk DAK Non Fisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM & Ketenagakerjaan)

3). Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Outcome dari program ini adalah jumlah koperasi sehat

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan Perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta Akuntabel

4). Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Outcome dari program ini adalah jumlah koperasi aktif

Prioritas kegiatan adalah:

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

Peningkatan produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

5). Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);

Outcome program ini adalah Jumlah UKM yang berdaya saing

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub Kegiatan :

- Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan

6). Program Pengembangan UMKM

Outcome program ini adalah Jumlah UKM yang bertransformasi usaha

Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.

Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi

Pencapaian kinerja pada **indikator tujuan kedua**, dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut

7). Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Outcome Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri

✚ Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Pencapaian kinerja pada **indikator tujuan ketiga**, dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut

8). Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Outcome Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen

✚ Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

✚ Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengembangan Layanan Pengujian
- Pengembangan Layanan Sertifikasi
- Verifikasi Mutu Produk

- ✚ Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

- 9). Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Outcome Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang penting

- ✚ Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Sub Kegiatan :

- Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota
- Operasi pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi

- 10). Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Outcome dari program ini adalah Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi

- ✚ Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

Sub Kegiatan :

Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

Tahun 2024 terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak teranggarkan yaitu:

1. Program Pengembangan Ekspor

Outcome Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

Sub Kegiatan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Outcome Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Outcome Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri

Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang termuat dalam Perpres No. 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adapun petunjuk Teknis tentang penyusunan Kinerja yakni:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur,
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan anggaran atau DPA.

Petunjuk teknis tentang penyusunan perjanjian kinerja tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Gorontalo Tahun 2024**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Dinas Kumperindag	Nilai SAKIP	74,68
2	Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (jumlah)	Jumlah Koperasi Berkualitas	20 Koperasi
		Jumlah UKM yang berdaya saing	70 UKM

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
	Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	0,84%
	Meningkatnya Nilai Ekspor (USD)	Jumlah Nilai Ekspor	US\$ 14.807.701

C. Rencana Anggaran Tahun 2024

Dalam pelaksanaan program/kegiatan TA 2024, Alokasi anggaran Dinas Kumperindag setelah perubahan sebesar **Rp. 41.063.393.248,-** anggaran ini sudah termasuk gaji, tunjangan ASN dan DAK non fisik P2KUKM. Pagu anggaran awal Dinas Kumperindag TA. 2024 sebesar Rp. 37.320.808.366,- kemudian pada tahapan revisi anggaran terdapat tambahan anggaran melalui pemanfaatan sisa IF 2023 tahun 2024 sebesar Rp. 3.187.933.882,- (pada sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi) kemudian pergeseran antar OPD dengan totalan (Rp.1.662.940.000,-) yaitu pada sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi senilai (Rp. 370.650.000,-), pada sub kegiatan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi senilai (Rp. 1.083.200.000,-) dan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Rp. 206.000.000,-) serta sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pembangunan sumber daya industri (Rp. 3.090.000,-)

Pada tahapan APBD-P 2024 Dinas Kumperindag provinsi Gorontalo tambahan anggaran Rp. 2.021.900.000,-. Sehingga total anggaran setelah perubahan Rp. 41.063.393.248,- (empat puluh satu milyar enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan realisasi Rp. 40.817.064.768,-

Sehingga Implementasi rencana strategis tahun 2023-2026 untuk tahun 2024 yang mencakup pelaksanaan program/kegiatan mendapat dukungan

anggaran total sebesar **Rp. 41.063.393.248,-** (melalui sumber dana APBD dan sisa IF 2023 tahun 2024) yaitu :

✚ *Pagu Tahun Anggaran 2024*

- Belanja Operasi : Rp. 41.063.393.248,-
 - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.691.630.216
 - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 31.371.763.032,-
- Belanja Modal : Rp. -

✚ *Realisasi Anggaran :*

- Belanja Operasi :Rp. 40.817.064.768,-
 - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.659.965.973,-
 - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 31.157.098.795,-
- Belanja Modal : Rp. -

Anggaran ini untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang terdiri atas 10 program, 15 kegiatan dan 22 sub kegiatan (termasuk DAK Non Fisik P2KUKM). Ditahun 2024 terdapat indikator program yang belum tercapai. Adapun untuk indikator program yang belum tercapai antara lain :

- Jumlah UKM yang berdaya saing dengan capaian 43 UKM dari target 140 UKM. Ketidacapaian atas target ini disebabkan kurang optimalnya anggaran untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan fasilitasi terhadap UKM yang berpotensi. capaian atas realisasi ini diperoleh dari UKM yang telah mengikuti kurasi produk yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan Bank Indonesia. Indikator UKM yang berdaya saing antara lain adanya peningkatan produktifitas, peningkatan pangsa pasar serta pertumbuhan output.
- Pada urusan Koperasi UKM terdapat 1 sub kegiatan yang tidak terpenuhi target kinerja karena tidak teranggarkan yaitu kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi (target 2 dokumen, realisasi 1 dokumen yaitu dokumen surat keterangan asal)

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

No	Sasaran	Anggaran (Rp)*
1	~ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan ~ Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian	
2	Sumber Dana APBD	35.199.934.366,-
3	Sumber Dana DAK Non Fisik	2.675.525.000,-
4	Pemanfaatan Sisa IF 2023 Tahun 2024	3.187.933.882,-
Jumlah		41.063.393.248,-

**anggaran setelah APBD-P 2024*

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2024	Total Pagu Setelah Perubahan 2024
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	37.320.809.366	41.063.393.248
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	32.538.964.016	31.200.339.016
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.615.353.291	12.388.303.291
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	214.472.275	489.736.075
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.913.275	271.551.075
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.559.000	218.185.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.110.979.666	9.753.272.966
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.077.130.216	9.691.630.216

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2024	Total Pagu Setelah Perubahan 2024
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.849.450	61.642.750
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	553.632.000	469.510.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	553.632.000	469.510.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.736.269.350	1.675.784.250
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.736.269.350	1.675.784.250
Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (jumlah)	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	77.755.475	77.755.475
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	77.755.475	77.755.475
	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	77.755.475	77.755.475
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.649.855.250	1.649.855.250
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.649.855.250	1.649.855.250
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.649.855.250	1.649.855.250
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	670.416.750	675.696.750
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	670.416.750	675.696.750
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses	670.416.750	675.696.750

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2024	Total Pagu Setelah Perubahan 2024
	Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		
	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.267.183.250	1.293.583.250
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1.267.183.250	1.293.583.250
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	132.000.000	158.400.000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	1.135.183.250	1.135.183.250
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	16.258.400.000	15.115.145.000
	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	16.258.400.000	15.115.145.000
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	16.258.400.000	15.115.145.000
Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI	1.861.808.250	2.143.053.250
	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.861.808.250	2.143.053.250
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1.861.808.250	2.143.053.250
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	388.561.750	728.251.750

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2024	Total Pagu Setelah Perubahan 2024
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.366.629.750	1.292.784.750
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	106.616.750	122.016.750
Meningkatnya Nilai Ekspor (USD)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.920.037.100	7.720.000.982
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	29.616.750	29.616.750
	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	29.616.750	29.616.750
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	29.616.750	29.616.750
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	1.474.200.100	5.718.663.982
	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.474.200.100	5.718.663.982
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	103.400.000	124.080.000
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.370.800.100	5.594.583.982
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.416.220.250	1.971.720.250
	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.253.616.750	1.809.116.750
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1.253.616.750	1.809.116.750

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Awal 2024	Total Pagu Setelah Perubahan 2024
	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	123.166.750	123.166.750
	Pengembangan Layanan Pengujian	53.322.000	53.322.000
	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	69.844.750	69.844.750
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	39.436.750	39.436.750
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	39.436.750	39.436.750

D. INSTRUMEN PENDUKUNG

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kumperindag dalam menunjang pembangunan daerah dibidang koperasi UKM perindustrian dan perdagangan dengan membangun beberapa sistem informasi.

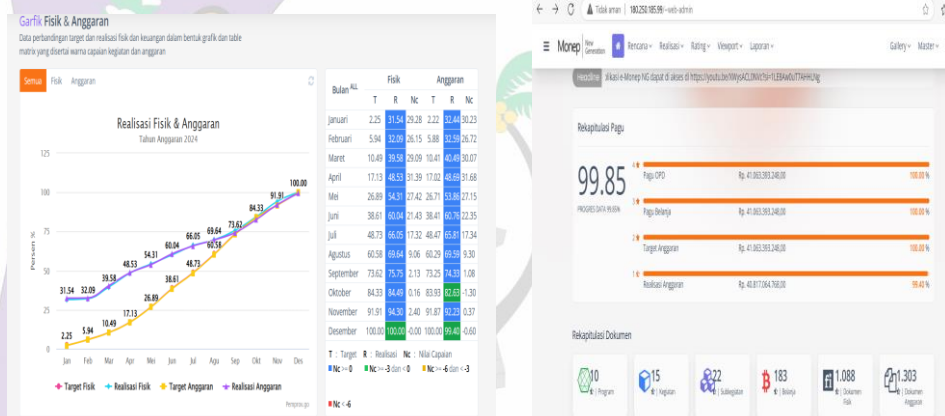
Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebagai pelaksana pembangunan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku

kepentingan, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo membangun beberapa sistem informasi.

1. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi (E-Monev NG)

Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan berisi Monev APBD, dengan alamat akses <https://e-monev.gorontaloprov.go.id>. atau <http://180.250.185.99/> Sistem Informasi Monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap OPD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel;



Gambar 2.1. Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Pemda Provinsi Gorontalo

Aplikasi e-monev bagi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo digunakan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas-Mu pembangunan dibidang koperasi UKM perindustrian dan perdagangan untuk mewujudkan akuntabilitas pembangunan dan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan

Tidak aman | 180.250.180.99 | web-admin/viewport/suborganisasi

Monev

New Generation

Rencana | Realisasi | Rating | **Viewport** | Laporan

Gallery | Master | 2024 F

ketik disini...

Kode : 2.17.1.1

Organisasi : DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Suborganisasi : 2.17.1.1 DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Akumulatif Realisasi Bulanan

Data	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Ok	Nov	Des
Target Fisik	2,25	5,94	10,49	17,13	26,09	38,61	48,73	60,58	73,62	84,33	91,91	100,00
Realisasi Fisik	31,54	32,98	39,38	48,53	54,91	60,04	66,05	69,64	76,25	84,48	94,38	100,00
Target Anggaran	2,22	5,88	10,41	17,02	25,71	38,49	48,47	60,29	73,25	83,93	91,87	100,00
Realisasi Anggaran	32,44	32,59	40,49	48,69	53,86	60,76	65,81	69,59	74,31	82,63	92,23	99,40

Buat data kedalam file ke-Excel klik Export

Rekapitulasi Anggaran

Data	Target	Realisasi	Sisa	%
Paga Belanja	41.063.393.248,00	40.817.064.768,00	246.328.480,00	99,40
Volume Fisik	41.063.393.248,00	41.062.889.248,00	504.000,00	100,00
Fiskal	41.063.393.248,00	41.062.889.248,00	504.000,00	100,00
Anggaran	41.063.393.248,00	40.817.064.768,00	246.328.480,00	99,40

Buka Subdata >

1 / 1

1 / 1

Pemerintah Provinsi Gorontalo, Versi: v0.8

2.17.1.1 DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2. APLIKASI SIKP

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yaitu Sistem yang digunakan untuk menampung data penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berupa data calon debitur, akad kredit (debitur), dan transaksi pembayaran/ angsuran KUR yang bisa di akses Pemerintah Daerah dan Pihak lain yang ditentukan oleh Komite Kebijakan. Dinas/ pemerintah daerah bisa mengunggah data calon debitur Dan sebagai acuan kebijakan terkait pemberdayaan UMKM

The screenshot shows the 'SIKP' (Sistem Informasi Kredit Program) application interface. It displays a list of loan recipients and their details. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Operator Pemros', 'Beranda', 'Input', 'Pencarian', 'Monitoring', 'Laporan', 'Penyaluran KUR', 'Dokumentasi', and 'Referensi'. The main content area shows a table of loan recipients with columns for No, Kode Pemda, Nama Pemda, Jumlah Calon Debitur, Total Rencana Kredit, Jumlah Debitur, and Total Nilai Akad.

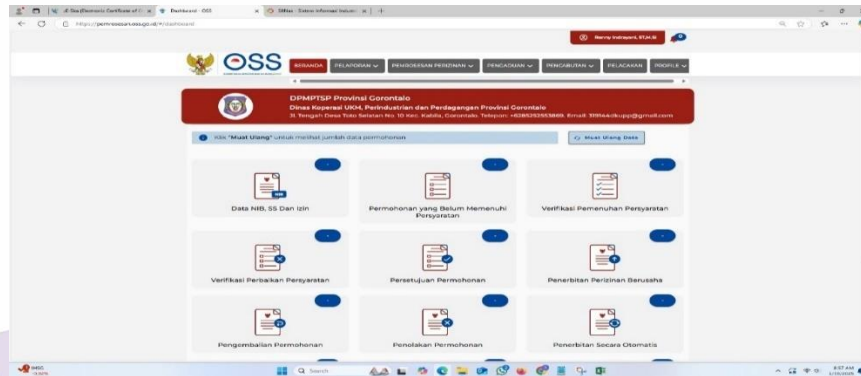
No	Kode Pemda	Nama Pemda	Jumlah Calon Debitur	Total Rencana Kredit	Jumlah Debitur	Total Nilai Akad
1	7501	Kab. Gorontalo	115	953.000.000	0	0
2	7502	Kab. Boalemo	3.062	10.000.015	694	17.679.345.000
3	7503	Kab. Bonebolango	1.931	9.920.000.000	389	7.589.600.000
4	7504	Kab. Pohuwato	101	1.000.000	44	736.000.000
5	7505	Kab. Gorontalo Utara	43	10.000.000	12	141.000.000
6	7511	Kota Gorontalo	1.582	23.561.500.000	465	6.973.000.000
Total			8.937	30.478.000.015	1.804	38.116.948.000

Gambar 2.2. Aplikasi SIKP

3. Online Data System (ODS)

Online Data Sistem (ODS) Koperasi adalah sistem aplikasi pendataan Koperasi yang dapat diakses secara online oleh para pihak yang berkepentingan yang ada pada SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi KUKM diselenggarakan oleh Bagian Data Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Aplikasi ODS ini telah digunakan sejak tahun 2010 untuk mendukung data agregat. Data ODS Koperasi secara individu meliputi data sebagai berikut :Nama Koperasi, b. Nomor & Tanggal Badan Hukum, Alamat tempat kedudukan, Identitas Koperasi (Jenis & Kelompok), Sektor usaha koperasi, Data Kepengurusan,

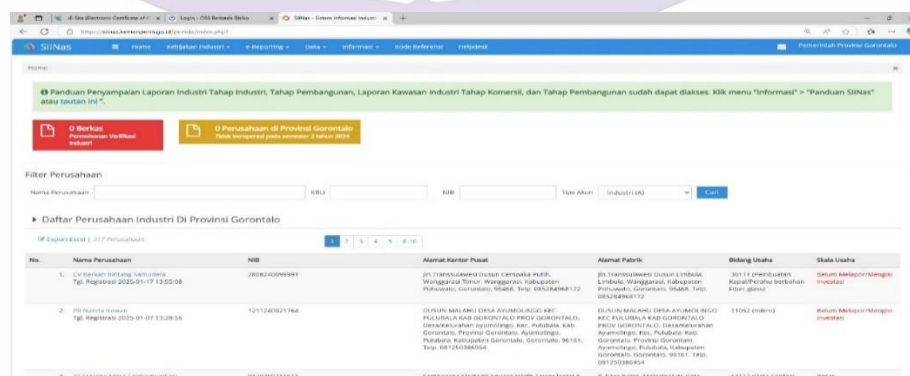
data Peningkatan & Kesehatan Koperasi, Data Indikator Keuangan, Data Indikator kelembagaan.



Gambar 2.3. Online Data System (ODS)

4. Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) merupakan sistem informasi terpadu yang berisi data dan informasi tentang industri nasional. Ruang lingkup SIINas meliputi proses pengumpulan data, pengolahan, hingga penyajian informasi, dalam rangka untuk menerapkan kebijakan pengembangan industri yang baik dan efektif yang didukung data yang valid dan up to date. Up dating data pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) wajib dilakukan oleh masing-masing industri. Data ke SIINas, yang berisi antara lain: kapasitas terpasang, mesin yang digunakan, kebutuhan bahan baku, penggunaan energi, penggunaan air baku, pengolahan limbah dan sebagainya.



Gambar 2.4. Aplikasi SIINas

Untuk mendapatkan Akun, perusahaan harus melakukan :

registrasi di Website SIINas yang beralamat siinas.kemenperin.go.id proses ini hanya dilakukan satu kali saja. Secara garis besar proses pendaftaran akun terbagi atas empat tahap, sebagai berikut:

1. Melakukan registrasi secara online melalui website SIINas
2. Menyiapkan dokumen asli
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - b. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Tetap (bagi perusahaan industri);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (jika ada),
 - d. Tanda Daftar Perusahaan,
 - e. Angka Pengenal Importir Produsen/Umum (jika ada).
 - f. Surat Kuasa dari perusahaan yang dibubuhi materai.

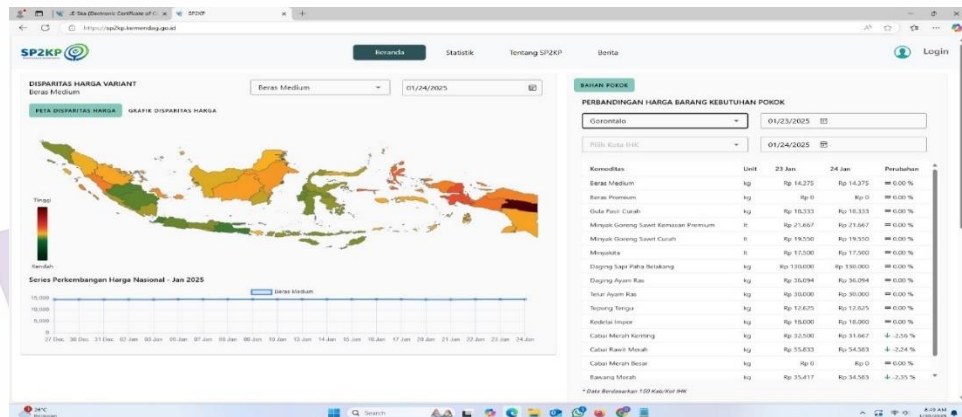
3. Membawa dokumen asli untuk di validasi pada unit pelayanan public

5. Aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (Sp2kp)

merupakan website pusat informasi mengenai harga pangan yang digagas oleh Kementerian Perdagangan. Mengacu pada UU No. 7/2014 tentang Perdagangan dan Perpres No. 71/2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting), Kementerian Perdagangan (Kemendag) diberi tugas dan wewenang untuk menjaga stabilitas harga serta kecukupan ketersediaan bapokting di masyarakat, dalam mendukung pengendalian inflasi, khususnya melalui pengendalian inflasi pangan. Kemendag bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan serta pelaporan data harga dan stok/pasokan bapokting secara harian melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Aplikasi Pemantauan Pasar Komoditas Bahan Pokok adalah sebuah bukti akan keseriusan pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan untuk mengontrol dan mengawasi pergerakan arus perdagangan komoditas strategis di seluruh Indonesia, Karena dengan adanya Aplikasi Pemantauan Pasar Komoditas Bahan Pokok ini diharapkan dapat terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan yang akan mempertajam dan memperjelas indikasi-indikasi sistem perdagangan dan arus lalu-lintas

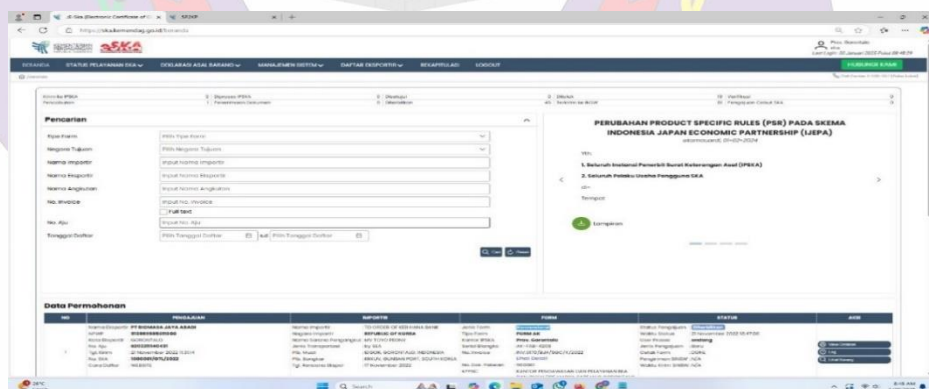
komoditas, selain itu dengan tersedianya data harga yang lengkap, kontinyu dan mutakhir, pada Aplikasi ini akan memungkinkan pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan, untuk menjadi lebih tanggap terhadap indikasi-indikasi.



Gambar 2.5. Aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (Sp2kp)

6. E-SKA (Elektronik Surat Keterangan Asal)

Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO) adalah merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengekspor.

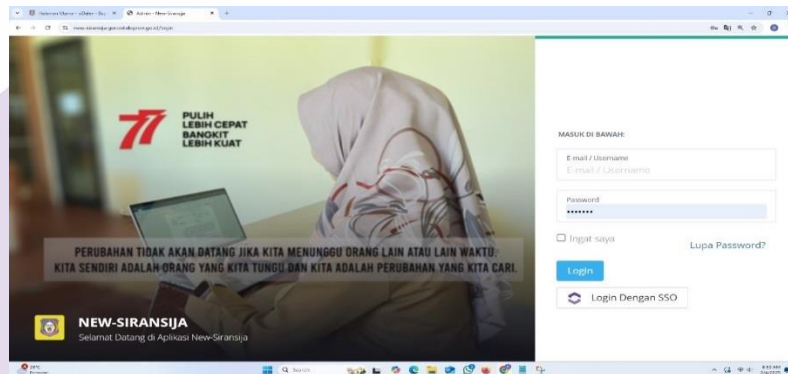


Gambar 2.6. E-SKA (Elektronik Surat Keterangan Asal)

7. Aplikasi New Siransija

Aplikasi ini merupakan sistem yang dibuat untuk menilai kinerja setiap ASN di Provinsi Gorontalo. Beberapa kinerja ASN yang dinilai dalam aplikasi ini adalah:

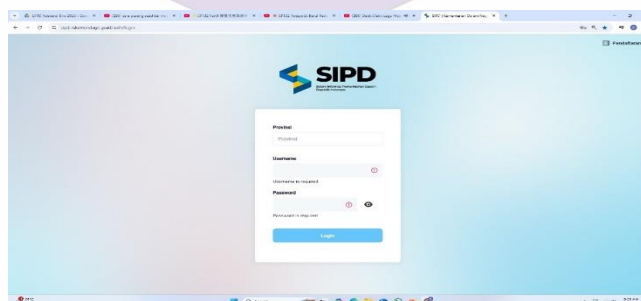
- Kehadiran (Disiplin) pegawai
- Pelaporan Pajak
- Integritas
- Etos Kerja
- Gotong Royong
- Sasaran kinerja pegawai tahunan, bulanan, hingga aktifitas harian
- Penilaian perilaku kerja bawahan oleh atasan masing-masing



Gambar 2.7. Aplikasi New Siransija (<https://new-siransija.gorontalooprov.go.id/login>)

8. Aplikasi SIPD

SIPD merupakan aplikasi sistem informasi perintah daerah yang dibangun oleh kementerian dalam negeri untuk melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan penganggaran dan pelaksanaan penatausahaan keuangan pada satu sistem. Sistem ini wajib digunakan oleh semua pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kab/kota. Melalui aplikasi ini proses perencanaan dan penganggaran sudah dalam satu sistem tidak lagi terpisah pisah. Aplikasi ini digunakan mulai dari tahapan penyusunan RENSTRA, RENJA sampai proses penatausahaan keuangan.



Gambar 2.8. Aplikasi SIPD (<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/auth/login>)

9. Aplikasi siDalev

Aplikasi siDalev merupakan aplikasi yang digunakan untuk evaluasi terhadap rencana kerja secara berkala pada semua dinas yang ada dilingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Evaluasi yang dimuat dalam aplikasi ini adalah evaluasi terhadap output Program, Kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja Program, Kegiatan, Subkegiatan.



Gambar 2.9. Aplikasi siDalev (<https://sidalev.gorontaloprov.go.id/auth>)

A. Capaian Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo melaksanakan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang disusun sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo diukur dengan membandingkan pencapaian indikator kinerja dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024. Perjanjian Kinerja yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2024 adalah Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo setelah reviu oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan, selanjutnya dari hasil pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti tertera pada Tabel berikut :

Tabel 3.1. Skala Penilaian Capaian Kinerja

No	KARITERIA	INTERVAL REALISASI (%)	KODE
1	Sangat Baik	91 (= 100	Hijau Tua
2	Tinggi	76 (= 90	Hijau Muda
3	Sedang	66 (= 75	Kuning Tua
4	Rendah	51 (= 65	Kuning Muda
5	Sangat Rendah	(= 50	Merah

Dengan melihat persentase capaian kinerja yang dikelompokkan berdasarkan skala ordinal diatas, analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

a. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo

Pengukuran target kinerja dari tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan peran sektor koperasi UKM industri dan perdagangan dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
1	Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,42	3,98	61,99	
		Inflasi (%)	1,93	2,87	148,70	

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki 2 (dua) indikator tujuan strategis yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2024, indikator tujuan strategis tersebut terdiri atas:

- Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi provinsi Gorontalo tahun 2024 tumbuh 3,98% namun **belum mencapai target** yang ditetapkan sebesar 6,42%.

- Inflasi

Inflasi Provinsi Gorontalo **meningkat** 2,87% dari target yang ditetapkan 1,93% yang ditetapkan sebesar 1,93%

b. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Capaian realisasi indikator kinerja atas sasaran strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 3.3. Tingkat Pencapaian sasaran Strategis Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP	74,68	79,46	106,40	
2	Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)	Jumlah Koperasi Berkualitas (koperasi)	20	20	100	
		Jumlah UKM yang berdaya saing (UKM)	70	43	61,43	
	Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah (%)	0,84	0,38	45,24	
	Meningkatnya nilai ekspor (USD)	Jumlah Nilai Ekspor (USD)	14.807.701	\$52.967.332,45	357,70	

Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo memiliki 5 (lima) indikator sasaran strategis yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis Provinsi Gorontalo.

❖ Nilai Sakip

Capaian realisasi indikator kinerja "Nilai Sakip" Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebesar 79,46. Capaian ini jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 74,68 telah melebihi target atau capaian nilai realisasi tahun 2024 adalah sebesar 106,40%.

❖ Jumlah koperasi Berkualitas

Capaian realisasi indikator kinerja "Jumlah koperasi Berkualitas" Dinas Kumperindag 20 koperasi dan telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 20 koperasi.

Capaian indikator koperasi berkualitas berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi yang meliputi 4 (empat) aspek yaitu aspek tata kelola, aspek kinerja keuangan, aspek profil risiko dan aspek permodalan.

❖ Jumlah UKM yang Berdaya Saing

capaian realisasi indikator kinerja "jumlah UKM yang Berdaya saing" 43 UKM. Capaian ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebanyak 70 UKM. Ketidakcapaian atas target ini disebabkan kurang optimalnya anggaran untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan fasilitasi terhadap UKM yang berpotensi. capaian atas realisasi ini diperoleh dari UKM yang telah mengikuti kurasi produk yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan Bank Indonesia. Indikator UKM yang berdaya saing antara lain adanya peningkatan produktifitas, peningkatan pangsa pasar serta pertumbuhan output

❖ Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah (%)

Capaian realisasi indikator kinerja "Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah" tidak mecapai target yang ditetapkan sebanyak 0,84%, yaitu realisasi 0,38%. Indikator kinerja urusan industri "Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah " Tahun 2024 diperoleh dari :

$$\frac{(\text{Jumlah industri tahun } n - \text{jumlah industri thn } n-1)}{(\text{Jumlah Industri Tahun } n-1)} \times 100\%$$

Dimana :

Jumlah industri tahun 2024 = 13.260 IKM

Jumlah industri tahun 2023 = 13.210 IKM

- Jumlah IKM 2023 berdasarkan data SIIDIG per 18 Januari 2023 sejumlah 10.039 IKM (tercantum pada LKPJ 2023). Hasil updating per Januari 2024 sejumlah 13.210.
- Jumlah industri tahun 2024 diperoleh dari data penumbuhan wirausaha baru ditahun 2024 yang dibiayai melalui dana Dekon karena terbatasnya anggaran untuk penumbuhan wirausaha baru melalui APBD 2024

❖ Jumlah Nilai Ekspor

Di tahun 2024 capaian realisasi indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar \$52.967.332,45 dari target yang ditetapkan sebesar \$14.807.701.

Jumlah Nilai Eksport Tahun 2024 berjumlah \$52.967.332,45 data ini diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Asal dan BPS Provinsi Gorontalo.

Komoditi Export 2024 yaitu molases, wood pelet, santan beku, minyak mentah, kelapa parut, jagung, ikan, kepiting

2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Yang Lalu

a. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita serta pertumbuhan export dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Lalu

Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian		
		2022	2023	2024
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	4,04		
	Laju Inflasi (%)	5,15		
Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi		4,5	3,98
	Laju Inflasi (%)		3,88	2,87

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian). Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan aspek strategis makro ekonomi yang perlu menjadi perhatian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan.

- Untuk Indikator Pertumbuhan Ekonomi, ditahun 2024 capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 21,90% dibanding tahun 2023. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 mengalami kenaikan sebesar 11,56% dan sebesar 86,22% terhadap tahun 2021.
- Capaian Laju Inflasi ditahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 44,25%.

Adapun capaian inflasi tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu mengalami penurunan yaitu dibandingkan tahun 2022 sebesar 89,61%, tahun 2021 sebesar 78,76%

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah, maka didukung pula oleh tujuan strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Meningkatkan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja Dan Daya Saing Perekonomian.

b. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Adapun sasaran pemerintah daerah yang menjadi tujuan strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yaitu meningkatnya tata Kelola pemerintahan, meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian daerah. Dari tujuan strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tersebut maka untuk pencapaian sasaran strategis didukung oleh capaian 5 (enam) indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo. Capaian dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Lalu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian		
		2022	2023	2024
Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	34,38 %		
Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas	Rata-Rata UKM Naik Kelas	66		
Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Jumlah Penumbuhan IKM	212		
Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri	Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat	0,19 %		
Meningkatnya Perlindungan Konsumen & Pengawasan Perdagangan	Persentase Barang Beredar Sesuai Ketentuan	100 %		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian		
		2022	2023	2024
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP		78,41	79,46
Meningkatnya Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)	Jumlah Koperasi Berkualitas		22 Koperasi	20 Koperasi
	Jumlah UKM yang berdaya saing		50 UKM	43 UKM
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah		-36,34	0,38
Meningkatnya Nilai Ekspor (USD)	Jumlah Nilai Ekspor		\$ 37.959.205	\$ 52.967.332,45

Untuk sasaran strategis dinas Kumperindag tahun 2023 mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.). Kemudian untuk tahun 2022 mengacu pada renstra revisi berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

Indikator kinerja tahun 2023 merupakan indikator baru yang mengacu pada Renstra 2023-2026 sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja ditahun 2022. Berdasarkan tabel tersebut di atas capaian dari 5 (lima) indikator kinerja dari tahun 2023 sebagai berikut :

a. Nilai Sakib

Capaian realisasi indikator kinerja "nilai sakib" tahun 2024 sebesar 79,46%, capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi

indikator kinerja tahun sebelumnya 78,4 **meningkat sebesar 1,36%**. Untuk indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026) sehingga hanya dapat dibandingkan dengan tahun awal Renstra 2023.

b. Jumlah Koperasi Berkualitas

Capaian indikator kinerja "jumlah koperasi berkualitas" adalah sebesar 20 koperasi. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi koperasi berkualitas di tahun 2023 yaitu **turun sebesar 9,1%**. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026) sehingga hanya dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2023.

c. Jumlah UKM yang Berdaya Saing

Capaian indikator kinerja "Jumlah UKM yang Berdaya Saing" tahun 2024 sebesar 43 UKM. Mengalami penurunan 14% dibandingkan dengan tahun 2023 dengan capaian 50 UKM. Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk melakukan pembinaan, pelatihan dan pendampingan secara intens kepada para pelaku UKM yang potensial dan UKM yang berdaya saing ini diperoleh dari hasil kurasi produk UKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dan bank Indonesia. Dengan indikator penilaian dari produktifitas produksinya, peningkatan pangsa pasar dan pertumbuhan output.

Untuk indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026

(berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026) sehingga hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2023 sebagai tahun awal Renstra.

d. Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah

Capaian realisasi indikator kinerja Persentase “Peningkatan Industri Kecil Menengah” tahun 2024 sebesar 0,38%. Indikator ini mengalami kenaikan sebesar 101,05% dibandingkan dengan capaian 2023. Untuk indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026) sehingga hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2023.

e. Jumlah Nilai Ekspor

Capaian realisasi indikator kinerja “Jumlah Nilai Ekspor” tahun 2024 sebesar \$ 52.967.332,45. Indikator kinerja ini mengalami kenaikan 39,54% dibanding tahun 2023 dengan jumlah nilai export sebesar \$ 37.959.205.

Untuk indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mengacu pada indikator kinerja sasaran strategis pada Renstra 2023-2026 (berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026) sehingga hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2023.



Gambar 3.1 Grafik capaian realisasi Jumlah Nilai Ekspor 2 tahun terakhir

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

a. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari beberapa indikator kinerja dibandingkan dengan target RPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen RPD

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target RPD	Realisasi sampai dengan Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	6,42	3,98	61,99	
	Laju Inflasi (%)	1,93	2,87	148,7	

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa untuk capaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

a). Pertumbuhan Ekonomi

Capaian realisasi indikator kinerja "Pertumbuhan Ekonomi" ditahun 2024 **tidak mencapai target RPD 2024** sebesar 6,42%. Capaian kinerja mengalami

penurunan sebesar 61,31% persentase capaian terhadap target RPD adalah sebesar 61,99%

b). Laju Inflasi

Capaian realisasi indikator kinerja "laju inflasi" ditahun 2024 **meningkat** sebesar 32,75%.

b. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Lebih lanjut untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Kumperindag maka didukung juga oleh capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yaitu 5 (lima) indikator kinerja yang akan dibandingkan dengan target Renstra. Hal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
					/Kode
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	74,68	79,46	106,40	
Meningkatnya kapasitas Koperasi	Jumlah Koperasi Berkualitas	20	20	100	
Usaha Kecil Menengah (Jumlah)	Jumlah UKM yang berdaya saing	70	43	61,43	
Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	0,84%	0,38%	45,24	
Meningkatnya nilai ekspor (USD)	Jumlah Nilai Ekspor	\$14.807.701	\$52.967.332,45	357,70	

Dari tabel tersebut di atas capaian dari 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut adalah :

a. Nilai Sakib

Capaian indikator sasaran strategis di tahun 2024 jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2023-2026 telah **melampaui target** yang ditetapkan sebesar 6,4%. Dari target 79,68% dan realisasi 79,46%.

b. Jumlah Koperasi Berkualitas

Capaian indikator kinerja jumlah koperasi berkualitas jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2023-2026 telah **mencapai target** 100 yaitu target 20 koperasi dan realisasi 20 koperasi. Dimana untuk koperasi berkualitas berdasarkan pemeringkatan. Aspek pemeringkatannya yaitu kelembagaan, usaha, keuangan, manfaat koperasi terhadap anggota, manfaat koperasi terhadap masyarakat. Dengan hasil pemerimngkatan sangat berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas dan tidak berkualitas

c. Jumlah UKM yang Berdaya Saing

Capaian indikator kinerja Jumlah UKM yang Berdaya Saing jika dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra 2023-2026 **tidak mencapai target** yang ditetapkan. Dimana capaian hanya sebesar 61,43% dari target 70 ukm dan realisasi 43 ukm.

Dengan indikator penilaian dari produktifitas produksinya, peningkatan pangsa pasar dan pertumbuhan output.

d. Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah

Capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah jika dibandingkan dengan target Renstra 2023-2026 **tidak mencapai target** yang ditetapkan. Dimana capaiannya hanya sebesar 45,24% dari target yang ditetapkan 0,84% dan realisasi 0,38%

Jumlah Nilai Ekspor

e. Capaian indikator kinerja Jumlah Nilai Ekspor jika dibandingkan dengan dokumen renstra 2023-2026 telah **melampaui target** yang ditetapkan dengan capaian sebesar 357,70%. Dari target yang ditetapkan sebesar \$ 14.807.701 dan realisasi \$52967332,45.

data ini diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Asal dan BPS Provinsi Gorontalo. Adapun Komoditi Export 2024 yaitu molases, wood pelet, santan beku, minyak mentah, kelapa parut, jagung, ikan, kepiting

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Standar Nasional

1). Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo

Capaian kinerja tujuan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dari indikator kinerja pertumbuhan ekonomi dan indicator kinerja lainnya dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria/ Kode
1	Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	3,98	79,13	
		Inflasi (%)	1,57	2,87	182,81	

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa untuk capaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Capaian dari indicator kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2024 sebesar 79,13% dengan kriteria tinggi.

Ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2024 mampu tumbuh sebesar 4,95% (yoy), 1,5% (qtq), atau sebesar 5,03% (ctc) ditengah masih tingginya ketidakpastian dan berbagai tantangan global yang masih membayangi, seperti fragmentasi geoekonomi, ketegangan geopolitik, hingga proyeksi ekonomi global yang tumbuh 3,2% pada 2024 dan 2025, dimana masih di bawah rata-rata historis.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh wilayah, meski ada pelambatan di beberapa wilayah seperti Sumatera, Sulawesi, dan Maluku-Papua. Wilayah Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan wilayah lainnya.

"Pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga semakin berkualitas. Terkait dengan angka jumlah penduduk yang bekerja bertambah 4,79 juta, menjadi 144,64 juta orang dibandingkan Agustus tahun 2023. Sementara pengangguran pun berkurang 0,39 juta orang atau 390 ribu. Menjadi 7,47 juta orang

b. Laju Inflasi

Capaian dari indikator kinerja laju inflasi Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 2024 ini capaian kinerjanya sebesar 182,81% dengan kriteria sangat baik.

Pemerintah dan Bank Indonesia berhasil mencapai sasaran inflasi tahun 2024 sebesar 1,57% (yoy) terjaga dalam rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$.

Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,57 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,18 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,60 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,08 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,69 persen; kelompok transportasi sebesar 0,92 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,55 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,94 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,25 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,25 persen.

2) Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Lebih lanjut untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Kumperindag maka didukung oleh capaian kinerja sasaran strategis Dinas

Kumperindag Provinsi Gorontalo dari 5 (lima) indikator kinerja. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu realisasi kinerja sasaran strategis jika dibandingkan dengan standar nasional.

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional (%)	Capaian (%)	Kriteria /Kode
Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan	Nilai SAKIP	79,46 (BB)	>90-100 AA	BB	
Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah(Jumlah), Meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase), dan meningkatnya nilai ekspor (USD)	Jumlah Koperasi Berkualitas	20	-	-	
	Jumlah UKM yang berdaya saing	43	-	-	
	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	0,38	-	-	
	Jumlah Nilai Ekspor	\$ 52.967.332,45	\$24,01M		

a. Nilai Sakib

Capaian Nilai Sakip Dinas Koperasi Provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah sebesar 79,46 capaian ini jika dibandingkan dengan standar nasional termasuk pada Predikat nilai BB dengan nilai Sangat Baik. Dengan interpretasi bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan

anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

b. Jumlah Koperasi Berkualitas

Jumlah koperasi berkualitas tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional. Adapun indikator kinerja Kementerian KUKM adalah jumlah koperasi model baru dan modern dengan target 2024 sebanyak 400 unit koperasi.

c. Jumlah UKM yang Berdaya Saing

Realisasi jumlah UKM yang berdaya saing sebanyak 43 UKM. Tahun 2023 ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena sasaran strategis Kemenkop 2020-2024 adalah persentase UKM naik kelas dengan target 0,5% di 2024.

Dengan indikator penilaian untuk UKM yang berdaya saing yaitu dari sisi produktifitas produksinya, peningkatan pangsa pasar dan pertumbuhan output.

d. Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional

e. Jumlah Nilai Ekspor

Capaian indikator kinerja Jumlah Nilai Ekspor sebanyak \$ 52.967.332,45.

Ekspor Indonesia pada November 2024 tercatat sebesar USD24,01 miliar, meningkat sebesar 9,14% (yoy) yang didorong oleh kenaikan ekspor nonmigas maupun ekspor migas.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi provinsi Gorontalo tahun 2024 tumbuh 3,98% namun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 6,42%.

Perekonomian Gorontalo triwulan III-2024 dibanding triwulan III-2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 3,98 persen.

Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor merupakan kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 8,61 persen, diikuti pertambangan dan penggalian sebesar 8,50 persen, serta konstruksi sebesar 6,81 persen.

Solusi yang dilakukan pemerintah daerah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi agar dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu antara lain hilirisasi di sektor pertanian untuk menciptakan nilai tambah di sektor pertanian agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Gorontalo. Solusi lainnya meningkatkan nilai investasi yaitu mendukung dan mempercepat setiap investasi yang akan masuk, mendorong kewirausahaan melalui KUR.

b. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan indikator kinerja Laju Inflasi

Inflasi Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan 2,87% dari target yang ditetapkan 1,93%.

Inflasi Provinsi Gorontalo dalam dua bulan terakhir terbilang tinggi yakni 4,4 persen pada Januari 2024 dan 3,73 persen pada Februari 2024 disebabkan bertambahnya indikator obyek Indeks Harga Konsumen (IHK) jika dibandingkan tahun 2023. Jika sebelumnya inflasi Provinsi Gorontalo hanya dihitung berdasarkan IHK Kota Gorontalo, maka tahun 2024 bertambah satu daerah lagi yakni IHK Kabupaten Gorontalo. laju inflasi di Gorontalo bulan Februari 2024 dipengaruhi dari kelompok makanan, minuman dan tembakau pada komoditas beras, daun bawang, daging ayam ras, minyak goreng dan kue basah

Adapun beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menekan inflasi yaitu antara lain terus memantau pelaksanaan program pada tiap OPD dan instansi terkait lainnya. Sebagai contoh,

Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Bulog Gorontalo gencar menyalurkan beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan). Pelaksanaan operasi pasar oleh Dinas Kumperindag dengan mengintervensi harga beras kepada pedagang beras di pasar tradisional Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Adanya komitmen dari pemerintah daerah yang terlihat dari intensitas kehadiran pejabat Gubernur dalam setiap High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai respon terhadap situasi inflasi yang meningkat serta upaya pelaksanaan operasi pasar murah khususnya untuk komoditi cabai, bawang merah, minyak goreng, beras serta komoditi lainnya (sesuai juknis) yang menjadi penyumbang utama inflasi. TPID Provinsi Gorontalo juga intens mengkampanyekan belanja bijak kepada masyarakat. Yang bertujuan agar masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan dan imbauan agar pedagang tidak menaikkan harga barang terlebih menjelang natal dan tahun baru. Upaya ini diharapkan dapat meredakan tekanan inflasi dan memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga bahan pokok di Gorontalo

c. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator kinerja Nilai SAKIP

Capaian realisasi indikator kinerja "Nilai Sakip" Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebesar 79,46. Capaian ini jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 74,68 telah melebihi target atau capaian nilai realisasi tahun 2024 adalah sebesar 106,40%.

SAKIP adalah alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, semakin tinggi pula efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga berdampak pada ketercapaian target sasaran pembangunan nasional dan penyelesaian isu-isu strategis daerah

Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan kickoff perbaikan SAKIP dengan menghadirkan seluruh pimpinan OPD, melakukan identifikasi OPD yang mendukung enam program unggulan provinsi, menyempurnakan rumusan indikator kinerja utama pada level OPD, menyusun pedoman akuntabilitas

kinerja, memperbaiki laporan kinerja, meningkatkan kapasitas evaluator internal SAKIP serta mendorong komitmen pimpinan yang akan menjadi penentu keberhasilan SAKIP.

d. Meningkatnya Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)

Capaian realisasi indikator kinerja “Jumlah koperasi Berkualitas” Dinas Kumperindag 20 koperasi dan telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 20 koperasi.

Target ini diharapkan dapat terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan perkoperasian yang diberikan secara berkala kepada setiap koperasi yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo. Pembinaan Koperasi lebih menitik beratkan kepada koperasi yang telah memperoleh Penguatan Modal di tahun sebelumnya, sehingga pemanfaatan sesuai peruntukannya dan pencatatannya sesuai sehingga dapat dipertanggungjawabkan Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong bertambahnya koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Ke depan semakin banyak Koperasi yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) serta mengurus Ijin Usaha Koperasi sesuai usaha atau KBLI (klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia) yang ada di anggaran dasar koperasi sebagai salah satu legalitas usaha, serta Mendorong transformasi koperasi modern di Gorontalo.

e. Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah) dengan indikator kinerja Jumlah UKM yang berdaya saing

Realisasi capaian indikator kinerja “jumlah UKM yang Berdaya saing” tidak mencapai target yang diharapkan. Dimana tingkat capaian hanya sebesar 61,43% dengan realisasi 43 UKM dari target 70 UKM.

UKM yang berdaya saing dapat dilihat dari sisi produktifitas produksinya, peningkatan pangsa pasar dan pertumbuhan output.

Adapun upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan jumlah UKM yang berdaya saing antara lain :

- mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada UKM melalui coaching clinic dan mentoring bagi UMKM;
- stimulan bagi UMKM sesuai juknis yang berlaku
- Peningkatan SDM bagi pelaku UMKM melalui E-commerce, marketplace.
- Peningkatan kualitas dan kontinuitas UMKM melalui kegiatan advokasi/Bimtek/Workshop.
- Perluasan akses kemitraan dengan berbagai lembaga yg membina UMKM

f. Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase) dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah

Capaian realisasi indikator kinerja "Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah" tidak mencapai target yang ditetapkan sebanyak 0,84%, yaitu realisasi 0,38%. Indikator kinerja urusan industri "Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah" Tahun 2024 diperoleh dari :

$(\text{Jumlah industri tahun } n - \text{jumlah industri thn } n-1)$

$(\text{Jumlah Industri Tahun } n-1) \times 100\%$

Dimana :

Jumlah industri tahun 2024 = 13.260 IKM

Jumlah industri tahun 2023 = 13.210 IKM

Jumlah industri tahun 2024 diperoleh dari data penumbuhan wirausaha baru ditahun 2024 yang dibiayai melalui dana Dekon karena terbatasnya anggaran untuk penumbuhan wirausaha baru melalui APBD 2024

Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam Meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil Menengah yaitu :

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku IKM melalui program peningkatan sumber daya manusia IKM, pelatihan dan pendampingan agar para pelaku IKM dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produk, bimtek peningkatan mutu produk, sertifikasi halal, PIRT serta stimulan bantuan bagi IKM

- memperluas jaringan pemasaran (peningkatan akses promosi) antara lain melalui pengembangan kemitraan IKM dengan industri besar lainnya ;
- Kemudahan mengakses pembiayaan untuk menambah modal usaha para pelaku IKM
- pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas melalui pemanfaatan potensi bahan baku lokal

g. Meningkatnya nilai ekspor (USD) dengan indikator kinerja Jumlah Nilai Ekspor.

Di tahun 2024 capaian realisasi indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar \$52.967.332,45 dari target yang ditetapkan sebesar \$14.807.701,-

Jumlah Nilai Eksport Tahun 2024 berjumlah \$52.967.332,45 ni diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Asal dan BPS Provinsi Gorontalo. Komoditi Export 2024 yaitu molases, wood pelet, santan beku, minyak kelapa mentah, kelapa parut, jagung, ikan, kepiting. Akan tetapi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan ekspor ini tidak tersedia karena keterbatasan fiskal daerah di tahun 2024

Upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan jumlah ekspor yaitu:

- meningkatkan promosi produk-produk lokal agar tingkat permintaan terhadap produk lokal unggulan semakin banyak,
- Pelatihan dan Pengembangan SDM Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal keterampilan dan pengetahuan yang berkaitan dengan perdagangan internasional
- Peningkatan Kualitas Produk guna Memastikan bahwa produk yang diekspor memenuhi standar internasional dan memiliki kualitas yang konsisten
- Dukungan anggaran untuk meningkatkan promosi produk lokal seperti mengikuti pameran dagang (TEI), dan fasilitas produksi berupa pelatihan inovasi produk. Dengan kemudahan tersebut pengusaha bisa menekan harga jualnya sehingga barang yang diproduksi mampu bersaing di pasar internasional

- Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memasarkan produk di luar negeri.
- Kemudahan perizinan dagang sesuai aturan yang berlaku

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumberdaya biaya dan sumberdaya manusia. Pada Tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah **Rp. 40.817.064.768,-** sementara target biaya Dinas Kumperindag tahun 2024 yaitu **Rp. 41.063.393.248,-** atau sebesar **99,40 %**. Dengan demikian capaian tingkat efisiensi sebesar **0,6%**.

Tabel 3.10. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran Induk	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Capaian Output (%)	Capaian Keuangan (%)	Tingkat Efisiensi
				(Rp).			
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP	12.615.353.291	12.388.303.291	12.338.992.758	100	99,60	0,40
Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah),	Jumlah Koperasi Berkualitas	2.398.027.475	2.403.307.475	2.327.200.967	99,98	96,83	3,15
	Jumlah UKM yang berdaya saing	17.525.583.250	16.408.728.250	16.389.516.296	100	99,88	0,12
Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	1.861.808.250	2.143.053.250	2.138.595.744	100	99,79	0,21
Meningkatnya nilai ekspor (USD)	Jumlah Nilai Ekspor	2.920.037.100	7.720.000.982	7.622.759.003	100	99,77	0,23
JUMLAH		37.320.809.366	41.063.393.248	40.817.064.768	100	99,40	0,60

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa efisiensi pemanfaatan sumber daya pada 5 (lima) sasaran strategis dinas rata-rata antara 0,12 sampai dengan 3,15 persen.

a. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator Nilai SAKIP.

Tingkat efisiensi sebesar 0,40%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis dan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dan sumber daya manusia. Mengoptimalkan Aplikasi E-SAKIP yang telah menjadi ujung tombak dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Aplikasi ini tidak hanya sebagai alat untuk penganggaran dan perencanaan, tetapi juga untuk menyelaraskan kinerja organisasi ke kinerja individu

b. Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah) dengan indikator Jumlah Koperasi Berkualitas

Tingkat efisiensi sebesar 3,15%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, dan mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan perkoperasian yang diberikan secara berkala kepada setiap koperasi yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo. Pembinaan Koperasi lebih menitik beratkan kepada koperasi yang telah memperoleh Penguatan Modal di tahun 2024, sehingga pemanfaatan sesuai peruntukannya dan pencatatannya sesuai sehingga dapat dipertanggungjawabkan Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong bertambahnya koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Ke depan semakin banyak Koperasi yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) serta mengurus Ijin Usaha Koperasi sesuai usaha atau KBLI (klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia) yang ada di anggaran dasar koperasi sebagai salah satu legalitas usaha, serta Mendorong transformasi koperasi modern di Gorontalo.

c. Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), dengan indikator Jumlah UKM yang berdaya Saing

Efisiensi anggaran sebesar 0,12 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, Perluasan akses kemitraan dengan berbagai lembaga yang membina UMKM.

mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada UKM melalui coaching clinic dan mentoring bagi UMKM. Pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui stimulan bagi UMKM, Peningkatan kualitas dan kontinuitas UMKM melalui kegiatan advokasi/Bimtek/Workshop, Peningkatan SDM bagi pelaku UMKM melalui E-commerce, marketplace melalui program pelatihan dan pendampingan dengan berbagai marketplace dan mengupayakan kebijakan afirasi penggunaan produk lokal dalam pencapaian target

d. Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase) dengan indikator Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah

Tingkat efisiensi sebesar 0,21%. Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam mengembangkan IKM yaitu melalui pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas, penyerapan tenaga kerja, memanfaatkan potensi bahan baku lokal. Peningkatan mutu produk melalui program peningkatan sumber daya manusia IKM melalui bimtek peningkatan mutu produk, sertifikasi halal, PIRT serta fasilitasi bagi IKM melalui stimulan bantuan bagi IKM (bahan/peralatan, tempat produksi dan fasilitasi listrik).

e. Meningkatnya nilai ekspor (USD) dengan indikator Jumlah Nilai Eksport Tingkat efisiensi sebesar 0,23 %. Upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan jumlah ekspor yaitu :

- Pelatihan dan Pengembangan SDM Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal keterampilan dan pengetahuan yang berkaitan dengan perdagangan internasional
- Peningkatan Kualitas Produk guna Memastikan bahwa produk yang diekspor memenuhi standar internasional dan memiliki kualitas yang konsisten
- Dukungan anggaran untuk meningkatkan promosi produk lokal seperti mengikuti pameran dagang (TEI), dan fasilitas produksi berupa pelatihan inovasi produk. Dengan kemudahan tersebut pengusaha bisa menekan harga jualnya sehingga barang yang diproduksi mampu bersaing di pasar internasional

- Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memasarkan produk di luar negeri.
- Kemudahan perizinan dagang sesuai aturan yang berlaku

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024. Program-program tersebut dilaksanakan oleh pada urusan Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Program-program yang telah diselenggarakan sebagai berikut :

- A. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
Kegiatan :
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- B. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
Kegiatan :
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- C. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
Kegiatan :
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- D. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
- E. Program Pengembangan UMKM
Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
- F. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

G. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

- Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
- Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

H. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan :

- Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

I. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas masing-masing memberikan kontribusi/dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran Tahun 2024.

Adapun output dari program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis I : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Outcome dari program ini adalah Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan.

Pada program ini terdiri atas 4 (lima) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4 dokumen). Pagu awal sub kegiatan ini berjumlah Rp. 84.913.275,- kemudian terdapat revisi sebesar Rp. 186.637.800,- dari beberapa belanja di sub kegiatan penyediaan peralatan & perlengkapan kantor dan sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Sehingga total pagu setelah perubahan sebesar Rp. 271.551.075,- dengan realisasi Rp. 270.838.678.-

Di tahun 2024 telah dihasilkan dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 7 Dokumen perencanaan yaitu Dokumen renja, renstra, RAK, RKA, KAK, RAB, SIRUP

Output dari kegiatan ini adalah :

- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Triwulan II dan triwulan III Bidang Koperasi UMKM Perindustrian & Perdagangan Provinsi Gorontalo di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Boalemo
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah pendampingan pelaksanaan program kegiatan (standar kompetensi, pelayanan prima, pengelolaan ketersediaan barang)

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Output : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (6 laporan).

Pagu awal untuk sub kegiatan ini berjumlah Rp. 129.559.000,- kemudian mendapat tambahan anggaran melalui revisi anggaran sebesar Rp. 77.466.000,- dan pada tahapan APBD-P 2024 senilai Rp. 11.160.000,- sehingga total pagu setelah perubahan berjumlah Rp. 218.185.000,- dengan realisasi sejumlah Rp. 217.920.296,- dan Silva kegiatan berjumlah Rp. 264.704,- dari beberapa belanja yang

tidak dapat dimanfaatkan lagi. Sub kegiatan ini telah mencapai realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan mencapai 99,93%.

Di tahun 2024 telah dihasilkan 8 Dokumen Monitoring dan Evaluasi yaitu Dokumen Rencana Aksi, LKPJ, LPPD, laporan evaluasi renja per triwulan, E-Monev, Lakip, Laporan Tahunan (LAPKIN APBN), laporan tahunan APBD masing-masing bidang

Output dari kegiatan ini adalah :

- Pelaksanaan rapat evaluasi program kegiatan
 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah monev stimulan bantuan bagi UMKM tahun 2023, Monev bantuan hibah koperasi tahun 2024, Monev kinerja BPSK di Provinsi Gorontalo, monev UKM yang berdaya saing, Pendampingan Pelaksanaan Program/Kegiatan (pemberdayaan koperasi, pelaksanaan pasar murah).
- ❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (79 orang/bulan). adapun pagu awal sub kegiatan ini Rp. 10.110.979.666,-. Di tahun 2024 pada tahapan APBD-P 2024 terdapat tambahan TPP bulan Desember Rp. 121.500.000,- dan penyesuaian gaji/TPP (Rp. 507.000.000,-) stotal pada APBD-P sejumlah (Rp. 385.500.000,-). Sehingga pagu akhir Rp. 9.691.630.216,- dengan realisasi Rp. 9.659.965.973,- silva Rp. 31.664.243,- yang terdiri dari sisa gaji pokok PNS, tunjangan keluarga PNS, tunjangan jabatan PNS, Tunjangan beras PNS, tunjangan PPh, pembulatan gaji PNS serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS dan prestasi kerja

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Output Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 laporan capaian 100% dari target)

Pagu anggaran induk sub kegiatan ini Rp. 33.849.450,- kemudian terdapat revisi pada beberapa belanja yang bersesuaian Rp. 27.793.300,-. Sehingga pagu setelah perubahan pada sub kegiatan ini sejumlah Rp. 61.642.750,- dengan realisasi Rp. 61.593.089,- dan silva Rp. 49.661,- dari sisa belanja yang tidak dapat dibelanjakan lagi.

❖ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Indikator output yaitu jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan sebanyak 87 orang. Di Tahun 2024 kegiatan ini tidak mendapatkan porsi anggaran karena keterbatasan fiskal daerah.

❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator output yaitu Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (target 31 paket, capaian 18 paket atau 58% karena keterbatasan anggaran)

Output kegiatan ini adalah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor perawatan berupa penyediaan bahan bakar dan pelumas, suku cadang kendaraan, sewa bangunan Gedung Dekranasa di bandara Jalaluddin, jasa konsultasi perencanaan arsitektur gedung kantor Dinas Kumperindag, pemeliharaan kendaraan dinas bermotor, pemeliharaan alat kantor dan pemeliharaan computer).

Pagu awal sebesar Rp. 553.632.000,- kemudian revisi pada beberapa rekening belanja yang bersesuaian dengan total senilai (115.122.000,-) dan pada tahapan APBD-P sejumlah Rp. 31.000.000,- (belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur gedung kantor Dinas Kumperindag) Sehingga pagu sesudah perubahan menjadi Rp. 469.510.000,-, dengan realisasi Rp. 1.354.542.233,- Silva Rp. 3.866.867,-.

❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 laporan). Pagu anggaran induk untuk sub

kegiatan ini yaitu Rp. 1.736.269.350,-kemudian revisi pada beberapa rekening belanja yang bersesuaian dengan total senilai (Rp. 166.085.100,-) dan pada tahapan APBD-P tambahan anggaran sebesar Rp. 105.600.000,- (belanja jasa tenaga pelayanan umum 21 orangx2 bulan) sehingga pagu setelah perubahan Rp. 1.675.784.250,-,- realisasi keuangan Rp. 1.660.439.932,- silva Rp. 15.344.318,- (capaian fisik 100% dan keuangan 96,71%.

Sasaran Strategis II : Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)

1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel

Jumla anggaran pada program ini tidak mengalami perubahan dari pagu awal sebesar Rp. 77.755.475,- dengan realisasi sebesar Rp. 77.523.325,- adapun total silva sebesar Rp. 232.150,- (sisanya pada item belanja ATK, kertas & cover, bahan cetak, bahan komputer, makan minum rapat dan perjalanan dinas biasa)

Outcome adalah jumlah koperasi sehat sebanyak 20 koperasi dengan capaian 20 koperasi.

Output Kegiatan ini adalah :

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi pada 25 koperasi dan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi 20 Koperasi

Tujuan Pelaksanaan kegiatan :

- Meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Pengawasan Koperasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
- Meningkatkan fungsi Pengawasan Koperasi yang efektif dan efisien, sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi;

- Meningkatkan Kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi dengan peraturan yang berlaku.

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Primer Provinsi Gorontalo dan pengawasan/monev koperasi penerima bantuan/penghargaan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo di Kabupaten/Kota.

- b. Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Koperasi di Provinsi Gorontalo untuk menyatukan persepsi pemahaman tentang Peraturan Perkoperasian dan Pengawasan Koperasi bagi Pembina Koperasi sebanyak 40 orang, dengan menghadirkan Narasumber Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Utama dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- c. Dalam pencapaian kinerja program yaitu jumlah koperasi sehat terdapat 4 (empat) aspek pemeriksaan kesehatan koperasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi No. 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi yaitu aspek tata kelola, aspek kinerja keuangan, aspek profil risiko dan aspek permodalan. Terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat diberikan sertifikat kesehatan. Terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus ditindaklanjuti dengan sanksi administratif. Sertifikat kesehatan atau sanksi administratif ditetapkan oleh deputy/perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan LHPKK.

Adapun capaian Koperasi sehat tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.11.

Daftar Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Primer Provinsi Gorontalo Tahun 2024

N O	NAMA KOPERASI	NO & TGL BADAN HUKUM DAN PAD KOPERASI	JENIS KOPERASI	KET.
1	KOPERASI KONSUMEN PRIMER KESEHATAN DAERAH KKPKD	372/BH/V, Tgl. 26 November 1982 PAD. No.AHU-0002766.AH.01.38.TAHUN 2022 Tgl. 23 Desember 2022	Konsumen	Sehat

N O	NAMA KOPERASI	NO & TGL BADAN HUKUM DAN PAD KOPERASI	JENIS KOPERASI	KET.
2	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WIYOWA	07/BH/518/DTKTK/IV/04, Tgl. 13 April 2004 PAD. No.AHU-0000740.AH.01.39.TAHUN 2024 Tgl. 28 Februari 2024	Konsumen	Sehat
3.	KOPERASI SERBA USAHA KARYA PRASETYA	36/BH/XXII/VII/2015 Tgl. 15 Juli 2015	Konsumen	Sehat
4.	KSP KARYA CIPTA DANA PROVINSI GORONTALO	33/BH/XXII/XII/2014 Tgl. 22 Desember 2014	Simpan Pinjam	Sehat
5.	KSP AL HIKMAT PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	31/BH/XXII/III/2014, Tgl. 21 Maret 2014	Simpan Pinjam	Sehat
6.	KPRI WIRA USAHA BARU	21/BH/XXII/III/2011, Tgl. 18 Maret 2011	Konsumen	Sehat
7.	KOPERASI KONSUMEN PRIMER KARTIKA OTANAHA	1449/BH/V, Tgl. 8 Juni 1971 PAD No.AHU-000142.AH.01.27.TAHUN Tgl. 19 Oktober 2021	Konsumen	Sehat
8.	KSP DHANA PANEN RAYA	AHU-0015444.AH.01.26.TAHUN 2022 Tgl. 9 Pebruari 2022	Simpan Pinjam	Sehat
9.	KOPERASI KONSUMEN AUDITA MITRA SEJAHTERA	AHU-0005599.AH.01.29.TAHUN 2022 Tgl. 22 Oktober 2022	Konsumen	Sehat
10 .	KOP. KONS. KARYAWAN TIRTA BONE PDAM KOTA GORONTALO	250/BH/V, Tgl. 23 Januari 2012 PAD No.AHU-0002276.AH.01.27.TAHUN 2021 Tgl. 11 Mei 2021	Konsumen	Sehat
11 .	KOPERASI KONSUMEN PERMATA SEJAHTERA HULONTHALAGI	AHU-0016261.AH.01.26.TAHUN 2022 Tgl.13 Maret 2022	Konsumen	Sehat
12 .	KOPERASI PRODUSEN	AHU-0004076.AH.01.29.TAHUN 2022 Tgl. 04 Agustus 2022	Produsen	Cukup Sehat

N O	NAMA KOPERASI	NO & TGL BADAN HUKUM DAN PAD KOPERASI	JENIS KOPERASI	KET.
	HUYULA MOMONGU LIPU			
13	KOPERASI KONSUMEN SERBA USAHA TERATAI LIMUTU	1685/BH/V, Tgl. 30 Oktober 1971 PAD No.AHU-0002091.AH.01.38.TAHUN 2023 Tgl. 05 September 2023	Konsumen	Cukup Sehat
14	KOPERASI KONSUMEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	AHU-0014715.AH.01.26.TAHUN 2022 Tgl. 12 Januari 2022	Konsumen	Cukup Sehat
15	KOPERASI KONSUMEN BKPD MAJU BERSAMA	AHU-0001579.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 11 April 2023	Konsumen	Cukup Shat
16	KOPERASI KONSUMEN BATARA BTN GORONTALO	450/BH/V/07, Tgl. 20 April 2007 PAD No.AHU-0002804.AH.01.38.TAHUN 2022 Tgl. 29 Desember 2022	Konsumen	Cukup Sehat
17	KOPERASI KONSUMEN MUSLIMAH AMANAH BERSATU	AHU-0002794.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 14 Juli 2023	Konsumen	Cukup Sehat
18	KOPERASI KONSUMEN SEHAT SEJAHTERA BERSAMA AINUN	AHU-00100002.AH.01.36.TAHUN 2021 Tgl. 27 April 2021	Konsumen	Cukup Sehat
19	KOPERASI KONSUMEN AMPERA MANDIRI SEJAHTERA	AHU-0000422.AH.01.26.TAHUN 2019 Tgl. 19 November 2019	Konsumen	Cukup Sehat
20	KOPERASI JASA NEZFA PANUA BERKAH	AHU-0001073.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 08 Mei 20223	Jasa	Cukup Sehat

Tabel 3.12
Daftar Pengawasan dan Pemeriksaan/Monev Koperasi di Provinsi Gorontalo
Tahun 2024

NO	NAMA KOPERASI	NO & TGL BADAN HUKUM DAN PAD KOPERASI	JENIS KOPERASI	KET.
1	KOPERASI KONSUMEN PRIMER KESEHATAN DAERAH KKPKD	372/BH/V, Tgl. 26 November 1982 PAD. No.AHU-0002766.AH.01.38.TAHUN 2022 Tgl. 23 Desember 2022	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
2	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WIYOWA	07/BH/518/DTKTK/IV/04, Tgl. 13 April 2004 PAD. No.AHU-0000740.AH.01.39.TAHUN 2024 Tgl. 28 Februari 2024	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
3.	KOPERASI SERBA USAHA KARYA PRASETYA	36/BH/XXII/VII/2015 Tgl. 15 Juli 2015	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
4.	KSP KARYA CIPTA DANA PROVINSI GORONTALO	33/BH/XXII/XII/2014 Tgl. 22 Desember 2014	S.Pinjam	Pengawasan dan Pemkes
5.	KSP AL HIKMAT PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	31/BH/XXII/III/2014, Tgl. 21 Maret 2014	S.Pinjam	Pengawasan dan Pemkes
6.	KPRI WIRA USAHA BARU	21/BH/XXII/III/2011, Tgl. 18 Maret 2011	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
7.	KOPERASI KONSUMEN PRIMER KARTIKA OTANAHA	1449/BH/V, Tgl. 8 Juni 1971 PAD No.AHU-000142.AH.01.27 TAHUN Tgl. 19 Oktober 2021	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
8.	KSP DHANA PANEN RAYA	AHU-0015444.AH.01.26.TAHUN 2022 Tgl. 9 Pebruari 2022	S. Pinjam	Pengawasan dan Pemkes
9.	KOPERASI KONSUMEN AUDITA MITRA SEJAHTERA	AHU-0005599.AH.01.29 TAHUN 2022 Tgl. 22 Oktober 2022	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes

NO	NAMA KOPERASI	NO & TGL BADAN HUKUM DAN PAD KOPERASI	JENIS KOPERASI	KET.
10.	KOP. KONS. KARYAWAN TIRTA BONE PDAM KOTA GORONTALO	250/BH/V, Tgl. 23 Januari 2012 PAD No.AHU-0002276.AH.01.27.TAHUN 2021 Tgl. 11 Mei 2021	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
11.	KOPERASI KONSUMEN PERMATA SEJAHTERA HULONTHALAGI	AHU-0016261.AH.01.26.TAHUN 2022 Tgl.13 Maret 2022	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
12.	KOPERASI PRODUSEN HUYULA MOMONGU LIPU	AHU-0004076.AH.01.29.TAHUN 2022 Tgl. 04 Agustus 2022	Produsen	Pengawasan dan Pemkes
13.	KOPERASI KONSUMEN SERBA USAHA TERATAI LIMUTU	1685/BH/V, Tgl. 30 Oktober 1971 PAD No.AHU-0002091.AH.01.38.TAHUN 2023 Tgl. 05 September 2023	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
14.	KOPERASI KONSUMEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	AHU-0014715.AH.01.26.TAHUN 2022 Tgl. 12 Januari 2022	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
15.	KOPERASI KONSUMEN BKPD MAJU BERSAMA	AHU-0001579.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 11 April 2023	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
16.	KOPERASI KONSUMEN BATARA BTN GORONTALO	450/BH/V/07, Tgl. 20 April 2007 PAD No. AHU-0002804.AH.01.38.TAHUN 2022 Tgl. 29 Desember 2022	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
17.	KOPERASI KONSUMEN MUSLIMAH AMANAH BERSATU	AHU-0002794.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 14 Juli 2023	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
18.	KOPERASI KONSUMEN SEHAT SEJAHTERA BERSAMA AINUN	AHU-00100002.AH.01.36.TAHUN 2021 Tgl. 27 April 2021	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
19.	KOPERASI KONSUMEN AMPERA MANDIRI SEJAHTERA	AHU-0000422.AH.01.26.TAHUN 2019 Tgl. 19 November 2019	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
20.	KOPERASI JASA NEZFA PANUA BERKAH	AHU-0001073.AH.01.29.TAHUN 2023	Jasa	Pengawasan dan Pemkes

NO	NAMA KOPERASI	NO & TGL BADAN HUKUM DAN PAD KOPERASI	JENIS KOPERASI	KET.
21.	KOPERASI PEMASARAN TINDAHO BONE BOLANGO	Tgl. 08 Mei 20223 AHU-0011889.AH.01.26.Tahun 2021 Tgl. 3 November 2022	Pemasaran	Pengawasan
22.	KOPERASI KONSUMEN SARIPI ALIYA MANDIRI	AHU-0002144.AH.01.29 TAHUN 2023	Konsumen	Pengawasan
23.	KOPERASI KONSUMEN TANI NUSANTARA MANDIRI	Tgl. 05 Juni 2023 AHU-0012526.AH.01.26.TAHUN 2021	Konsumen	Pengawasan
24.	KOPERASI SIMPAN PINJAM PELITA (Primer Kab.Boalemo)	Tgl. 2 Oktober 2021 1691/BH/V Tgl. 30 Desember 1971	S. Pinjam	Pengawasan/ Monev bantuan
25.	KOPERASI SERBA USAHA TIRTA MALEO (Primer Kab. Pohuwato)	38/BH/VIII/2007 Tgl. 08 Agustus 2007.	Konsumen	Pengawasan/ Monev bantuan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Outcome program ini adalah Jumlah koperasi Jumlah Koperasi Aktif (target 20 Unit usaha, capaian 20 unit usaha).

Pagu awal sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha berjumlah Rp. 670.416.750,- pada tahapan APBD-P terdapat tambahan anggaran sebesar Rp. 5.280.000,- (belanja bahan cetak, makan minum aktivitas lapangan, tambahan honor PTT dan perjalanan dinas biasa). Sehingga pagu setelah perubahan berjumlah Rp. 675.696.750,-. Adapun realisasi hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp. 674.952.700,- Silva kegiatan berjumlah Rp. 744.050,-

(belanja bahan cetak Rp.504.000, sisa perjalanan dinas biasa, belanja makan minum aktivitas lapangan, belanja kertas serta belanja lainnya yang tidak dapat digunakan lagi)

Pelaksanaan Program/ kegiatan ini adalah :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi (Bedah) Koperasi dilaksanakan di Kabupaten /Kota Se-Provinsi Gorontalo sebanyak 9 Koperasi.

NO	NAMA KOPERASI	LOKASI	JENIS KOPERASI
1	KOPERASI KONSUMEN SEHAT SEJAHTERA BERSAMA AINUN	Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo	Konsumen
2	KSU BUHUTA WAWU WAALAMA	Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo	Konsumen
3.	KOPERASI SIMPAN PINJAM FAJAR PESISIR	Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo	S.Pinjam
4.	KOPERASI KONSUMEN AMPERA MANDIRI SEJAHTERA	Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo	Konsumen
5.	KOPERASI SINAR MANDIRI SENSEI	Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato	Jasa
6.	KOPERASI HULAWA TINELO LIPU	Kecamatan Sumalata Timu Kabupaten Gorontalo Utara	Produsen
7.	KOPERASI KONSUMEN PASOLO CERIA BERSAMA	Kecamatan Sumalata Timu Kabupaten Gorontalo Utara	Konsumen
8.	KOPERASI PRODUSEN HULAWA BINA MANDIRI	Kecamatan Sumalata Timu Kabupaten Gorontalo Utara	Produsen
9.	KOPERASI KONSUMEN PASOLO INDAH JAYA	Kecamatan Sumalata Timu Kabupaten Gorontalo Utara	Konsumen

- b. Bantuan Dana Hibah Koperasi berupa uang kepada 3 (tiga) koperasi yaitu:

~ Koperasi Pinus Jaya Sejahtera Desa Mootilango Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo badan Hukum Nomor : 007425/BH/M.KUKM.2/II/2018 tanggal 20 Februari 2018. NPHD nomor 202/DKUPP/I/2024 tanggal 30 Januari 2024

~ Koperasi Produsen Bandayo Ar-Rahman Moosalamati, Kel. Huto'o Kec. Limboto badan Hukum 381/BH/DKPP/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011. NPHD nomor 201/DKUPP/I/2024 tanggal 30 Januari 2024

~ Koperasi Konsumen Saitama Mandiri Jaya, Desa Pasalae, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara. No Badan Hukum (BH) : AHU 0016221.AH.01.26. Tahun 2022. NPHD nomor 203/DKUPP/I/2024 tanggal 30 Januari 2024

c. Honorarium tenaga Non ASN 1 orang x 12 bulan

3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Outcome dari program ini adalah Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya (target 390 orang) capaian 475 orang.

Keluaran Sub Kegiatan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (target 390 orang, capaian 475 orang).

Dukungan anggaran tahun 2024 untuk pelaksanaan program kegiatan ini berjumlah Rp. 1.649.855.250,- dengan realisasi mencapai Rp. 1.574.724.942,- atau 95,45% realisasi keuangan dan 100% realisasi fisik. Pada program ini terdapat 2 (dua) sumber dana yaitu APBD sebesar Rp. 105.264.750,- dan DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi sebesar Rp. 1.544.590.500,- dengan realisasi DAK Non Fisik pada program ini sebesar Rp. 1.469.566.222,- (95,14% keuangan) sisa anggaran Rp. 75.130.308,- (belanja perjalanan dinas biasa, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN.serta sisa belanja lainnya yang tidak dapat digunakan lagi)

Total Jumlah Pagu DAK Non Fisik PK2UKM 2024 sebesar Rp. 2.675.525.000,- yang terbagi atas DAK Non Fisik peningkatan kapasitas SDM Koperasi sebesar Rp. 1.544.590.500,- dan DAK Non Fisik peningkatan kapasitas SDM UMKM sebesar Rp. 1.130.934.500,-

Pelaksanaan Program :

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Output kegiatan ini adalah :

- a. Penyediaan penunjang kegiatan berupa belanja alat/bahan untuk Kegiatan kantor-kertas & cover, bahan komputer dan perjalanan dinas koordinasi evaluasi & pelaksanaan pelatihan SDM Koperasi
- b. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi serta pelaku usaha bagi UKM di Provinsi Gorontalo (DAK Non Fisik PK2UKM). Jumlah Pagu DAK Non peningkatan kapasitas SDM Koperasi sebesar Rp. 1.544.590.500,- dengan realisasi Rp. 1.469.566.222,- (95,14%), silva Rp. 75.014.278,-
Pencairan dana sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tahapan yaitu Pencairan Tahap I berjumlah **Rp. 735.044.000.-** dan Tahap II berjumlah **Rp. 809.546.500.-**

Peningkatan kapasitas SDM Koperasi

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK tahun 2024, dilaksanakan 19 angkatan dengan jumlah peserta 475 orang yang berasal dari koperasi binaan Kab/Kota dan Provinsi. Untuk koperasi binaan Provinsi berjumlah 112 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari Pengurus Pengawas dan anggota Koperasi dalam mengelola koperasi agar lebih kuat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sehingga koperasi dapat mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

Tahap I :

Pelaksanaan Tanggal 14 s.d 16 Mei 2024

1. Pelatihan Akuntansi Koperasi tingkat Prov. Gorontalo : 25 peserta
2. Pelatihan Nilai dasar & Jati Diri Koperasi tingkat Prov. Gorontalo : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 17 s.d 19 Mei 2024

3. Pelatihan Mekanisme Penyelenggaraan RAT : 25 peserta
4. Pelatihan Pengawasan Koperasi : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 05 s.d 07 Juni 2024

5. Pelatihan Akuntansi Koperasi Tkt Kab. Boalemo : 25 peserta

6. Pelatihan Nilai dasar Jati Diri II di Kab. Boalemo : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 20 s.d 22 Juni 2024

7. Pelatihan Nilai dasar & Jati Diri Koperasi III di Kab. Gorut : 25 peserta

8. Pelatihan Nilai dasar & Jati Diri Koperasi IV di Kab. Pohnuato :
25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 26 s.d 28 Juni 2024

9. Pelatihan Akuntansi Koperasi III Di Kab. Pohnuato

Tahap II :

Pelaksanaan Tanggal 18 s.d 20 September 2024

1. Pelatihan Mekanisme Penyelenggaraan RAT : 25 peserta
Tkt Kab. Pohnuato

2. Pelatihan Penerapan Akuntansi Digital Koperasi : 25 peserta
Tkt. Kab. Pohnuato

Pelaksanaan Tanggal 25 s.d 07 September 2024

3. Pelatihan Mekanisme Penyelenggaraan RAT : 25 peserta
Tkt. Kab. Boalemo

4. Pelatihan Penerapan Akuntansi Digital Koperasi : 25 peserta
Tkt. Kab. Boalemo

Pelaksanaan Tanggal 16 s.d 18 Oktober 2024

5. Pelatihan Mekanisme Penyelenggaraan RAT : 25 peserta
Tkt. Prov Gorontalo

6. Pelatihan Akuntansi Koperasi Tkt. Kab. Gorontalo Utara : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 05 s.d 07 November 2024

7. Pelatihan Akuntansi Koperasi Tkt. Prov Gorontalo : 25 peserta

8. Pelatihan Pengawasan Koperasi Tkt. Prov. Gorontalo : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 08 s.d 10 November 2024

9. Pelatihan Koperasi Berbasis Bisnis Tkt. Prov Gorontalo: 25 peserta

10. Pelatihan Kompetensi Bagi pengurus Tkt. Prov. Gorontalo : 25 peserta

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

Outcome program adalah *jumlah UKM yang berdaya saing* (target 140 unit usaha dengan capaian kinerja 43 UKM). adapun capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 94,61% dari target 100%. Target kinerja program tidak tercapai karena keterbatasan anggaran dalam mengintervensi kegiatan antara lain peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada pelaku UKM khususnya untuk melakukan pembinaan (digitalisasi pemasaran) administrasi keuangan, dan bedah produk dalam upaya peningkatan daya saing UMKM

Pagu anggaran 2024 setelah perubahan pada program ini berjumlah Rp. 1.293.583.250,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2024 berjumlah Rp. 1.275.335.035,- dan silva sebesar Rp. 18.248.215,- . pagu anggaran ini dari anggaran induk Rp. 1.267.183.250,- dan tambahan pada APBD-P sebesar Rp. 26.400.000,- untuk belanja jasa tenaga pelayanan umum yaitu kekurangan honorarium PTT 2 bulan .

Pada program/kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Kalangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan.

Pagu anggaran setelah perubahan Rp. 158.400.000,- dari pagu induk sub kegiatan ini sejumlah Rp. 132.000.000,- dimana pada APBD-P terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 26.400.000,- untuk belanja jasa tenaga pelayanan umum yaitu kekurangan honorarium PTT 2 bulan.

Output Kegiatan ini adalah :

Honorarium jasa tenaga pelayanan umum (tenaga konsultan pendamping PLUT) 5 orang selama 12 bulan dalam rangka pendampingan kepada para pelaku UMKM

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi serta pelaku usaha bagi UKM di Provinsi Gorontalo (DAK Non Fisik KUKM).

Peningkatan kapasitas SDM UMKM

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM UKM tahun 2024 dilaksanakan 2 angkatan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM UMKM dengan jumlah peserta 375 orang yang berasal dari Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo Utara, Boalemo dan Kabupaten Pohuwato dan Sosialisasi penyuluhan hukum bagi UMKM dalam rangka peningkatan SDM bagi pelaku usaha serta pemahaman terhadap hukum bagi 150 UKM/IKM/Pelaku se Provinsi Gorontalo.

Jumlah pagu Anggaran untuk DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas SDM UKM Rp. 1.130.934.500,- penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2024 berjumlah Rp. 1.113.260.700,- dengan persentase keuangan 98,43 % dan persentase fisik 100 %, dengan silva berjumlah Rp. 17.673.800,- (belanja bahan lainnya, makan minum aktivitas lapangan, honorarium narasumber, iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN, biaya perjalanan dinas biasa).

Tahap I :

Pelaksanaan Tanggal 14 s.d 16 Mei 2024

1. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis bagi UMKM Aneka Kripik Di Kabupaten Boalemo : 25 peserta
2. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis bagi UMKM Aneka Kue kering di Kabupaten Boalemo : 25 peserta
3. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis bagi UMKM Aneka Kue kering Di Kabupaten Pohuwato : 25 Peserta

Pelaksanaan Tanggal 13 Mei 2024

4. Sosialisasi Penyuluhan Hukum bagi UMKM : 50 peserta di Kab. Pohuwato
5. Sosialisasi Penyuluhan Hukum bagi UMKM : 50 peserta di Kab. Boalemo

Pelaksanaan Tanggal 29 s.d 31 Mei 2024

6. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis Bagi UMKM Aneka Kue
di Kab. Bone Bolango : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 01 s.d 03 Juni 2024

7. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis Bagi UMKM Aneka Kripik
Di Kab. Bone Bolango 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 30 s.d 01 Juni 2024

8. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis Bagi UMKM Aneka Kue
Di Kab. Gorontalo Utara 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 29 Mei 2024

9. Sosialisasi Penyuluhan Hukum bagi UMKM di Kab. Gorontalo Utara
Tahap II :

Pelaksanaan Tanggal 26 s.d 28 September 2024

1. Diklat teknik pembuatan pola kreatif bagi UMKM : 25 peserta
Di Kabupaten Boalemo
2. Diklat teknik pembuatan pola kreatif bagi UMKM : 25 peserta
Di Kabupaten Pohuwato

Pelaksanaan Tanggal 11 s.d 13 Oktober 2024

3. Diklat teknik pembuatan pola kreatif bagi UMKM : 25 Peserta
Di Kabupaten Bone Bolango

Pelaksanaan Tanggal 12 s.d 14 Oktober 2024

4. Diklat teknik pembuatan pola kreatif bagi UMKM : 25 peserta
Di Kab. Gorontalo Utara

Pelaksanaan Tanggal 08 s.d 10 November 2024

5. Diklat Desain Baju & Menjahit bagi UMKM : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 11 Oktober 2024

6. Sosialisasi Penyuluhan Hukum Bagi UMKM : 50 peserta
di Kab. Bone Bolango

Pelaksanaan Tanggal 10 Oktober 2024

7. Sosialisasi Penyuluhan Hukum Bagi UMKM : 50 peserta

3. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah, sub kegiatan Produksi & pengolahan, pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi

Pagu awal program ini berjumlah Rp. 16.258.400.000,- kemudian terdapat revisi pada beberapa belanja yang bersesuaian antara lain pada belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar (Rp. 1.083.200.000,-) dan tambahan pada perjalanan dinas biasa Rp. 185.000.000,- sehingga total revisi 2024 pada program ini (Rp. 898.200.000,-).

Pada tahapan APBD-P hingga finalisasi APBD-P terdapat pengurangan anggaran pada belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Rp. 911.000.000,- dan tambahan Rp. 450.000.000,- (APBD-P) serta pada beberapa belanja lainnya yang bersesuaian dengan total pada APBD-P (Rp. 245.055.000,-). Sehingga total pagu program ini setelah perubahan Rp. 15.115.145.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.114.181.261,- (99,45% keuangan) dan silva Rp. 963.739,-

Dalam pelaksanaan kegiatannya di tahun 2024 anggaran sebesar Rp. 2.710.000.000,- di tagging melalui sumber dana Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun Anggaran 2024 Provinsi Gorontalo, berupa Bantuan Bahan Produksi, Berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 900.1.14.5/BKPG/2320/VI/2024 perihal Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Rencana Penggunaan Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun Anggaran 2024 Provinsi Gorontalo.

Outcome dari program adalah jumlah UKM yang bertransformasi usaha (target kinerja 40 unit usaha, capaian 52 unit usaha)

Output kegiatan ini adalah :

- a. Terlaksananya Bantuan Bahan Produksi/Olahan Bagi UMKM, bantuan ini diperuntukan bagi UKM Olahan pangan, Kios, warung makan, aneka minuman Se Provinsi Gorontalo dengan mengacu pada juknis yang berlaku.

Pagu induk untuk belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (bantuan bahan produksi olahan bagi UMKM) ini sebesar Rp. 15.832.800.000,- dengan realisasi di tahap I Rp. 12.035.852.268,- (2.264 penerima). sisa anggaran Rp. 3.796.947.732,- kemudian terdapat revisi penyesuaian (tambah/kurang/program/kegiatan/sub kegiatan) sebesar Rp. 1.083.200.000,- berdasarkan surat persetujuan pergeseran an ggaran tanggal 06 Mei 2024 nomor 160/DPRD825/V/2024 sehingga sisa untuk tahap selanjutnya Rp. 2.713.747.732,- pada tahapan APBD-P terdapat tambahan anggaran Rp. 470.000.000,- dan pada finalisasi APBD-P (Rp. 931.000.000). sehingga sisa pagu untuk belanja ini setelah APBD-P Rp. 2.252.747.732,- dan diserahkan di tahap II.

Adapun rekapitan penerima bantuan Tahap I dan II Tahun 2024 :

Rekapitan Penerima Bantuan Tahap I Tahun 2024		
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima
1	Kota Gorontalo	4679
2	Kabupaten Gorontalo	3761
3	Kabupaten Boalemo	703
4	Kabupaten Pohuwato	468
5	Kabupaten Bone Bolango	533
6	Kabupaten Gorontalo Utara	1895
Total		12039

Rekapitan Penerima Bantuan Tahap II Tahun 2024		
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima
1	Kota Gorontalo	939
2	Kabupaten Gorontalo	719
3	Kabupaten Bone Bolango	470
4	Kabupaten Gorontalo Utara	136
Total		2264

REKAPAN PENERIMA BANTUAN TAHAP 2 TAHUN 2024		
NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENERIMA
1	KOTA GORONTALO	939
2	KABUPATEN GORONTALO	719
3	KABUPATEN BONE BOLANGO	470
4	KABUPATEN GORONTALO UTARA	136
TOTAL		2.264

- b. Benchmarking bagi pelaku UMKM yang diikuti oleh 20 pelaku usaha dari Kabupaten Boalemo ke Alverna Bakery, Lin's Bakery di Jakarta
- c. Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka verifikasi, validasi dan penyaluran bantuan UMKM di Provinsi Gorontalo
- d. Honorarium pelaksana kegiatan (3 orang)

Sasaran Strategis III : Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)

4. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Outcome dari program ini adalah Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri. adapun target Renstra 36 Dokumen. Pagu awal program ini sejumlah Rp. 1.861.808.250,- kemudian terdapat revisi sebesar (Rp. 209.090.000,-) pada beberapa item belanja dikegiatan. Kemudian tambahan pada APBD-P Rp. 490.335.000,- antara lain pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada 2 (dua) kegiatan). Sehingga total pagu akhir Rp. 2.143.053.250,-. Pada program ini capaian fisik 100%, dan realisasi keuangan 99,79% karena terdapat sisa belanja yang tidak dimanfaatkan.

Pelaksanaan Program :

Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri

- **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (target 12 Dokumen, capaian 12 Dokumen).

Dalam melaksanakan kegiatannya di tahun 2024 didukung oleh anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 728.251.750,- realisasi Rp.727.654.648,- dengan silva Rp. 597.102,- antara lain pada belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.

Adapun penganggaran induk APBD 2024 untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 388.561.750,-. Kemudian terdapat revisi antar belanja pada sub kegiatan ini sebesar (Rp. 3.090.000,-) dan tambahan anggaran melalui APBD-P sebesar Rp. 342.780.000,- yang diperuntukkan untuk kekurangan pembayaran Honorarium PTT (2 bulan) dan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Bantuan Bahan dan Peralatan bagi IKM) Rp. 278.100.000,- serta perjalanan dinas Identifikasi verifikasi fasilitasi bantuan IKM untuk tahun 2024 sebesar Rp. 55.000.000,-.

Output kegiatan ini :

- a. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat bagi IKM Pangan dan Furniture yaitu Fasilitasi tempat usaha, bahan dan peralatan, listrik bagi IKM Pangan bagi 7 IKM pada pagu induk dan 12 penerima di APBD-P(*terlampir*)

Tujuan :

- Mendorong terciptanya Wira Usaha Baru yang mandiri dan professional yang mampu menciptakan lapangan kerja.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas produk.
- Meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat.
- Memanfaatkan peluang pasar lokal, regional dan nasional

Pagu awal pada item belanja ini sebesar Rp. 310.545.000,- kemudian revisi antar OPD sebesar (Rp. 3.090.000,-) dan pada tahapan finalisasi APBD-P sebesar Rp. 278.100.000,- sehingga total anggaran pada belanja ini sebesar Rp. 585.555.000,- realisasi Rp. 584.959.098,- . silva Rp. 595.902,-

b. Verifikasi, Pengawasan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

- Untuk memastikan kelompok usaha yang telah memasukkan proposal permohonan bantuan modal usaha telah memenuhi persyaratan.
- Pengembangan industri Pangan dan Furniture yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing,

Sasaran Pelaksanaan kegiatan yaitu calon penerima bantuan IKM Pangan dan Furniture di Kabupaten/Kota

c. Terlaksananya pembayaran jasa tenaga pelayanan umum 2 orang

➤ **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (target 12 Dokumen dan capaian 12 Dokumen). Ditahun 2024 Pagu awal pada sub kegiatan ini berjumlah Rp. 1.366.629.750,- kemudian terdapat revisi sebesar (Rp. 206.000.000,-) yaitu pada item belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat revisi antar OPD sebesar (Rp. 206.000.000,-) dan revisi tambah kurang pada item belanja bahan lainnya dan sewa bangunan gedung kantor. Pada tahapan finalisasi APBD-P tambahan anggaran Rp. 132.155.000,- (belanja barang yang dijual/diserahkan kepada masyarakat Rp. 115.875.000, belanja jasa pelayanan umum 2 bulan Rp. 16.280.000,-,

Sehingga total anggaran setelah perubahan pada sub kegiatan ini menjadi Rp. 1.292.784.750,- realisasi Rp. 1.289.055.716,- silva Rp. 3.729.034,- Anggaran ini untuk melaksanakan beberapa kegiatan seperti pada uraian dibawah ini.

Output kegiatan ini adalah :

1. Bantuan Bahan dan Peralatan IKM Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut bagi 23 UKM/IKM/Pelaku usaha Industri sandang, aneka dan kerajinan serta IKM logam mesin.

Pagu awal pada item belanja ini sebesar Rp. 674.650.000,- kemudian revisi antar OPD sebesar (Rp. 206.000.000,-) dan pada tahapan finalisasi APBD-P sebesar Rp. 115.875.000,- sehingga total anggaran pada belanja ini sebesar Rp. 584.525.000,- realisasi Rp. 582.159.628,- silva Rp. 2.365.372,-

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

Menstimulir pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, menyerap tenaga dan menekan angka pengangguran kerja serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

Sasaran Pelaksanaan kegiatan yaitu UKM/IKM/Pelaku usaha Industri Kerajinan, Sandang, Aneka dan Kerajinan

2. Verifikasi dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan WUB

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

Untuk memastikan kelompok usaha yang telah memasukkan proposal permohonan bantuan modal usaha telah memenuhi persyaratan. Pengembangan industri kerajinan daerah yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing.

3. Pameran dan Rakernas Dekranas

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

- Mengikuti Pameran Produk Kerajinan Nusantara “Kriya Nusa 2024” di Jakarta dan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) DEKRANAS Tahun 2024.
- Tujuan Pameran Kriyanusa 2024 yaitu untuk memfasilitasi perajin dalam mempromosikan dan memasarkan hasil kerajinannya serta meningkatkan rasa cinta dan bangga masyarakat Indonesia akan produk kerajinan Indonesia, selain itu sebagai ajang pembelajaran bagi para perajin untuk memperhatikan produk-produk yang dipamerkan.

- Tujuan Rakernas DEKRANAS yaitu untuk menambah wawasan bagi DEKRANAS dan DEKRANASDA Provinsi/Kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan kepada IKM Kerajinan sehingga produk kerajinan yang dihasilkan para perajin lebih berkualitas, memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar nasional maupun Internasional. *Sasaran* yaitu Pelaku industri kerajinan sebanyak 3 orang

4. Pengembangan Dekranasda Provinsi Gorontalo

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

Meningkatkan kemampuan SDM IKM yang berdaya saing

Sasaran Pelaksanaan kegiatan yaitu semua pelaku industri kerajinan.

Kegiatan Pengembangan Dekranasda Provinsi Gorontalo meliputi:

- Hibah kepada Dekranasda Provinsi Gorontalo senilai Rp. 300.000.000,- Nomor NPHD 351/DKUPP/IV/2024 tanggal 25 April 2024
- Honor Tenaga Non ASN yang merupakan Penjaga Galeri dan Tenaga Administrasi Dekranasda sebanyak 2 orang

➤ **Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri**

Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (12 Dokumen)

Pagu awal anggaran sub kegiatan ini berjumlah Rp. 266.400.585,- kemudian terdapat revisi sebesar Rp.87.500.000,- dan pada APBD-P mendapat tambahan anggaran sejumlah Rp. 30.800.000,- Total akhir pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 209.700.585,- dengan realisasi sebesar Rp. 201.231.240,-

Output kegiatan ini adalah :

a. Fasilitas penyusunan RPIK Kabupaten/Kota

Tujuan Pelaksanaan kegiatan

- Mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di daerah;
- Menentukan sasaran strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan kabupaten

- Mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Nilai Ekspor (USD)

5. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Outcome dari program ini adalah Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi dengan target 2 dokumen dan capaian 1 dokumen *yaitu Dokumen Surat keterangan asal dari* dari 5 (lima) perusahaan yaitu PT. Pabrik Gula Gorontalo, PT. Biomas Jaya Abadi, PT. Milenium Agro Selebes, PT. Seger Agro Nusantara. Target kinerja tidak tercapai karena 1 sub kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan target 1 dokumen tidak dilaksanakan karena bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Untuk pelaksanaan program ini didukung oleh anggaran sampai Desember 2024 sejumlah Rp. 29.616.750,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2024 berjumlah Rp. 29.467.120,- (99,29% keuangan dan 100% fisik), pada program ini tidak terdapat revisi maupun perubahan pada APBD-P 2024. Adapun silva pada program ini Rp. 149.630 pada beberapa belanja. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena adanya sisa belanja yang tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Pelaksanaan Program :

Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

Indikator sub kegiatan Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal dengan target 9 dokumen, capaian 47 dokumen yaitu dokumen Surat Keterangan Asal

Output kegiatan ini adalah :

- a. Pendataan pengawasan monitoring dan evaluasi ekspor di pelabuhan dan identifikasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo

Tujuan Pelaksanaan kegiatan :

- Pelaksanaan pendataan, monitoring dan evaluasi kegiatan ekspor di kabupaten/kota
- Tersusunnya data pelaku usaha/eksportir yang menggunakan SKA dan identifikasi permasalahan eksportir terhadap penggunaan aplikasi SKA

Adapun realisasi export tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.13 Rekap Realisasi Eksport Berdasarkan Komoditi
Selang Bulan Januari – Desember 2024

NO	JENIS KOMODITI	JUMLAH KOMODITI (KG)	NILAI EKSPOR (USD)	NEGARA TUJUAN	EKSPORTIR
1	MOLASES	32.634.272	5.496.316,65	KOREA	PT. PABRIK GULA GORONTALO
2	WOOD PELET	186.815.057	25.587.390,69	KOREA SELATAN, JEPANG	PT. BIOMAS JAYA ABADI
3	SANTAN BEKU	473.503	473.503	CINA	PT. MILENIUM AGRO SELEBES
4	MINYAK MENTAH	179.205	157.637,00	CINA	PT. MILENIUM AGRO SELEBES
5	KELAPA PARUT	6.947.162	12.005.749,50	EROPA, CHINA, SAUDI ARABIA	
6	JAGUNG	32.900.000	9.120.637,50	FILIPINA	PT. SEGER AGRO NUSANTARA
7	IKAN	38.649,64	123.097,51	SINGAPURA MALAYSIA, JEPANG	
8	KEPITING	450,1	3.000,60	SINGAPURA, JEPANG	
	J U M L A H	259.988.299	52.967.332,45		

Tabel 3.14 Penerbitan SKA Yang Dokumentasinya Telah Diterima dengan Lengkap dan Benar Tahun 2024

No	Tgl. Terbit	No. SKA	Invoice Number	Nama Eksportir	Nama Importir
1	05-Jan-24	0000001/GTL/2024	SKA-SB-2312-03/YCM038	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
2	05-Jan-24	0000002/GTL/2024	SKA-SB-2312-05/YCM040	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
3	09-Jan-24	0000003/GTL/2024	INV.0280/BJA/APB/II/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO. TOKYO 104-8429 JAPAN
4	19-Jan-24	0000004/GTL/2024	SKA-SB-2312-06/YCM041	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
5	22-Jan-24	0000005/GTL/2024	SKA-SB-2312-07/YCM042	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
6	30-Jan-24	0000006/GTL/2024	INV.006/BJA/APB/II/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. TOKYO 104-8429 JAPAN
7	01-Feb-24	0000007/GTL/2024	SKA-MP-2401-01	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY CHINA
8	01-Feb-24	0000008/GTL/2024	SKA-SB-2401-03/YCM045	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
9	01-Feb-24	0000009/GTL/2024	SKA-SB-2401-01/YCM043	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
10	01-Feb-24	0000010/GTL/2024	SKA-SB-2401-04/YCM046	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
11	05-Feb-24	0000011/GTL/2024	SKA-SB-2401-02/YCM044	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
12	07-Feb-24	0000012/GTL/2024	003/FD-TLM/II/2024	PT PABRIK GULA GORONTALO	UM KOREA GANGNAM-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREA
13	07-Feb-24	0000013/GTL/2024	005/FD-TLM/II/2024	PT PABRIK GULA GORONTALO	UM KOREA GANGNAM-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREA
14	13-Feb-24	0000014/GTL/2024	INV.031/BJA/HAN/II/2024		HANWA CO., LTD.

No	Tgl. Terbit	No. SKA	Invoice Number	Nama Eksportir	Nama Importir
				PT BIOMASA JAYA ABADI	TOKYO 104-8429 JAPAN
15	15-Feb-24	0000015/GTL/2024	SKA-SB-2401-05/YCM047	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
16	20-Feb-24	0000016/GTL/2024	SKA-SB-2401-08/YCM050	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
17	20-Feb-24	0000017/GTL/2024	SKA-SB-2401-07/YCM049	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
18	20-Feb-24	0000018/GTL/2024	SKA-SB-2401-06/YCM04 8	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
19	29-Feb-24	0000019/GTL/2024	SKA-MP-2402-01	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY XIAMEN CITY, FUJIAN, CHINA
20	29-Feb-24	0000020/GTL/2024	SKA-SB-2402-01/YCM051	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
21	01-Mar-24	0000021/GTL/2024	INV.067/BJA/APB/II/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. TOKYO 104-8429 JAPAN
22	19-Mar-24	0000022/GTL/2024	SKA-MP-2401-02	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY XIAMEN CITY, FUJIAN, CHINA
23	19-Mar-24	0000023/GTL/2024	SKA-SB-2402-03/YCM053	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
24	19-Mar-24	0000024/GTL/2024	SKA-MP-2402-02	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY XIAMEN CITY, FUJIAN, CHINA
25	19-Mar-24	0000025/GTL/2024	SKA-SB-2402-02/YCM052	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
26	20-Mar-24	0000026/GTL/2024	INV.093/BJA/HAN/III/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., TOKYO 104-8429 JAPAN
27	22-Mar-24	0000027/GTL/2024	SKA-SB-2402-04/YCM054		GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO.,

No	Tgl. Terbit	No. SKA	Invoice Number	Nama Eksportir	Nama Importir
				PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGDONG, CHINA
28	28-Mar-24	0000028/GTL/2024	SKA-SB-2403-02/YCM056	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
29	29-Apr-24	0000029/GTL/2024	INV.128/BJA/APB/IV/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. TOKYO 104-8429 JAPAN
30	08-Mei-24	0000030/GTL/2024	SKA-SB-2404-01/YCM055	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU YEHUANG FOODS CO., GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA CHINA
31	13-Mei-24	0000031/GTL/2024	INV.052/BJA/ITC/V/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	ITOCHU CORPORATION, TOKYO, 107-8077, JAPAN
32	28-Mei-24	0000032/GTL/2024	SKA-MP-2404-01	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY, XIAMEN CITY, FUJIAN, CHINA
33	14-Jun-24	0000033/GTL/2024	INV.190/BJA/APB/VI/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
34	05-Jul-24	0000034/GTL/2024	SKA-MP-2405-01	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY, TOWER WUHAN BUILDING, XIAMEN CITY, FUJIAN, CHINA
35	16-Jul-24	0000035/GTL/2024	INV.237/BJA/APB/VII/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
36	02-Agu-24	0000036/GTL/2024	01/YGU/INV/SAMPLE/VII/2024	PT YASMIR GLOBALINDO UTAMA	ROERIT MAHAYANTI RRUGA HAKI SHEHU 38, 1001 TIRANA ALBANIA
37	02-Agu-24	0000037/GTL/2024	02/YGU/INV/SAMPLE/VII/2024	PT YASMIR GLOBALINDO UTAMA	STEFANO BIAGGI, DANPROM SA VIA PAOLO TORRIANI 5, 6850 MENDRISIO SWITZERLAND
38	12-Agu-24	0000038/GTL/2024	SKA-SB-2407-01/YCM057		GUANGZHOU YEHUANG FOODS CO.,

No	Tgl. Terbit	No. SKA	Invoice Number	Nama Eksportir	Nama Importir
				PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA
					CHINA
39	15-Agu-24	0000039/GTL/2024	INV.292/BJA/APB/VIII/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
40	26-Agu-24	0000040/GTL/2024	INV.327/BJA/HAN/VIII/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
41	27-Agu-24	0000041/GTL/2024	010/FD-TLM/VIII/2024	PT PABRIK GULA GORONTALO	GINEBRA SAN MIGUEL, INC.
					ST.,MANDALUYONG CITY, PHILIPPINES
42	13-Sep-24	0000042/GTL/2024	013/FD-TLM/IX/2024	PT PABRIK GULA GORONTALO	GINEBRA SAN MIGUEL, INC.
					ST.,MANDALUYONG CITY, PHILIPPINES
43	18-Sep-24	0000043/GTL/2024	INV.357/BJA/APB/IX/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
44	07-Okt-24	0000044/GTL/2024	INV.369/BJA/APB/X/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
45	18-Okt-24	0000045/GTL/2024	INV.432/BJA/APB/X/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
46	11-Nov-24	0000046/GTL/2024	INV.467/BJA/APB/XI/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
47	16-Des-24	0000047/GTL/2024	INV.517/BJA/APB/XII/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN

6. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Outcome dari program ini adalah Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan target 28 Laporan, Capaian 43 Laporan yaitu 12 Laporan pemantauan harga dan 31 laporan pelaksanaan Operasi pasar

Pelaksanaan Program :

Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota

Pelaksanaan sub kegiatan :

Pagu awal sub kegiatan ini yaitu Rp. 103.400.000,- dan tambahan pada APBD-P sebesar Rp. 20.680.000,- sehingga pagu akhir hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp. 124.080.000,- dengan realisasi Rp. 123.978.000,- dengan realisasi keuangan 99,67% dan fisik 100%

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu 12 laporan, capaian 12 laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota

Pelaksanaan sub kegiatan :

1. Pemantauan, Pengumpulan, dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting yang dilaporkan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP)

Pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan harga barang pokok dan barang penting bertujuan untuk:

- Mengetahui perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting secara periodik;
- Mengantisipasi terjadinya kondisi yang mengganggu kegiatan perdagangan nasional, yang meliputi gangguan pasokan dan/atau kondisi harga barang pokok dan/atau barang penting berada diatas harga acuan atau dibawah harga acuan;
- Mengetahui tingkat disparitas harga antar waktu dan antar wilayah;
- Bahan masukan untuk perumusan kebijakan pengadaan dan distribusi barang pokok dan barang penting dalam rangka stabilisasi harga.

Pelaksanaan pemantauan harga tidak terlepas dari permasalahan teknis dan non teknis, seperti adanya perbedaan harga antara petugas pemantau harga di kabupaten kota dan provinsi terhadap pasar pantauan yang sama.

Sebagai upaya dalam menyamakan persepsi serta ketaatan/ketepatan waktu dan substansi materi terkait pelaporan pemantauan pasar dan harga barang kebutuhan pokok, maka diperlukan hal-hal diantaranya;

- Pelaporan terkait ketersediaan dan kondisi harga barang kebutuhan pokok dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan yang terkonfirmasi dengan petugas dari dinas terkait di kota/kabupaten;
- Ketepatan data dan kepatuhan batas waktu pelaporan merupakan hal yang sangat penting, sehingga para petugas pendataan dan pelaporan harus benar-benar memperhatikan hal ini termasuk validitas datanya.

2. Pemantauan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Menyambut Ramadhan dan Idul Fitri

Pemantauan ketersediaan dan stok barang kebutuhan jelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445H/2024M dilaksanakan tanggal 5 April 2024 di tiga gudang distributor yakni gudang PT Awet Sarana Sukses, PT Cipta Langgeng Mitra Sukses, dan PT Manggala Utama Distrindo. Dua gudang lainnya yakni di Hypermart Gorontalo dan gudang Bulog Sub Divre Gorontalo.

Berdasarkan peninjauan tercatat stok beras ada 850 ton, gula 920 ton. Minyak goreng 170 ton dan terigu 131 ton. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri dengan harga yang stabil.

3. Honorarium pengolah data harga dan informasi harga barang pokok dan barang penting

✦ Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah laporan pelaksanaan Operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dengan capaian 31 laporan dari target 4 laporan.

Anggaran induk sub kegiatan ini berjumlah Rp. 1.370.800.100,- kemudian mengalami revisi sebesar Rp. 2.817.283.882,-

Revisi anggaran termasuk tambahan anggaran melalui IF periode 3 2023 sebesar Rp. 2.961.150.000,- berdasarkan Surat Persetujuan DPRD Nomor: 160/DPRD/435/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 yaitu Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat serta beberapa belanja lainnya yang bersesuaian.

Pada tahapan APBD-P 2024 mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 1.406.500.000,- Adapun tambahan anggaran terdapat pada beberapa belanja antara lain belanja bahan cetak, belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Rp. 1.327.195.000,-; belanja makan minum rapat, sewa alat kantor dan perjalanan dinas pendukung kegiatan.

sehingga total pagu sub kegiatan ini setelah perubahan sebesar Rp. 5.594.583.982,- dengan realisasi Rp. 5.528.912.227,- (99,02% keuangan, fisik 100%)

Ouput sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 4 laporan dan capaian 31 laporan pelaksanaan pasar barang kebutuhan pokok bersubsidi.

Output kegiatan ini adalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi tahun 2024 yang dilaksanakan 31 kali di kabupaten kota se Provinsi Gorontalo, dengan jumlah penerima 35.600 penerima.

Kegiatan fasilitasi Operasi Pasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) wilayah Gorontalo, dengan menyediakan produk antara lain Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, dan Terigu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, utamanya Komoditi Beras, dengan pertimbangan harga beras yang terus meningkat, tidak diimbangi dengan pasokan yang mulai berkurang, ditambah peningkatan permintaan menjelang bulan Ramadhan 1445.

Kegiatan dilaksanakan di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya wilayah yang masuk dalam objek pantauan perhitungan inflasi daerah, dimana kegiatan ini akan turut mempengaruhi perhitungan inflasi nasional, yang meliputi wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Sasaran Operasi Pasar adalah masyarakat umum, dan lokasi pelaksanaannya bertempat di pasar tradisional, yang buka secara mingguan, sesuai dengan jadwalnya masing-masing.

Lokasi kegiatan Operasi Pasar difokuskan di 3(tiga) wilayah, antara lain : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Lebih spesifik lagi Operasi Pasar menasar pada masyarakat yang berbelanja di Pasar Tradisional mingguan, sesuai dengan jadwalnya masing-masing, mulai dari Pukul 07.00 Wita sampai dengan selesai.

Masyarakat diberikan kesempatan berbelanja sesuai dengan antriannya, dan dibatasi untuk setiap warga hanya dapat berbelanja maksimal 1 item/ orang. Dalam kegiatan ini, BULOG menyediakan produk beras SPHP ukuran 5 kg, dijual dengan harga Rp. 10.400/kg, Gula Pasir dijual dengan harga Rp. 18.000/kg, Minyak Goreng dijual dengan harga Rp. 14.000/liter, dan terigu dijual dengan harga Rp11.000/kg. Setiap hari OP dilaksanakan di 2(dua) lokasi pasar tradisional, dan terbatas hanya dapat melayani untuk 200(Dua Ratus) warga masyarakat.

b. Pasar Murah Bersubsidi

Pelaksanaan program dan kegiatan pasar barang kebutuhan pokok bersubsidi atau yang juga dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Pasar Murah Bersubsidi, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyediakan dan menjual komoditi yang turut mempengaruhi inflasi yaitu:

- Beras kemasan 5 Kg dijual dengan harga Rp.25.000 atau @Rp.5.000/Kg;
- Gula Pasir kemasan 1 Kg dijual Rp.10.000/Kg.
- Minyak Goreng kemasan botol 1 liter dijual Rp.10.000/Liter;
- Telur kemasan 10 butir dijual Rp.10.000/pack atau @Rp.1.000/butir
- Cabai Rawit dikemas dalam tas 0,5 Kg atau 0,25 Kg dijual Rp.10.000
- Bawang Merah dikemas dalam tas 0,5 Kg dijual Rp.10.000/0,5 Kg ;
- Bawang Putih dikemas dalam tas 0,5 Kg dijual Rp.10.000/0,5 Kg ;
- Ayam Broiler dikemas dalam tas 1 Ekor dijual Rp 20.000
- Ikan Tuna dikemas dalam *vacum seal* 0,5 Kg dijual Rp.20.000/0,5 Kg

Untuk selang bulan Januari sampai dengan Desember 2024, kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Kota dan Kabupaten se-Provinsi Gorontalo, sebagai berikut:

TITIK KE-	TANGGAL	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN	KOTA/KAB	JUMLAH PAKET
1	09-Mar-24	SIMPANG 3 GORR TAPA DESA TALULOBUTU	TAPA	BONE BOLANGO	1500
2	10-Mar-24	KELURAHAN LIBUO	DUNGINGI	KOTA GORONTALO	1000
3	14-Mar-24	LAPANGAN DESA LUWOO	TALAGA JAYA	KABUPATEN GORONTALO	1500
4	26-Mar-24	KEJARI LIMBOTO DESA PONE	LIMBOTO BARAT	KABUPATEN GORONTALO	1500
5	02-Apr-24	KEJAKSAAN TINGGI DESA TOTO SELATAN	Kabila	BONE BOLANGO	2000
6	04-Apr-24	MAKO LANAL GORONTALO KEL. LEATO SELATAN	Dumbo Raya	KOTA GORONTALO	1000
7	06-Apr-24	POLDA GORONTAL DESA TULADENGGI	Telaga	KABUPATEN GORONTALO	1500
8	14-Apr-24	LAPANGAN DESA BULOTA	Limboto	KABUPATEN GORONTALO	1000
9	16-Apr-24	MAKOREM 133 NW DESA TRIDHARMA	Pulubala	KABUPATEN GORONTALO	1800
10	18-Apr-24	PESANTREN SALAFIYAH DESA BANUROJA	Randangan	POHUWATO	1000
11	22-Apr-24	KOMP. PERKEBUNAN KAKAO DESA POLOHUNGO	Dulupi	BOALEMO	1000
12	27-Apr-24	KEMENKUMHAM DESA TOTO SELATAN	Kabila	BONE BOLANGO	1000
13	29-May-24	LAPANGAN DESA PANGGULO	Botupingge	BONE BOLANGO	1500

TITIK KE-	TANGGAL	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN	KOTA/KAB	JUMLAH PAKET
14	04-Jun-24	LAP. GARUDA PUTRA KEL. LEATO SELATAN	Dumbo Raya	KOTA GORONTALO	1000
15	05-Jun-24	AULA SERBAGUNA DESA MONGGUPO	Atinggola	GORONTALO UTARA	1500
16	05-Jun-24	KANTOR DESA MOLANTADU	Tomilito	GORONTALO UTARA	700
17	09-Jun-24	PASMOLIM KEL. KAYUBULAN	Limboto	KABUPATEN GORONTALO	1500
18	13-Jun-24	RUJAB WAGUB KEL. TANGGIKIKI	Sipatana	KOTA GORONTALO	1000
19	05-Jul-24	LAPANGAN DESA PENTADU	PAGUAT	POHUWATO	900
20	05-Jul-24	AULA DESA KARANGETANG	DENGILO	POHUWATO	300
21	05-Sep-24	LANAL GORONTALO KEL. LEATO SELATAN	DUMBO RAYA	KOTA GORONTALO	600
22	14-Oct-24	ALUN ALUN TILAMUTA DESA LIMBATO	TILAMUTA	BOALEMO	1000
23	16-Oct-24	HAL. KEJARI LIMBOTO DESA PONE	LIMBOTO BARAT	KABUPATEN GORONTALO	1000
24	19-Oct-24	KANTOR DESA PENTADIO BARAT	TELAGA BIRU	KABUPATEN GORONTALO	1000
25	22-Oct-24	TELAGA PARK DESA BULILA	TELAGA JAYA	KABUPATEN GORONTALO	1000
26	24-Oct-24	LAP. BASULAPA DESA ISIMU SELATAN	TIBAWA	KABUPATEN GORONTALO	1000
27	29-Nov-24	PASMOLIM KEL. KAYUBULAN	LIMBOTO	KABUPATEN GORONTALO	1500
28	06-Dec-24	RUJAB WAGUB KEL. TANGGIKIKI	SIPATANA	KOTA GORONTALO	1000
29	12-Dec-24	LAPANGAN DESA HUIDU	LIMBOTO BARAT	KABUPATEN GORONTALO	1000
30	14-Dec-24	STM/SMK 3 KEC. KOTA TENGAH	PULUBALA	KOTA GORONTALO	1000
31	18-Dec-24	GEREJA IMANUEL KEL. TENDA	HULONTHALANGI	KOTA GORONTALO	1300
Total					35.600

Dari tabel pelaksanaan diatas dapat dilihat bahwa perbandingan setiap pelaksanaan pasar murah bersubsidi dapat dirata-ratakan sebanyak 1000 penerima manfaat. Dan untuk sebaran pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi di wilayah kabupaten kota dapat disajikan pada tabel berikut:

REKAPITULASI PER KAB/KOTA	PELAKSANAAN	PENERIMA
KOTA GORONTALO	8 KALI	7.900
KABUPATEN GORONTALO	12 KALI	15.300
BONE BOLANGO	4 KALI	6.000
POHUWATO	3 KALI	2.200

REKAPITULASI PER KAB/KOTA	PELAKSANAAN	PENERIMA
BOALEMO	2 KALI	2.000
GORONTALO UTARA	2 KALI	2.200
JUMLAH		35.600

Adapun banyaknya volume komoditi yang dijual pada kegiatan pasar murah bersubsidi yaitu sebagai berikut:

KOMODITI	VOLUME	SATUAN
BERAS	178.000	KG
MINYAK GORENG	35.600	LTR
GULA PASIR	35.600	KG
TELUR	356.000	BUTIR
BAWANG MERAH	17.800	KG
CABE RAWIT	17.175	KG
BAWANG PUTIH	500	KG
AYAM	4.500	EKOR
IKAN TUNA	500	PAKET/0,5 KG

- c. Pelaksanaan Intervensi Pasar terhadap Komoditi Beras di Pasaran
Yaitu subsidi harga terhadap komoditi beras bagi para pedagang pengecer beras di Pasar Sentral Kota Gorontalo dan Pasar Kayubulan Kabupaten Gorontalo mengingat harga beras di pasaran mencapai Rp. 17.000.-18.000/kg dan Rp. 14.000.-15.500/liter.;

Dalam upaya stabilisasi harga barang dan menyiapkan ketersediaan barang pokok yang cukup terjangkau bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Suci Ramadhan 1445 H / 2024M (Hari Besar Keagamaan Nasional/HBKN), serta mempertimbangkan harga beras di pasaran yang masih tinggi dan sebagai tindak lanjut terhadap Hasil Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Gorontalo tanggal 14 Maret 2024 guna stabilitas harga dan pasokan komoditas beras maka upaya dan langkah konkrit yang diputuskan

pada pertemuan dimaksud untuk stabilisasi harga, pengendalian inflasi, dan pemenuhan barang kebutuhan pokok

7. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Outcome dari program ini adalah Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor dengan target 7 Komoditi, dan capaian 8 komoditi yaitu molases, wood pelet, santan beku, minyak mentah, kelapa parut, jagung, ikan, kepiting.

Untuk capaian komoditi unggulan yang diexport diperoleh berdasarkan dokumen Surat Keterangan Asal dan BPS Provinsi Gorontalo, Adapun untuk pelaksanaan kegiatan pendukung tidak dapat dilaksanakan karena belum mendapat porsi anggaran (keterbatasan fiskal daerah)

8. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Outcome dari program adalah Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen target 7 Dokumen, Capaian 7 Dokumen.

Alokasi Anggaran awal Sebesar Rp. 1.416.220.250,- tambahan APBD-P sebesar Rp. 555.500.000,- yaitu belanja penunjang kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) antara lain honorarium majelis sidang dan sekretariat BPSK serta pada beberapa belanja yang bersesuaian, sehingga total anggaran setelah perubahan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.971.720.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.940.401.656,- (96,36 persen keuangan dan 100 persen realisasi fisik). Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di tSeluruh Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

❖ Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen, capaian 297 kasus dari target 11 kasus

Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan sub kegiatan ini didukung oleh anggaran awal sebesar Rp. 1.253.616.750,- kemudian terdapat tambahan anggaran melalui finalisasi APBD-P sebesar Rp. 555.500.000,- yang diperuntukkan untuk penunjang kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) antara lain kekurangan honorarium majelis sidang dan sekretariat BPSK sebesar Rp.535.500.000,- dan belanja perjalanan dinas Rp. 20.000.000,- Sehingga total pagu anggaran hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.809.116.750,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.778.113.248,- dan silva sebesar Rp. 31.003.502,- yang merupakan sisa pembayaran honorarium majelis sidang dan sekretariat yang tidak ditagih lagi Rp. 31.000.000,- karena target kinerja anggota BPSK yang tidak tercapai. Adapun realisasi Fisik mencapai 100% dan keuangan 99,67%.

Output kegiatan ini adalah :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain sidang BPSK, honorarium majelis sidang dan sekretariat BPSK
Penyelesaian Sengketa Konsumen dilaksanakan bila ada pengaduan konsumen dan apabila terindikasi akan merugikan konsumen misalnya ada promo penjualan, klausula baku yang akan merugikan konsumen, penjualan barang yang tidak sesuai ataupun merugikan konsumen dan lain-lain sesuai peraturan perlindungan Konsumen maka penyelesaian sengketa konsumenn di laksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan juga Oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Sasaran Pelaksanaan kegiatan Untuk melindungi Konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Jumlah Monitoring dan evaluasi BPSK di Kabupaten/Kota
- c. Jumlah Pengaduan Konsumen Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebanyak 268 Kasus pengaduan, dan yang diselesaikan 253 kasus antara lain tentang Pengaduan Klausula Baku, Pengaduan permasalahan pembiayaan, liter/timbangan, penjualan LPG diatas harga Het,

- penjualan makanan/minuman ditoko-toko (diserahkan ke BPOM Kabupaten/Kota/pembinaan). Harga yang tidak bersesuaian dengan pembelian
- d. Pengaduan Konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai ketentuan yang berlaku:
- BPSK Kota Gorontalo, 40 kasus yang ditangani dan penyelesaian sengketa secara mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus kausula baku/pembiayaan
 - BPSK Kabupaten Gorontalo ditahun 2023 jumlah kasus 34, yang diselesaikan melalui mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus kausula baku/pembiayaan
 - BPSK Kabupaten Boalemo, ditahun 2024 jumlah kasus 108, yang diselesaikan melalui mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus kausula baku/pembiayaan/PLN
 - BPSK Kabupaten Bone Bolango ditahun 2024 jumlah kasus kausula baku/pembiayaan 29 yang diterima
 - BPSK Kabupaten Pohuwato ditahun 2024 jumlah kasus yang ditangani 33 kasus, yang diselesaikan melalui mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus kausula baku/pembiayaan
 - Kabupaten Gorontalo Utara, ditahun 2024 jumlah kasus 24 yang diterima dan diselesaikan melalui konsiliasi-mediasi-arbitrase. Jenis kasus kausula baku/pembiayaan
 - Provinsi Gorontalo, terdiri atas 29 kasus antara lain 5 kasus liter/timbangan (pasar tradisional/toko), 8 kasus LPG dijual diatas harga HET, 6 kasus makanan dan minuman yang sudah berjamur. 10 kasus pembelian yang harganya tidak bersesuaian, Penyelesaian kasus ini melalui pembinaan/mediasi

❖ **Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator kinerja kegiatan ini jumlah pengujian dan sertifikasi mutu produk dengan target 153 dokumen, capaian 145 dokumen yaitu

Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang 141 dokumen dan 4 sertifikat kesesuaian mutu (SKM) komoditi jagung

Sub Kegiatan Verifikasi Mutu Produk

Indikator kinerja adalah Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau dengan target 3 komoditi

Untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak mendapat porsi anggaran dampak keterbatasan fiskal daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 164/MPP/KEP/6/1996 Tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu. Dimana terdapat 4 (empat) Komoditi yaitu kopi, biji kakao, kelapa sawit dan lada putih.

Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian

Jumlah pagu yang mendukung pelaksanaan sub kegiatan hingga 31 Desember 2024 ini sejumlah Rp. 53.322.000,- tidak terdapat revisi dan finalisasi APBD-P. dengan realisasi sebesar Rp. 53.134.150,- atau 99.65 % untuk capaian realisasi keuangan dan 100% capaian realisasi fisik.

Indikator kinerja adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang, target 150 Dokumen capaian 141 Dokumen Laporan Hasil Pengujian untuk 7 komoditi (jagung, beras, rumput laut, biji cacao, kopi, VCO, lada putih). Ketidackapaian atas target sub kegiatan ini disebabkan karena laboratorium belum memiliki peralatan untuk pengujian parameter tertentu (cemaran logam dalam minyak goreng, rumput laut, biji cacao) sesuai keinginan pelanggan dan tidak maksimalnya anggaran untuk pengambilan sampel

Output kegiatan ini adalah :

a. Pengambilan sampel (contoh uji) di kabupaten/kota.

Tujuannya adalah:

- Memenuhi permintaan pelanggan agar sampel yang diambil mewakili populasi

- Menjaga kompetensi analis
- b. Pengujian komoditi akreditasi dan non akreditasi serta pengujian produk pangan olahan.

Tujuannya adalah:

- Memenuhi kualitas/mutu barang/produk agar sesuai standar nasional maupun internasional
- c. Penyediaan bahan kimia serta bahan penunjang laboratorium

Tujuannya adalah:

- Menjamin agar pengujian dapat berlangsung dengan lancar dan baik.
- d. Partisipasi Uji Profisiensi dan Uji Banding antar laboratorium

Tujuannya adalah:

- Memantau, menilai dan mengevaluasi kompetensi laboratorium
- Menilai dan mengevaluasi kompetensi personil/analis
- Memastikan keabsahan hasil pengujian

Uji Profisiensi dan Uji Banding antar laboratorium yang diikuti meliputi:

- Uji Profisiensi Beras oleh Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Paskapanen Pertanian, Kementerian Pertanian tanggal 12-16 Agustus 2024 dengan hasil sangat memuaskan (*satisfactory*).
- Uji profisiensi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan tanggal 22 Juli – 2 Agustus 2024, laporan hasil belum diterbitkan.
- Uji banding beras yang diselenggarakan oleh BPSMB Kalimantan Timur tanggal 24 Juni – 5 Juli 2024, dengan hasil sangat memuaskan (*satisfactory*).
- Uji banding biji kakao yang dilaksanakan oleh UPTD BPSMB Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung tanggal 11-18 November 2024, laporan hasil belum diterbitkan.

- Uji banding lada putih yang dilaksanakan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Timur tanggal 7 – 18 Oktober 2024, laporan hasil belum diterbitkan.

e. Penyediaan ATK seperti tinta printer, kertas dan bahan cetak/penggandaan

Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi

Jumlah pagu awal untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sejumlah Rp. 69.844.750,- kemudian pada tahapan finalisasi APBD-P terdapat revisi anggaran tambah kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (pembayaran pajak, bea dan perizinan ke belanja perjalanan dinas biasa) sehingga pagu setelah perubahan Rp. Rp. 69.844.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.719.210,- atau 99.82 % untuk capaian realisasi keuangan dan 100% capaian realisasi fisik, silva Rp. 125.540,-

Ouput dari kegiatan ini adalah Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan, target 3 sertifikat dan capaian sebanyak 4 sertifikat kesesuaian mutu (SKM) komoditi jagung serta belum ada sertifikat produk yang diterbitkan.

Output kegiatan ini adalah :

a. Pengawasan mutu produk di kabupaten/kota.

Tujuannya adalah:

- Menjamin keamanan keselamatan dan lingkungan dari produk
- Memastikan terwujudnya perlindungan konsumen

b. Reakreditasi Laboratorium oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Pelaksanaan setiap 5 tahun sekali.

Tujuannya adalah:

- Memastikan bahwa laboratorium pengujian memiliki kualitas yang memadai sesuai standar yang ditetapkan.
- Memberikan keyakinan kepada pelanggan/masyarakat bahwa layanan laboratorium memenuhi standar yang diterima, baik nasional dan internasional.

❖ **Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**

Indicator kinerja kegiatan ini jumlah pelaku usaha yang diawasi dengan target 40 pelaku usaha, capaian 45 pelaku usaha

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi dengan target 12 laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi dengan capaian 100 % yaitu 12 laporan pengawasan yang dilaksanakan di Kabupaten/kota.

Pagu anggaran 2024 yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 39.436.750,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp. 39.435.048,- dengan silva Rp. 1.702,- Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,99%

Output kegiatan :

- a. Pelaksanaan Pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa dan Pengawasan Perdagangan, Lokasi Pengawasan se Provinsi Gorontalo yaitu terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yakni Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa dan Pengawasan Perdagangan dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN)

Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dinas kabupaten/Kota dan lintas sektoral untuk melakukan pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, dan pengawasan kegiatan perdagangan baik ditingkat distributor maupun pengecer (toko-toko, pedagang-pedagang pasar tradisional, Swalayan, supermarket minimarket dan kios-kios) dengan tujuan meningkatkan

perlindungan kepada konsumen dan menjaga kuantitas barang beredar dan jasa serta memperkuat daya saing produk dalam negeri sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan

1. Untuk Barang :

- a. Standar
- b. Label dalam bahasa Indonesia
- c. Petunjuk Penggunaan
- d. Jaminan Layanan Purna Jual
- e. Cara Menjual
- f. Pengiklanan
- g. Kalusula Baku

2. Untuk Jasa :

- a. Standar
- b. Jaminan dan/atau garansi yang di sepakati dan/atau di perjanjikan
- c. Klausula Baku

3. Untuk Pengawasan Perdagangan Meliputi;

- a. Perizinan di bidang perdagangan
- b. Perdagangan Barang yang diawasi,di larang dan/atau diatur
- c. Distribusi
- d. Pendaftaran Barang produk dalam negeri dan asal inpor yang terkait dengan K3L (keamanan, keselamatan, Kesehatan dan lingkungan hidup)
- e. Pemberlakuan SNI kwalifikasi secara wajib
- f. Pendaftaran Gudang
- g. Penyimpanan Bahan Kebutuhan Pokok dan/atau penting
- h. Perdagangan melalui sistim elektronik

Hasil Pengawasan barang Beredar dan atau/Jasa :

- 1. Terdapatnya Besi, celokan, kabel, kipas angin yang belum sesuai dengan Standar Nasional dan masih terdapatnya barang

yang tidak memiliki label harga pada barang yang diperdagangkan.

2. Masih banyak terdapat barang-barang kadaluarsa yang bercampur dengan barang-barang yang masih layak di konsumsi, berupa Biskuit, minuman dan bahan untuk pembuatan kue terdapat pada gudang-gudang dan penyelesaiannya di dilaporkan ke BPOM dan diselesaikan oleh Dinas Kabupaten/Kota.

Pengawasan Perdagangan antara lain :

1. Distribusi

- a. Pengawasan terhadap pelaku usaha distribusi

- Pola Distribusi dari Produsen
- Distributor, Agen ke Pengecer.
- Distribusi Barang

- b. Distribusi barang yang dilarang, diawasi, dan diatur.

- Minuman beralkohol, pupuk bersubsidi, gula rafinasi, barang berbahaya.

- c. Pengawasan terhadap penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan penting.

2. Perijinan

- Gudang-gudang (Tanda daftar Gudang, Siup, TDP, TDPUD, SIUP-MB)

3. Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

- Pasar rakyat
- Pusat-pusat perbelanjaan
- Toko swalayan
- Gudang
- Sarana perdagangan lainnya

Hasil Pengawasan

1. Masih terdapatnya penjualan minyak kita yang diatas harga Het misalnya di pasar-pasar tradisional

2. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak mempunyai tanda daftar gudang
3. Terdapatnya minuman beralkohol yang kadarnya 4.5% masih di jual di toko-toko tidak mempunyai ijin
4. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak sesuai dengan peruntukannya
5. Distributor Minuman beralkohol yang izinnya sudah menghampiri (dalam proses penegakan Hukum oleh kepolisian)
6. Banyak sub pangkalan-pangkalan Gas LPG yang Nakal menjual Gas LPG sudah melebihi Harga HET

Tabel 3.15 Data pengawasan Perlindungan Konsumen
Di Provinsi Gorontalo. Tahun 2024

NO	URAIAN (KATEGORI TEMUAN)	JUMLAH	KETERANGAN
1	KASUS ALAT UKUR UTTP	20	liter/Timbangan
			(Pasar2 Tradisional)
			(diserahkan Di Kab/Kota)
2	SNI (Wajib)	41	Mainan anak
			Tusuk Kontak
			Kabel Listrik
			Kipas Angin
3	Harga Pada Barang	25	Kompore Gas
			Tidak adanya label Harga Pada barang yang di Perdagangan di Kab-Kota.
4	Perbedaan Harga antara pajangan dab mesin hitung	10	Perbedaan Harga pada pajangan dan kasir
5	Minyak Goreng Curah	5	Di jual tidak sesuai dengan Harga HET
6	KADALUARSA	10	Kab/Kota Di serahkan Ke B'POM
7	Makanan dan Minuman	6	Makanan dan minuman belum kadaluarsa tapi sudah berjamur
JUMLAH TEMUAN		117	

B. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan program/kegiatan TA 2024, Dinas Kumperindag mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 41.063.393.248,- anggaran ini sudah termasuk gaji, tunjangan ASN dan DAK non fisik PK2KUKM, APBD-P serta anggaran yang bersumber dari pemanfaatan IF 2023 tahun 2024.

Adapun rincian alokasi anggaran pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 :

- a. Anggaran induk 2024 = Rp. 37.320.809.366,-
- b. Pemanfaatan sisa IF 2023 tahun 2024 = Rp. 3.187.933.882,-
- c. Tahapan Revisi Anggaran : = Rp. 1.720.683.882,-
 - ~ sisa IF periode 3 tahun 2023 = Rp. 3.187.933.882,-
 - ~ Revisi Pergeseran antar OPD = (Rp. 1.662.940.000,-)
 - ~ Revisi antar belanja = Rp. 195.690.000,-
- d. APBD-P 2024 = Rp. 2.021.900.000,-

Total anggaran 2024 setelah perubahan sejumlah Rp. 41.063.393.248,-

✚ *Pagu Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024*

- Belanja Operasi : Rp. 41.063.393.248,-
 - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.691.630.216,-
 - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 31.371.763.032,-
- Belanja Modal : Rp. -

✚ *Realisasi Anggaran :*

- Belanja Operasi : Rp. 40.817.064.768,-
 - ~ Belanja Pegawai : Rp. 9.659.965.973,-
 - ~ Belanja Barang & Jasa : Rp. 31.157.098.795,-
- Belanja Modal : Rp. -

Realisasi Keuangan sebesar 99,40% dan realisasi fisik 100% dengan sisa anggaran Rp. 246.328.480,- telah kembali ke Kas Daerah. Sisa anggaran Rp. 246.328.480,- terdiri dari :

- Sisa belanja gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp. 31.664.243,-
- Sisa DAK Non Fisik Koperasi
Belanja Transport Narasumber, Iuran BPJS Rp. 75.130.308,-
- Sisa DAK Non Fisik UMKM (seminatr kit, Iuran BPJS) Rp. 17.756.215,-
(seminar Kit, iuran BPJS)

- Sisa Pelaksanaan Pasar Murah & operasional Pendukung Rp. 65.671.755,-
- Sisa Honorarium BPSK Rp. 31.003.502,-
- Sisa Belanja Rutin (operasional kantor) Rp. 16.619.528,-
- Sisa Kegiatan lainnya Rp. 8.482.929,-

Adapun total alokasi anggaran belanja langsung tersebut, antara lain diperuntukkan untuk pencapaian 5 (lima) sasaran strategis utama yang terdapat pada Perjanjian Kinerja

Tabel. 3.16. Realisasi Anggaran Setiap Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu awal 2024	Total Pagu Setelah Perubahan 2024	Realisasi	% Realisasi
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	37.320.809.366	41.063.393.248	40.817.064.768	99,4
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	32.538.964.016	31.200.339.016	31.055.710.021	98,87
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.615.353.291	12.388.303.291	12.338.992.758	99,60
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	214.472.275	489.736.075	488.758.974,0	99,80
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.913.275	271.551.075	270.838.678,0	99,74
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.559.000	218.185.000	217.920.296	99,88
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.110.979.666	9.753.272.966	9.721.559.062	99,67
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.077.130.216	9.691.630.216	9.659.965.973	99,67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.849.450	61.642.750	61.593.089	85,29
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	553.632.000	469.510.000	468.234.790	99,73

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu awal 2024	Total Pagu Setelah Perubahan 2024	Realisasi	% Realisasi
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	553.632.000	469.510.000	468.234.790	99,73
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.736.269.350	1.675.784.250	1.660.439.932	99,08
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.736.269.350	1.675.784.250	1.660.439.932	99,08
Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (jumlah)	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	77.755.475	77.755.475	77.523.325	99,70
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	77.755.475	77.755.475	77.523.325	99,70
	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	77.755.475	77.755.475	77.523.325	99,70
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.649.855.250	1.649.855.250	1.574.724.942	95,45
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.649.855.250	1.649.855.250	1.574.724.942	95,45
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.649.855.250	1.649.855.250	1.574.724.942	95,45
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	670.416.750	675.696.750	674.952.700	99,89
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	670.416.750	675.696.750	674.952.700	99,89
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar,	670.416.750	675.696.750	674.952.700	99,89

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu awal 2024	Total Pagu Setelah Perubahan 2024	Realisasi	% Realisasi
	Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				
	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.267.183.250	1.293.583.250	1.275.335.035	98,59
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1.267.183.250	1.293.583.250	1.275.335.035	98,59
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	132.000.000	158.400.000	157.908.000	99,69
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	1.135.183.250	1.135.183.250	1.117.427.035	98,44
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	16.258.400.000	15.115.145.000	15.114.181.261	99,99
	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	16.258.400.000	15.115.145.000	15.114.181.261	99,99
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	16.258.400.000	15.115.145.000	15.114.181.261	99,99
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI	1.861.808.250	2.143.053.250	2.138.595.744	99,79

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu awal 2024	Total Pagu Setelah Perubahan 2024	Realisasi	% Realisasi
Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.861.808.250	2.143.053.250	2.138.595.744	99,79
	Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1.861.808.250	2.143.053.250	2.138.595.744	99,79
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	388.561.750	728.251.750	727.654.648	99,92
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.366.629.750	1.292.784.750	1.289.055.716	99,71
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	106.616.750	122.016.750	121.885.380	99,89
Meningkatnya Nilai Ekspor (USD)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.920.037.100	7.720.000.982	7.622.759.003	98,92
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	29.616.750	29.616.750	29.467.120	99,49
	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	29.616.750	29.616.750	29.467.120	99,49
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	29.616.750	29.616.750	29.467.120	99,49
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	1.474.200.100	5.718.663.982	5.652.890.227	98,85
	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.474.200.100	5.718.663.982	5.652.890.227	98,85
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku	103.400.000	124.080.000	123.978.000	99,92

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu awal 2024	Total Pagu Setelah Perubahan 2024	Realisasi	% Realisasi
	Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.370.800.100	5.594.583.982	5.528.912.227	98,83
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.416.220.250	1.971.720.250	1.940.401.656	98,41
	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.253.616.750	1.809.116.750	1.778.113.248	98,29
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1.253.616.750	1.809.116.750	1.778.113.248	98,29
	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	123.166.750	123.166.750	122.853.360	99,75
	Pengembangan Layanan Pengujian	53.322.000	53.322.000	53.134.150	99,65
	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	69.844.750	69.844.750	69.719.210	99,82
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	39.436.750	39.436.750	39.435.048	99,99
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	39.436.750	39.436.750	39.435.048	99,99

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian Output (%)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp).	Capaian Keuangan (%)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP	100	100	100	2.696.673.075	2.679.026.785	99,60
Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)	Jumlah Koperasi Berkualitas	100	99,98	99,98	858.716.975	857.634.745	96,83
	Jumlah UKM yang berdaya saing	100	100	100	15.277.793.750	15.276.255.596	99,88
Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	100	100	100	2.143.053.250	2.138.595.744	99,79
Meningkatnya nilai ekspor (USD)	Jumlah Nilai Ekspor	100	100	100	7.720.000.982	7.622.759.003	99,77
Dana APBD					28.696.238.032	28.574.271.873	91,72
Dana DAK Non Fisik					2.675.525.000	2.582.826.922	96,54
Jumlah Belanja Barang & Jasa					31.371.763.032	31.157.098.795	99,32
Belanja Pegawai					9.691.630.216	9.659.965.973	99,67
Total Belanja					41.063.393.248	40.817.064.768	99,40

Analisis Efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.18. Analisis Efisiensi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP	100	99,60	0,40

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)	Jumlah Koperasi Berkualitas	99,98	96,83	3,15
	Jumlah UKM yang berdaya saing	100	99,88	0,12
Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	100	99,79	0,21
Meningkatnya Nilai Ekspor (USD)	Jumlah Nilai Ekspor	100	99,77	0,23

pada tabel 3.16 diatas terlihat bahwa kinerja sasaran strategis Dinas Kumperindag terdapat tingkat efisiensi terbesar pada nilai 3,15% pada indikator kinerja utama jumlah koperasi berkualitas. Hal ini karena terdapat item belanja alat bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak yang tidak dibelanjakan sampai akhir tahun anggaran senilai Rp. 504.000,- sehingga realisasi fisik tidak mencapai 100%. Begitupun untuk realisasi keuangan masih terdapat sisa sekitar Rp. 75.130.308,- pada sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi yaitu sisa anggaran belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN sejumlah Rp. 17.7756.215,- karena transferan anggaran kegiatan DAK Non Fisik PK2UMK tidak masuk diawal tahun dan transferannya 2 (dua) tahap sehingga tidak bisa dibayarkan dari awal tahun atau bulan Januari karena menunggu transferan dari Kementerian Keuangan dan belanja perjalanan dinas transport narasumber kegiatan DAK Non Fisik PK2UMK karena Pelatihan Perkoperasian yang di laksanakan 19 (sembilan belas) pelatihan dalam pelaksanaannya ada beberapa pelatihan yang digabung sehingga transport narasumber sebagian tidak digunakan, adapun item belanja pendukung DAK Non Fisik PK2UMK pada kegiatan lain berupa sisa anggaran yang tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran pada sektor koperasi UKM perindustrian dan perdagangan dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan perkoperasian yang diberikan secara berkala kepada setiap koperasi yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo, pembinaan dan pendampingan kepada UKM melalui coaching clinic dan mentoring bagi UMKM, stimulan bagi UMKM, Peningkatan SDM bagi pelaku UMKM melalui E-commerce, marketplace. Peningkatan kualitas dan kontinuitas UMKM melalui kegiatan advokasi/Bimtek/Workshop, pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas, penyerapan tenaga kerja, memanfaatkan potensi bahan baku lokal. Peningkatan mutu produk melalui program peningkatan sumber daya manusia IKM melalui bimtek peningkatan mutu produk, sertifikasi halal, PIRT serta stimulan bantuan bagi IKM, meningkatkan promosi produk-produk lokal agar tingkat permintaan terhadap produk lokal unggulan semakin meningkat serta upaya penghematan penggunaan sarana prasarana.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2024 memuat laporan perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, perjanjian kinerja, indikator kinerja utama Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan selama kurun waktu tahun 2024.

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan dalam ketersediaan anggaran dalam upaya pencapaian sasaran kinerja Hasil yang telah dicapai di tahun 2024 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan dari Pimpinan (Gubernur) Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan uraian - uraian yang disampaikan diperoleh bahwa kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo di Tahun 2024 dapat dilihat dari capaian sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Indikator Kinerja I : Nilai SAKIP

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian IKU I ini sebesar Rp. 12.388.303.291,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.338.992.758 ,- atau sebesar 99,60 % keuangan dan tingkat efisiensi 0,40%, Target kinerja 100 % dan capaian 100 %.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan kickoff perbaikan SAKIP dengan menghadirkan seluruh pimpinan OPD, melakukan identifikasi OPD yang mendukung enam program unggulan provinsi, menyempurnakan rumusan indikator kinerja utama pada level OPD, menyusun pedoman akuntabilitas kinerja, memperbaiki laporan kinerja, meningkatkan kapasitas evaluator internal SAKIP serta mendorong komitmen pimpinan yang akan menjadi penentu keberhasilan SAKIP.

2. Meningkatnya Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah)

Indikator Kinerja II : Jumlah Koperasi Berkualitas

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian IKU II ini sebesar Rp. 2.403.307.475,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.327.200.967,- atau sebesar 96,83% keuangan dan tingkat efisiensi 3,15%. Target kinerja 100 % (20 koperasi) dan capaian 100%.

Target ini diharapkan dapat terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan perkoperasian yang diberikan secara berkala kepada setiap koperasi yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo. Pembinaan Koperasi lebih menitik beratkan kepada koperasi yang telah memperoleh Penguatan Modal di tahun sebelumnya, sehingga pemanfaatan sesuai peruntukannya dan pencatatannya sesuai sehingga dapat dipertanggungjawabkan Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong bertambahnya koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Ke depan semakin banyak Koperasi yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) serta mengurus Ijin Usaha Koperasi sesuai usaha atau KBLI (klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia) yang ada di anggaran dasar koperasi sebagai salah satu legalitas usaha, serta Mendorong transformasi koperasi modern di Gorontalo.

3. Indikator Kinerja III : Jumlah UKM yang Berdaya Saing

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian IKU III ini sebesar Rp. 16.408.728.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.389.516.296,- atau sebesar 99,88% keuangan dan tingkat efisiensi 0,12%. Target kinerja 100 % dan capaian 100%.

Upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja yaitu jumlah UKM yang berdaya saing antara lain :

- mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada UKM melalui coaching clinic dan mentoring bagi UMKM;
- stimulan bagi UMKM sesuai juknis yang berlaku
- Peningkatan SDM bagi pelaku UMKM melalui E-commerce, marketplace.
- Peningkatan kualitas dan kontinuitas UMKM melalui kegiatan advokasi/Bimtek/Workshop.

4. Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase)

Indikator Kinerja III : Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian IKU IV ini sebesar Rp. 16.408.728.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.389.516.296,- atau sebesar 99,88 % keuangan dan tingkat efisiensi 0,12%. Target kinerja 100% dan capaian 100% IKM

Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam Meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil Menengah yaitu :

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku IKM melalui program peningkatan sumber daya manusia IKM, pelatihan dan pendampingan agar para pelaku IKM dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produk, bimtek peningkatan mutu produk, sertifikasi halal, PIRT serta stimulan bantuan bagi IKM
- memperluas jaringan pemasaran (peningkatan akses promosi) antara lain melalui pengembangan kemitraan IKM dengan industri besar lainnya ;
- Kemudahan mengakses pembiayaan untuk menambah modal usaha para pelaku IKM
- Pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas melalui pemanfaatan potensi bahan baku lokal

5. Meningkatnya nilai ekspor (USD)

Indikator Kinerja V : Jumlah Nilai Ekspor

Alokasi anggaran untuk upaya pencapaian IKU V ini sebesar Rp. 2.143.053.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.138.595.744,- atau sebesar 99,79 % keuangan dan tingkat efisiensi 0,21 %. Target kinerja 100% dan capaian 100%

Untuk meningkatkan jumlah ekspor Upaya yang dilakukan :

- meningkatkan promosi produk-produk lokal agar tingkat permintaan terhadap produk lokal unggulan semakin banyak,
- Pelatihan dan Pengembangan SDM Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal keterampilan dan pengetahuan yang berkaitan dengan perdagangan internasional
- Peningkatan Kualitas Produk guna Memastikan bahwa produk yang diekspor memenuhi standar internasional dan memiliki kualitas yang konsisten

- Dukungan anggaran untuk meningkatkan promosi produk lokal seperti mengikuti pameran dagang (TEI), dan fasilitas produksi berupa pelatihan inovasi produk. Dengan kemudahan tersebut pengusaha bisa menekan harga jualnya sehingga barang yang diproduksi mampu bersaing di pasar internasional
- Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memasarkan produk di luar negeri.
- Kemudahan perizinan dagang sesuai aturan yang berlaku
- Perluasan akses kemitraan dengan berbagai lembaga yg membina UMKM

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan rencana. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Pencapaian target kegiatan dan sasaran tahun 2024 tidak hanya bersumber dari pendanaan APBD juga didukung oleh dana Dekonsentrasi. Di tahun 2024 kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan khususnya dalam pencapaian indikator program pada Renstra 2023-2026.

Keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja, pemanfaatan sumber dana yang tersedia semaksimal mungkin serta pemanfaatan kemampuan aparatur.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan masih banyak kendala dan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian baik oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun Dinas Kumperindag sendiri, antara lain proporsi anggaran pembangunan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun dirasakan sangat terbatas, mengingat dinas ini mengemban peranan dan fungsi strategis dalam upaya menggerakkan sektor riil, yang meliputi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Kecil Menengah (IKM) dan pelaku usaha, sehingga memerlukan pendanaan yang maksimal serta fasilitas berupa sarana prasarana kerja yang mendukung. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 telah diupayakan

■ untuk dilaksanakan dengan optimal, jika masih terdapat kekurangan yang bersifat administratif maupun substantif kami mohon saran dan masukan untuk perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.

Gorontalo, Februari 2024
Kepala Dinas Kumperindag
Provinsi Gorontalo



RISON SUNGE

Pembina Utama Madya
NIP. 196909241989021001

